PERAN SATGAS PPA RW 18 LELES (PENYULUH) DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DI RW 18 LELES RAMAH ANAK SELAMA MASA PANDEMI COVID-19

DIAJUKAN SEBAGAI PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA ILMU KOMUNIKASI PADA FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Oleh

I Made Dimas Ridho Wardana
17321062

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
TAHUN 2021

PERAN SATGAS PPA RW 18 LELES (PENYULUH) DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DI RW 18 LELES RAMAH ANAK SELAMA MASA PANDEMI COVID-19

DIAJUKAN SEBAGAI PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA ILMU KOMUNIKASI PADA FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Oleh

I Made Dimas Ridho Wardana
17321062

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
TAHUN 2021

HALAMAN PERNYATAAN
PERNYATAAN AKADEMIK

Bismillahirrahmannirrahiim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:
Nama : I Made Dimas Ridho Wardana
NIM : 17321062

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa:

1. Selama menyusun skripsi ini saya tidak melakukan tindak pelanggaran akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia.
2. Karena itu, skripsi ini merupakan karya ilmiah saya sebagai penulis, bukan karya jiplakan atau karya orang lain.
3. Apabila di kemudian hari, setelah saya lulus dari Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia, ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya setujui dengan sesungguhnya.

Yogyakarta, 1 Juli 2020

Yang menyatakan,

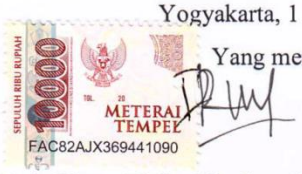

(I Made Dimas Ridho Wardana 17321062)

MOTTO

"Do not go gentle into that good night."

Dylan Thomas

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada:

Ibu dan Bapak yang senantiasa mencurahkan segalanya untuk saya dan Mbak yang selalu mendukung saya

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi*

PERAN SATGAS PPA RW 18 LELES (PENYULUH) DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DI RW RAMAH ANAK LELES SELAMA MASA PANDEMI COVID-19

Disusun Oleh

I MADE DIMAS RIDHO WARDANA

17321062

Telah disetujui dosen pembimbing skripsi untuk diujikan dan dipertahankan di hadapan tim penguji skripsi.

Tanggal: 2 September 2021

Dosen Pembimbing

Puji Hariyanti, S.Sos., M.I.Kom

NIDN 0529098201

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi*

PERAN SATGAS PPA RW 18 LELES (PENYULUH) DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DI RW RAMAH ANAK LELES SELAMA MASA PANDEMI COVID-19

Disusun Oleh

I MADE DIMAS RIDHO WARDANA

17321062

Telah dipertahankan dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi*
Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia.
Tanggal: 2 September 2021

Dewan Penguji:

1. Puji Hariyanti, S.Sos., M.I.Kom
   NIDN 0529098201 (.....)

2. Holy Rafika Dhona, S.I.Kom.,M.A
   NIDN 0512048302 (.....)

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

(Puji Hariyanti, S.Sos., M.I.Kom)

NIDN 0529098201

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahiim.

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala pujian hanya milik Allah, Tuhan yang Esa, pencipta semesta alam yang karena kehendaknya penulis dapat menyelesaikan karya ini pada waktu yang dikehendaki-Nya. Tak lupa sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Salallahualaihiwassalam yang telah menjadi pembebas bagi pengikutnya dan rahmat untuk semesta alam.

Tulisan ini ditulis dengan tujuan untuk melengkapi persyaratan guna mendapatkan gelar sarjana Ilmu Komunikasi di Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Skripsi ini berjudul Peran Satgas PPA RW 18 Leles (Penyuluh) dalam Memberdayakan Masyarakat di RW 18 Leles Ramah Anak Selama Masa Pandemi Covid-19 yang diharapkan dapat memberikan sumbangan ide, gagasan kepada pihak akademik maupun praktisi guna memberdayakan lingkungan sekitar agar mereka dapat hidup menjadi manusia seutuhnya.

Perjalanan dalam menyelesaikan karya ini tidak mudah. Penulis mengalami berbagai hambatan. Karya ini tak lepas dari dukungan dan bimbingan berbagai pihak yang membantu meringankan beban penulis, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu, yang tak henti-hentinya mendoakan saya dalam berbagai episode kehidupan.
2. Bapak yang selalu mendukung apapun keputusan yang saya ambil.
3. Mbak Enno yang menjadi sosok kakak dalam setiap kesulitan yang dihadapi adiknya.
4. Ibu Puji Hariyanti yang membimbing, mengarahkan dan mendukung saya dalam mengerjakan karya ini sampai selesai.
5. Ibu Sumarni, Bapak Paijan Trisno Harjono, Ibu Supri Haryanti dan Satgas PPA RW Leles sebagai narasumber yang dengan senantiasa menjawab dan memberikan saya informasi untuk melengkapi data skripsi ini.
6. Masyarakat RW 18 Leles ramah anak yang menyambut baik saya selama menjalankan penelitian ini.
7. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Komunikasi UII dan dosen lain yang mendidik dan memberikan saya pengetahuan, mengajarkan kebijaksanaan dan memahamkan arti kebermanfaatan untuk sesama mahluk.

8. Seluruh sivitas akademik Program Studi Ilmu Komunikasi dan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya yang memberikan kemudahan dan membantu ketika saya mengalami kendala selama menjalani perkuliahan.
9. Teman-teman sesama jurusan Ilmu Komunikasi yang ikut serta membantu saya dengan memberikan inspirasi dan dorangan untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Dan seluruh pihak yang ikut membantu dan memberikan dukungan yang tidak bisa saya sebutkan semuanya.

Demikian ucapan terimakasih ini saya hanturkan kepada semua pihak yang membantu saya. Semoga Allah SWT memberikan kebaikan dan kemudahan dalam hidup kepada mereka yang membantu saya dan menabur kebaikan di kesempatan yang lain. Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karenanya kritik dan saran yang terbuka akan berguna untuk saya di kemudian hari.

Yogyakarta, 4 Juli 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**
SAMPUL DALAM ..... **ii**
HALAMAN PERNYATAAN ..... **iii**
MOTTO ..... **iv**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **v**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
DAFTAR ISI ..... **ix**
DAFTAR GAMBAR ..... **xi**
ABSTRAK ..... **xii**
ABSTRACT ..... **xiii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 4
D. Manfaat Penelitian 5
1. Manfaat Teoritis 5
2. Manfaat Praktis 5
E. Tinjauan Pustaka 5
F. Kerangka Teori 8
1. Pemberdayaan 8
2. Komunikasi untuk Pemberdayaan/Komunikasi Pemberdayaan 11
3. Fasilitator 12
4. Desa/Lingkungan Ramah Anak 18
G. Metode Penelitian 20
BAB II GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN **25**
A. RW 18 Leles Ramah Anak 25
B. Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak RW 18 28
BAB III TEMUAN DAN PEMBAHASAN **32**
A. Temuan 32

B. Pembahasan 63
BAB IV PENUTUP 83
A. Simpulan 83
B. Keterbatasan Penelitian 85
C. Saran/Rekomendasi 86
Daftar Pustaka 87
LAMPIRAN 89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Denah Wilayah RT 01/RW18, Leles 25
Gambar 2.2 Denah Wilayah RT 02/RW 18, Leles 26
Gambar 2.3 Kegiatan les Bahasa Inggris di Taman Bermain..... 28
Gambar 2.4 Pertemuan Satgas PPA RW 18 Leles 31
Gambar 3.1 Anak-anak Bermain di Taman Bermain 35
Gambar 3.2 Posyandu di RW 18 Leles 40
Gambar 3.3 Kegiatan Bimbingan Belajar 43
Gambar 3.4 Banner di Pintu Masuk Jalan Delima 59
Gambar 3.5 Mural 4 Hak Dasar Anak 60
Gambar 3.6 Penggunaan Stiker Sebagai Media Komunikasi 61
Gambar 3.7 Banner Kawasan Wajib Masker di RW 18 Leles 80
Gambar 3.8 Pengecekan Suhu dan Penyediaan Tempat Cuci Tangan di Posyandu 81
Gambar 3.9 Foto Bersama Setelah Les Komputer dengan AMIKOM 82

ABSTRAK

Wardana, I Made Dimas Ridho (2021). Peran Satgas PPA RW 18 Leles (Penyuluh) dalam Memberdayakan Masyarakat di RW 18 Leles Ramah Anak Selama Masa Pandemi Covid-19. Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia.

Laju pembangunan dan perkembangan teknologi yang begitu cepat menciptakan berbagai dampak dalam kehidupan. Anak-anak menjadi salah satu golongan yang terdampak dengan fenomena ini. Lapangan bermain yang berkurang, kaum rentan dengan kekerasan dan terpaan teknologi yang akan berdampak bagi tumbuh kembangnya. Penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan peran Satgas PPA RW 18 Leles sebagai fasilitator dalam kegiatan pemberdayaan kawasan ramah anak di RW 18 Leles serta menilik dampak yang terjadi selama masa pandemi Covid 19.

Teori yang digunakan penelitian ini adalah teori pemberdayaan dan komunikasi pemberdayaan, peran fasilitator, dan kawasan ramah anak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara langsung maupun tidak langsung menyesuaikan dengan kondisi lapangan, selain itu peneliti juga menggunakan data sekunder dari dokumen-dokumen maupun penelitian terdahulu. Penelitian ini berlangsung sejak November 2020 sampai Juli 2021.

Hasil temuan penelitian ini adalah Satgas PPA RW 18 Leles melakukan peran-peran yang harus dilakukan oleh fasilitator dan terus mengembangkan serta menjaga kegiatan pemberdayaan kawasan ramah anak di RW 18 Leles tetap berjalan. Perubahan-perubahan yang terjadi di RW 18 Leles adalah perubahan yang sebagaimana terjadi di masyarakat secara umum. Kondisi pandemi memaksa kegiatan di RW 18 menjadi terbatas, penerapan protokol yang berlaku, penambahan pesan ajakan untuk menjaga kesehatan dan lain sebagainya. Singkatnya Satgas PPA RW 18 Leles juga menerapkan *new normal* pada kegiatan pemberdayaan RW 18 Leles Ramah Anak.

Kata kunci: Komunikasi pemberdayaan, pemberdayaan, peran fasilitator, pandemi, covid-19

ABSTRACT

Wardana, I Made Dimas Ridho (2021). The Role of Satgas PPA RW 18 Leles (Facilitator) in Empowering the Community in RW 18 Leles Child-Friendly During the Covid-19 Pandemic. Communication Studies Program, Faculty of Psychology and Socio-Cultural Sciences, Indonesian Islamic University.

The rapid pace of development and technological developments creates various impacts in life. Children are one of the groups affected by this phenomenon. Reduced playground, vulnerable group with violence and exposure to technology that will have an impact on their growth and development. This study aims to describe the role of the Satgas PPA RW 18 Leles as a facilitator in empowering child-friendly areas in RW 18 Leles and observing the impacts that occurred during the Covid 19 pandemic.

The theory used in this research is theory of empowerment and empowerment communication, role of facilitator and child friendly area. This study uses qualitative methods with direct and indirect interview data collection techniques to adjust to field conditions, in addition, researchers also use secondary data from documents and previous research. This research is going on from November 2020 to July 2021.

The result of this study is that the Satgas PPA RW 18 Leles carries out the roles that must be carried out by the facilitator and continues to develop and maintain the activities of empowering child-friendly areas in RW 18 Leles. The changes in RW 18 Leles are changes that occur in society in general. The pandemic condition forces activities in RW 18 to be limited, implementation of health protocols, addition of persuasive messages to maintain health and so on. In short, Satgas PPA RW 18 Leles has also implemented a new normal in the empowerment of RW 18 Leles Child-Friendly.

.

keywords: *Communication empowerment, empowerment, role of facilitator, pandemic, covid-19*

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur yang terus menerus dilaksanakan, membuat semakin banyak kemunculan wilayah-wilayah urban. Pertumbuhan penduduk yang semakin hari semakin melonjak membuat banyak lahan seperti persawahan, pinggiran sungai, hutan maupun taman beralih fungsi menjadi bangunan penduduk ataupun bangunan perkotaan. Sebagai salah satu kota besar di Indonesia, Yogyakarta juga tak luput dari terpaan pembangunan ini. Persawahan di Kulon Progo misalnya yang berkurang seluas 4.278 hektare demi pembangunan bandara NYIA (Putri, 2018).

Selain itu pembangunan infrastruktur di Yogyakarta masih dinilai destruktif karena mengesampingkan kepentingan lingkungan dan sosial lainnya (Subarkah, 2019). Dampak pembangunan ini (terutama pembangunan perumahan atau hunian) juga berdampak pada lahan bermain anak-anak yang semakin berkurang. Hal ini dapat dilihat dari beberapa potret ruang bermain anak yang dinilai kurang layak (Antonius, 2019) ataupun potret anak-anak berenang di sungai kotor (Fanani, 2019).

Disaat yang bersamaan, perkembangan teknologi semakin cepat berkembang. *Smartphone* kini semakin mudah dibeli oleh masyarakat baik dari kalangan menengah ke bawah sampai kalangan menengah atas. Sebagai salah satu perangkat komunikasi maupun hiburan yang paling modern dan murah, gawai seolah menjadi sebuah kebutuhan pokok masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan survey yang dilakukan oleh Kominfo dalam indonesiabaik.id pada tahun 2017 yang menunjukan bahwa 66,31% masyarakat memiliki *smartphone* (indonesiabaik.id, 2019). Dari data tersebut terlihat rentang usia 9 - 19 tahun yang memliki smartphone sebesar 65,34%. Selain itu, survey yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII) pada tahun 2018 menunjukan penetrasi internet di Indonesia mencapai angka 64,8% atau mencangkup 171,17 juta penduduk naik dari tahun 2017 yang hanya mencapai 54,68% (APJII, 2018).

Kedua fenomena diatas berdampak terhadap banyak hal, salah satunya berdampak terhadap tumbuh kembang anak-anak, terutama untuk anak-anak yang hidup di daerah yang beririsan langsung dengan pembangunan infrastruktur dan kemajuan teknologi. Anak-anak yang hidup di daerah tersebut (biasanya perkotaan)

perlahan mulai kekurangan lahan bermain di sekitar tempat tinggal mereka dan mulai teralihkan dengan gawai. Permainan lapangan yang banyak membutuhkan gerak tubuh sangat penting untuk gerak motorik anak tergantikan dengan permainan gawai yang tidak memerlukan banyak gerak tubuh.

Dalam masa pertumbuhannya, anak-anak menjadi sangat rentan dengan yang terjadi di lingkungannya. Lingkungan yang tidak ramah untuk anak akan sangat berdampak terhadap pertumbuhannya. Kekerasan pada anak yang kerap terjadi menjadi tanggung jawab orang tua. Dilansir dari tirto.id sebanyak 73,7% anak Indonesia mengalami kekerasan dalam bentuk: fisik, seksual, emosional, pengabaian dan eksploitasi (Gerintya, 2017).

Ruang bermain anak yang semakin berkurang, perkembangan teknologi yang semakin bersinggungan dengan anak-anak dan kekerasan yang mengintai anak-anak membuat masyarakat RW 18 Leles, Condong Catur secara mandiri menciptakan lingkungan yang ramah dengan anak. Mereka membuat kesepakatan bersama untuk memberikan ruang bermain anak-anak, membatasi anak-anak bermain gawai dan mengawasi mereka dari kekerasan baik seksual maupun kekerasan lainnya. Berkat inisiatif mereka, sekarang ini RW 18 Leles dikenal dengan kawasan ramah anak. Menurut beberapa sumber, RW 18 Leles Ramah Anak sudah ada sejak 2015 namun Indiyani selaku sekretaris RW 18 Leles Ramah Anak Leles dan Paijan Trisno Harjono selaku ketua RW 18 Leles menyatakan bahwa kegiatan untuk menjadikan RW 18 Leles sebagai kawasan ramah anak sudah berlangsung sebelum itu.

Selain itu, cangkupan wilayah yang hanya sebatas tingkat Rukun Warga (RW) membuat RW 18 Leles menjadi wilayah ramah anak dengan cangkupan wilayah terkecil (cangkupan RW). Sumarni menjelaskan bahwa RW 18 Leles menjadi satu-satunya kawasan ramah anak pada tingkat RW di Jogjakarta. Lebih lanjut Sumarni meyakini bahwa kegiatan kawasan ramah anak pada umumnya berada bada tingkatan desa atau kampung maupun tingkatan yang lebih tinggi.

RW 18 Leles Ramah Anak terus berupaya menjaga kesepakatan bersama untuk menjaga RW 18 Leles sebagai kawasan yang ramah anak. Hal ini kemudian membuat RW 18 Leles Ramah Anak menjadi kawasan ramah anak terbaik di Yogyakarta (Darisman, 2019). Untuk menjaga keramahan lingkungan untuk anak-anak, RW 18 Leles Ramah Anak memiliki moto yang terus dijaga, adapun moto yang dimaksud adalah: memberikan ruang bermain untuk anak-anak, membatasi

anak-anak dari smartphone, dan mengawasi anak-anak dari segala bentuk kekerasan. Moto inilah yang secara konsisten dijalankan oleh masyarakat demi menciptakan RW 18 Leles Ramah Anak.

Bentuk nyata penerapan memberikan ruang bermain anak adalah dengan menutup sebuah jalan pada jam bermain anak mulai pukul 15:30-17:30. Hal ini dilakukan agar anak-anak lebih leluasa bermain dan berlari tanpa perlu mengkhawatirkan kendaraan yang melintas. Jika ada seseorang yang harus melewati jalan yang dimaksud, mereka harus menuntun kendaraan mereka sepanjang jalan itu demi menjaga kenyamanan anak-anak dalam bermain. Dalam hal mengawasi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, mereka memiliki SOP sendiri untuk menindak jika kekerasan pada anak benar-benar terjadi.

Paijan menceritakan beberapa kali pernah ada kekerasan pada anak, baik itu kekerasan seksual, kekerasan fisik dan anak yang terdampak kekerasan dalam rumah tangga. Satgas desa ramah anak Leles kemudian bertanggung jawab dalam menindak kekerasan tersebut sesuai dengan SOP yang sudah mereka buat, mulai dari mendampingi anak-anak sampai melaporkan pelaku kepada pihak yang berwajib. Namun, dalam moto membatasi anak-anak dalam menggunakan smartphone mengalami kendala selama masa pandemi ini.

Pandemi menyebabkan pemerintah untuk membuat protokol demi menjaga kesehatan masyarakat. Banyak kegiatan lapangan yang dibatasi aktivitasnya, salah satunya adalah sekolah. Pemerintah membuat keputusan untuk menutup sekolah dan menerapkan sistem kegiatan belajar secara *online*. Hal ini kemudian memaksa anak-anak untuk lebih banyak berinteraksi dengan gawai dan internet. Paijan merasakan hal ini membuat salah satu moto mereka menjadi sedikit terhambat. Ia kemudian bersama Satgas PPA RW 18 Leles Ramah Anak dan masyarakat membuat kesepakatan baru agar lebih mengawasi anak saat kegiatan belajar online. Lebih lanjut Paijan mengungkapkan angan sampai anak-anak ketika selesai belajar dengan gawai lanjut bermain gawai. Pengawasan orang tua menjadi sangat penting di masa pandemi ini.

Dari penjabaran fenomena di atas masyarakat dan perangkat desa memiliki peran yang sangat besar dalam menciptakan dan menjaga program RW 18 Leles Ramah Anak tetap berjalan. Banyak strategi dan kegiatan yang mereka lakukan demi menjaga kenyamanan anak-anak dalam bermain dan menyampaikan aspirasinya kepada orang tua. Oleh karena itu penelitian ini akan berfokus pada

peran pihak yang berkontribusi (penyuluh) dalam menciptakan dan menjaga program RW 18 Leles Ramah Anak. Hal itu juga menjadi urgensi dari penelitian ini mengingat anak-anak yang sangat rentan dengan dampak modernisasi.

Pertimbangan pemilihan RW ramah anak Leles sebagai objek penelitian dibandingkan dengan desa atau kawasan ramah anak lainnya adalah karena faktor konsistensi penyuluh/fasilitator, perangkat desa dan masyarakat RW 18 Leles dalam menjaga RW ramah anak selama tak kurang dari 5 tahun (sejak tahun 2015) dan RW 18 Leles yang menjadi wilayah ramah anak pada wilayah terkecil, yakni Rukun Warga (RW). Selain itu daya mobilitas peneliti (hanya berjarak kurang lebih 10 km dari tempat tinggal peneliti) selama masa pandemi dalam melaksanakan penelitian ini juga menjadi pertimbangan dalam memilih RW Leles sebagai objek penelitian.

Dari studi penelitian terdahulu, peneliti menemukan cukup banyak penelitian yang membahas peran penyuluh/fasilitor atau pihak yang membawa perubahan positif di masyarakat dengan kegiatan pemberdayaan. Peneliti meyakini pemilihan fasilitator pemberdayaan kawasan ramah anak pada tingkat Rukun Warga (RW) di RW 18 Leles Ramah Anak menjadi kebaruan dalam penelitian ini bersamaan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang sedang terjadi di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran penyuluh dalam memberdayakan masyarakat melalui program RW ramah anak di kampung Leles, Condong Catur serta menjabarkan perubahan yang terjadi selama masa pandemi dengan pertanyaan:

1. Bagaimana peran satgas PPA RW 18 Leles (penyuluh) dalam memberdayakan masyarakat di RW ramah anak Leles selama masa Pandemi Covid-19?
2. Apa saja perubahan yang terjadi selama masa pandemi di RW ramah anak Leles?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis peran satgas PPA RW 18 Leles (penyuluh) dalam memberdayakan masyarakat di RW 18 Leles ramah anak selama masa Pandemi Covid 19.
2. Untuk mengetahui perubahan apa saja yang terjadi di RW ramah anak sebelum dan saat masa Pandemi Covid 19.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat dan dapat berkontribusi untuk pihak-pihak yang memiliki kepentingan terkait. Adapun manfaat yang diharapkan adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam bidang akademik dan dapat memberikan kontribusi ide dan gagasan dalam bidang komunikasi pemberdayaan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Selain manfaat akademis, penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan gagasan, inspirasi dan evaluasi untuk satgas (penyuluh) RW 18 Leles ramah anak dalam menjaga dan mengembangkan program yang sudah mereka bangun.

E. Tinjauan Pustaka

Guna memperdalam analisis penelitian secara komprehensif dan untuk memaparkan kebaruan penelitian ini dari penelitian-penelitian sebelumnya berikut terpapar beberapa penelitian yang memiliki kesamaan konsep, teori maupun gagasan serta perbedaan dengan penelitian ini:

1. Puji Hariyanti dengan penelitiannya yang berjudul Peran Relawan TIK Dalam Program Desa Broadband Terpadu Cikadu, Cianjur, Jawa Barat berhasil mengaji peran relawan TIK dalam program desa broadband yang berada di Cikadu, Cianjur. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan observasi secara langsung. Hasil temuan di lapangan dari penelitian ini menunjukan relawan TIK memiliki peran yang sangat vital sebagai fasilitator dalam memberdayakan masyarakat. Namun, peran relawan TIK dinilai masih

belum maksimal, hal ini ditunjukan dengan minat masyarakat desa dalam berpartisipasi untuk program ini masih rendah.

2. Desak Ketut Sintaasih dan kawan-kawan melakukan penelitian dengan judul Peran Pemberdayaan Dalam Menopang Kreativitas Sumber Daya Manusia Sebagai Sumber Daya Saing Industri Kecil Dan Menengah (IKM) Di Kabupaten Badung Provinsi Bali. Dalam penelitian ini, Desak Ketut menganalisis penerapan pemberdayaan SDM (pemberdayaan struktural dan psikologis) dan mengaji peran pemberdayaan SDM pada kreativitas karyawan guna bersaing dalam usaha IKM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan observasi, metode wawancara, dan pengumpulan data dengan kuesioner. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemberdayaan memiliki dampak yang signifikan dalam kreativitas karyawan IKM guna meningkatkan persaingan.
3. Penelitian yang selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Adi Pradinata Tarigan dengan judul Peran Lurah Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bangko Kiri Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan Pradinata menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan penelusuran dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Pradinata berhasil mengungkap pentingnya peran Lurah sebagai fasilitator guna memberdayakan masyarakat yang hidup di wilayahnya. Lurah sebagai seorang yang secara struktural bekerja dibawah pemerintah memiliki kewajiban untuk menciptakan ruang agar masyarakatnya dapat berkembang.
4. Merujuk dalam beberapa penelitian diatas yang menyimpulkan tentang pentingnya fasilitator dalam sebuah program pemberdayaan, Ni Putu Wulan Suwarningmas dan kawan-kawan juga pernah melakukan penelitian terkait. Penelitian mereka berjudul Peran Penyuluh Pertanian dalam Pembinaan Kelompok Wanita Tani (KWT). Penelitian ini salah satunya bertujuan untuk menganalisa peran penyuluh pertanian dalam membina kelompok wanita tani di desa Nyanglan, kabupaten Klungkung adapun metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penyuluh berperan penting dalam melakukan

pembinaan dan penyuluh melakukan tugasnya dengan baik meskipun dalam praktiknya mereka mengalami berbagai hambatan.

5. Selain itu, penelitian yang berkaitan dengan peran fasilitator juga pernah dilakukan oleh Meygita Yohan Pratiwi dengan judul Fasilitator dalam Pemberdayaan Lansia pada Program Bina Keluarga Lansia. Penelitian menggunakan paradigma konstruktivisme dan didesain dalam bentuk penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan pengumpulan data berupa wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penyuluh memiliki peran yang sangat besar dalam memberdayakan lansia pada program bina keluarga lansia.
6. Nur Fadlin Amalia dan kawan-kawan dengan penelitiannya yang berjudul Peran Agen Perubahan Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pantai Bajul Mati Kabupaten Malang berhasil mendeskripsikan peran agen perubahan dalam program pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer didapat dari wawancara dengan informan dan melalui kegiatan observasi dan data sekunder didapat dari kegiatan dokumentasi yang terkait dengan penelitian. Peneliti menggunakan teknik analisis data interaktif model Miles dan Huberman, analisis ini adalah analisis yang dilakukan secara terus menerus sampai data yang dianalisis sudah jenuh. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukan bahwa masyarakat kagum terhadap agen perubahan. Rasa kagum ini tak lepas dari tugas agen perubahan yang berperan penting dalam membantu masyarakat untuk membangun semangat dan menyadarkan masyarakat demi melakukan sebuah perubahan positif.

Penelitian diatas adalah penelitian tema pemberdayaan dengan fokus untuk menganalisis ataupun mendeskripsikan peran fasilitator dalam program pemberdayaan. Fasilitator memiliki peran yang sangat penting dalam proses pemberdayaan. Selain fasilitator, peran masyarakat juga penting untuk kesuksesan program pemberdayaan yang dilakukan. Fasilitator juga bertugas untuk menumbuhkan semangat masyarakat untuk ikut berperan dalam program yang dijalankan.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan beberapa penelitian diatas, yakni untuk menganalisis peran penyuluh. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dijabarkan diatas adalah objek penelitian ini yang berfokus pada program pemberdayaan program ramah anak. Selain itu kebaruan penelitian ini dari penelitian terkait sebelumnya adalah kondisi dan situasi sosial di dunia yang sedang dihadapkan dengan pandemi covid-19.

Penelitian yang mengambil gagasan dampak pandemi covid-19 peneliti anggap masih baru mengingat pandemi covid-19 dimulai di tahun yang sama dengan penelitian ini dilaksanakan. Sebagaimana yang terjadi dilapangan, pandemi membuat banyak perubahan yang sangat signifikan untuk kegiatan diluar dan harus dibatasi, sehingga beberapa kegiatan mulai tergantikan dengan aktivitas-aktivitas yang berbasis internet/daring.

F. Kerangka Teori

1. Pemberdayaan

Konsep pemberdayaan muncul pertama kali pada abad pertengahan yang kemudian mulai sering dikaji pada tahun 1960'an. Fortunati memperkirakan gagasan dan konsep pemberdayaan sendiri muncul pada saat pasca perang dunia kedua. Masyarakat pada saat itu menentang gagasan lama tentang kekuasaan dan otoritas. Mereka melakukan demikian karena konsepsi itu lekat dengan despotisme dan kediktatoran yang menyebabkan kengerian perang dunia kedua (Fortunati, 2014).

Gagasan ini diperkuat dengan gagasan yang diungkapkan oleh Pranarka dan Vidhyandika (1996) dalam Hikmat (2013). Mereka mengatakan konsep pembardayaan (*empowerment*) muncul ke permukaan pada dekade 1970'an. Lebih lanjut, Pranarka dan Vidhyandika menekankan gagasan pemberdayaan berorientasi pada antisistem, antistruktur, dan antideterminisme. Pada dasarnya, konsep pemberdayaan ingin menciptakan cara baru dalam pembangunan masyarakat (Hikmat, 2013).

Pemberdayaan kemudian terus berkembang dan diadaptasi oleh berbagai disiplin ilmu mulai dari kesehatan, ekonomi, politik, sosial dan lain sebagainya. Dampaknya, pemberdayaan kemudian mulai mempengaruhi berbagai teori dan praktik di masing-masing disiplin ilmu

sesuai dengan kepentingan mereka. Karena gagasan pemberdayaan itu diadaptasi oleh berbagai disiplin ilmu, pemberdayaan kemudian memiliki banyak definisi sesuai dengan kebutuhan masing-masing disiplin ilmu.

Istilah pemberdayaan dalam bahasa inggris adalah *empowerment*. *Empowerment* kemudian dikontraskan dengan *power* (daya/kekuasaan) dimana makna *power* adalah kebalikan dari *empowerment* atau orang-orang yang perlu diberdayakan. Orang miskin atau orang yang tidak memiliki daya perlu diberikan daya/diberdayakan agar mereka dapat memiliki dan mengakses aset dan kapabilitas yang seharusnya mereka miliki.

Secara garis besar Fortunati menyimpulkan definisi pemberdayaan dari berbagai sumber adalah sebuah proses yang memberdayakan suatu pihak agar mendapatkan kekuasaan atas kepentingan pribadi mereka, mempengaruhi masalah-masalah politik yang berefek kepada mereka, kemampuan untuk mengartikulasikan cerita mereka, kapasitas untuk *self-action* dan transformasi dari makna diri, kapasitas untuk mengakses informasi dan sumber daya, kepercayaan dan otonomi pilihan yang bermakna dan bebas serta untuk menerjemahkan pilihan mereka kedalam tindakan dan hasil yang diinginkan, kapasitas untuk meningkatkan agensi dalam membentuk kehidupan mereka dan komunitas dimana mereka tinggal dan lain-lain (Baron and Gomez 2012; Campbell and Jovchelovitch 2000; Chamberlin 1997; Doctor 1991; Kabeer 1999; Melkote and Steeves 2001; Zimmerman 1995; Rappaport 1987; Wallerstein 1992, dalam Fortunati, 2014).

Definisi lain pemberdayaan adalah perluasan kebebasan atas pilihan dan aksi. Artinya meningkatkan otoritas dan kontrol seseorang terhadap sumberdaya dan keputusan yang mempengaruhi kehidupan seseorang/dirinya sendiri (Narayan, 2002). Definisi ini tak lepas dari gagasan Narayan yang menganggap kebebasan milik orang miskin sangat terbatas. Orang miskin memiliki aset dan kapabilitas (daya) yang terbatas dan tidak memiliki kekuasaan penuh atas dirinya.

Yang dimaksud aset dalam hal ini adalah apapun yang menyangkut hal-hal fisik maupun finansial seperti rumah, tanah, ternak, tabungan, perhiasan dan lain sebagainya. Keterbatasan aset yang dimiliki orang miskin atau tidak berdaya akan berdampak kepada kapabilitas yang mereka miliki.

Kapabilitas/daya adalah kemampuan seseorang dalam mengelola aset yang mereka miliki. Daya seseorang yang dimaksud mencangkup hal-hal seperti kesehatan, pengetahuan dan pendidikan, produksi ataupun kemampuan seseorang dalam meningkatkan kebutuhan hidup.

Pemberdayaan adalah proses yang melibatkan antara dimensi personal dan dimensi kolektif. Pemberdayaan dalam dimensi personal menyangkut bagaimana mereka yang tidak berdaya menilai diri mereka sendiri dan pengetahuan, kemampuan dan kapabilitas yang mereka miliki. Komponen dari pemberdayaan personal adalah makna, kompetensi, dan penentuan nasib sendiri (Hur 2006, dalam Fortunati, 2014). Sedangkan pemberdayaan kolektif menyangkut tentang bagaimana orang bergabung dalam aksi perubahan sosial yang menguntungkan bagi mereka. Komponen dari pemberdayaan kolektif adalah kepemilikan bersama, keterlibatan dalam komunitas, kontrol atas organisasi dalam komunitas, dan pembangunan komunitas.

Pemberdayaan dalam dimensi personal maupun dimensi kolektif memiliki hubungan timbal balik yakni antara aset dan kapabilitas yang dimiliki oleh individu dengan kapabilitas untuk bertindak secara kolektif. Hubungan dua arah ini berlaku untuk semua kelompok dalam masyarakat, meskipun fokusnya adalah orang miskin/tidak berdaya. Orang miskin yang memiliki kesehatan dan pendidikan yang lebih baik dapat berkontribusi secara lebih efektif untuk melakukan aksi kolektif dan disaat yang sama, aksi kolektif ini dapat meningkatkan kesetaraan orang miskin dalam mengakses pendidikan maupun kesehatan (Narayan, 2002).

Pemberdayaan sendiri tidak memiliki model atau metode yang tunggal. Pemberdayaan dalam dimensi personal maupun kolektif akan selalu berbeda-beda satu sama lain bergantung dengan kebutuhan suatu individu atau kelompok masyarakat. Fortunati menyatakan bahwa untuk memulai proses pemberdayaan, suatu individu atau kelompok harus dapat menilai dirinya dan pengetahuannya serta mengetahui apa yang mereka butuhkan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Sehingga, proses pemberdayaan dari suatu anggota kelompok masyarakat dengan anggota kelompok masyarakat yang lain akan berbeda metode.

2. Komunikasi untuk Pemberdayaan/Komunikasi Pemberdayaan

Komunikasi memegang peran yang sangat penting dalam kehidupan berinteraksi dalam lingkungan sosial. Dalam proses atau kegiatan pemberdayaan, komunikasi menjadi salah satu aspek terpenting yang menentukan keberhasilan program tersebut. Komunikasi untuk pemberdayaan memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup seseorang (Dewi, n.d.), memberikan akses informasi kepada orang lain, memberikan orang lain kesempatan untuk mengartikulasikan cerita hidupnya dan segala bentuk tujuan pemberdayaan.

Menurut Mary B. Cassata dalam Mulyana (2010) komunikasi adalah transmisi informasi dengan tujuan mempengaruhi khalayak. Sedangkan menurut Lasswell, untuk menggambarkan komunikasi adalah dengan pertanyaan "Siapa Mengatakan Apa Dengan Saluran Apa Kepada Siapa Dengan Pengaruh Bagaimana?". Berdasarkan definisi Laswell, ada lima unsur komunikasi yang saling berkaitan satu dengan yang lain, unsur-unsur tersebut adalah:

1. **Sumber (*Source*)**

   Seringkali disebut dengan komunikator, pengirim (sender), pembicara (speaker) dan sebagainya. Sumber adalah pihak yang berinisiatif untuk memulai komunikasi. Dalam kegiatan pemberdayaan, pihak yang menjadi sumber atau komunikator adalah fasilitator atau penyuluh. Penyuluh atau fasilitator akan menyampaikan pesan-pesan dengan tujuan untuk menjalankan tujuan pemberdayaan yang sudah dirancang.

2. **Pesan (*Message*)**

   Pesan adalah sebuah informasi yang disampaikan kepada khalayak atau lawan bicara. Dalam kegiatan pemberdayaan yang dilakukan di desa ramah anak Leles, pesan yang dimaksud adalah pesan yang disampaikan oleh penyuluh atau satgas desa ramah anak Leles kepada warga desa dalam bentuk pesan verbal maupun non verbal.

3. **Media (*Medium*)**

Media merujuk pada alat atau wahana yang digunakan oleh komunikator dalam menyampaikan pesan. Media juga dapat berupa komunikasi verbal maupun nonverbal. Kegiatan penyuluhan yang di desa Leles, Satgas desa ramah anak leles menggunakan berbagai media untuk menyampaikan pesan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Adapun media yang dimaksud dapat berupa, poster, penyampaian secara langsung ke rumah-rumah, aplikasi chatting dan lain sebagainya.

4. **Penerima (*Receiver*)**

   Umumnya disebut dengan komunikan. Komunikan berarti pihak atau seseorang yang menerima pesan dari komunikator. Penerima atau komunikan dalam konteks penelitian ini adalah semua masyarakat yang tinggal dan menetap dalam wilayah desa ramah anak Leles.

5. **Efek**

   Adalah suatu kondisi yang terjadi pada anggota masyarakat desa ramah anak Leles setelah menerima pesan yang dikirimkan oleh penyuluh/satgas (komunikator).

Selain kelima unsur komunikasi diatas, umpan balik (*feedback*) adalah salah satu unsur penting dalam komunikasi untuk pemberdayaan. Umpan balik adalah berbagai perilaku yang ditimbulkan oleh anggota masyarakat yang tinggal dan menetap di wilayah desa ramah anak Leles setelah mendapatkan pesan atau penyuluhan dari satgas desa ramah anak Leles.

3. Fasilitator

Penyuluh atau fasilitator memiliki makna sebagai seorang pekerja atau pelaksana program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat. Menurut Lippit (1958) dan Rogers (1983) dalam Mardikanto (2019:139) menyebut penyuluh/fasilitator sebagai “agen perubahan”. Agen perubahan dalam definisi Lippit dan Rogers ini merujuk kepada seseorang yang berasal dari lembaga pemerintah atau lembaga pemberdayaan masyarakat yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan pengaruh ataupun gagasan guna

pengambilan keputusan yang dilakukan oleh masyarakat yang diberdayakan (Mardikanto & Soebiato, 2019).

Di Indonesia sendiri program pemberdayaan masyarakat sudah diatur sedemikian rupa dalam hukum undang-undang yang berlaku. Menurut UU No. 16 tahun 2016, fasilitator dapat dibedakan statusnya dan lembaga tempat ia bekerja:

A. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Adalah fasilitator yang bekerja dibawah naungan negara. Pegawai negeri ini ditetapkan dengan status jabatan fungsional sebagai Penyuluh/Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat PNS yang dimulai sejak tahun 1970'an.

B. Penyuluh/Fasilitator Swasta

Fasilitator ini adalah seseorang yang bekerja untuk sebuah perusahaan swasta dan biasanya berstatus sebagai karyawan perusahaan itu sendiri. Contoh fasilitator jenis ini adalah fasilitator yang berasal dari pihak (Lembaga Swadaya Masyarakat) LSM ataupun swasta.

C. Penyuluh Fasilitator

Berbeda dengan kedua status fasilitator PNS dan Fasilitator swasta, fasilitator yang dimaksud disini adalah seseorang yang dengan kesadaran dirinya melihat masalah yang ada di lingkungan masyarakat untuk kemudian tergerak untuk melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat di lingkungannya. Fasilitator jenis ini biasanya diakui dan diangkat oleh masyarakat penerima manfaat dan memperoleh imbalan dari masyarakat di lingkungannya.

Dalam program pemberdayaan, baik itu pemberdayaan yang dirancang oleh lembaga (LSM) ataupun pemberdayaan yang dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat, misalnya seperti kegiatan pemberdayaan yang terjadi di desa ramah anak Leles, fasilitator memiliki peran yang vital dalam menyukseskan kegiatan tersebut. Adapun peran penyuluh atau fasilitator adalah sebagai berikut:

1) Peran Fasilitator

Sederhananya, peran fasilitator adalah untuk memberikan dan menyampaikan gagasan baru (inovasi) dan atau mempengaruhi penerima manfaat/masyarakat yang diberdayakan dengan menggunakan

cara-cara yang sesuai dengan kondisi di lapangan sampai masyarakat yang diberdayakan dapat dengan sadar mengadopsi dan memilah apa yang sudah disampaikan oleh fasilitator sesuai dengan kebutuhan mereka.

Namun, dalam perkembangannya, peran fasilitator tidak hanya sebatas sebagai penyampai pesan inovasi namun juga harus dapat berperan sebagai jembatan penghubung antar lembaga (baik itu pemerintah maupun swasta) pemberdayaan yang diwakilinya dengan masyarakatnya, baik dalam hal memberikan semangat inovasi atau kebijakan yang diterima oleh masyarakat dan juga menyampaikan umpan balik yang berasal dari masyarakat.

Dengan demikian, fasilitator akan dianggap melakukan kewajibannya dengan baik karena ia tidak hanya sekedar menyampaikan sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat tapi juga mampu berperan sebagai "*agen perubahan*" yang diterima dan dipercaya oleh masyarakat penerima manfaat program pemberdayaan tersebut. Dari penjabaran kewajiban fasilitator tersebut, Lippit dalam Mardikanto (2019) menjabarkan peran fasilitator secara lebih mendalam, yakni:

A. Pengembangan Kebutuhan Untuk Melakukan Perubahan, dalam tahap ini setiap fasilitator harus dapat memainkan perannya pada kegiatan:

1. Merumuskan masalah atau kebutuhan yang benar-benar diperlukan oleh masyarakat.
2. Analisis motivasi dan kemampuan masyarakat untuk melakukan perubahan.
3. Pemilihan objek perubahan yang tepat, yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan diyakini akan bermanfaat di masa depan.
4. Analisis sumberdaya yang tersedia untuk dimanfaatkan dalam program pemberdayaan oleh fasilitator dan masyarakat.
5. Pemilihan peran bantuan yang paling tepat yang akan dilaksanakan oleh fasilitator baik itu berupa bantuan keahlian, dorongan/dukungan untuk melakukan perubahan, pembentukan

perubahan dan kelembagaan serta memperkuat kerjasama masyarakat untuk perubahan yang direncanakan.

B. Menggerakan Masyarakat Melakukan Perubahan

1. Menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat yang akan diberdayakan.
2. Menunjukan kepada masyarakat akan pentingnya perubahan yang harus dilakukan, dengan menunjukan masalah dan kebutuhan yang belum dirasakan oleh masyarakat yang akan diberdayakan.
3. Bersama masyarakat, menentukan prioritas kegiatan, mengatur sumberdaya (mengumpulkan dana, melaksanakan pelatihan, membentuk dan mengambangkan kelembagaan), dan memimpin (inisiatif, mengarahkan dan membimbing) perubahan yang direncanakan.

C. Memantapkan Hubungan dengan Masyarakat yang diberdayakan dengan upaya:

1. Tetap menjaga kerjasama dan hubungan baik dengan masyarakat yang diberdayakan, terutama dengan tokoh masyarakatnya.
2. Bersama tokoh masyarakat memantapkan upaya perubahan dan merancang tahapan perubahan yang akan dilakukan di masa depan.
3. Terus menerus memberikan sumbangan terhadap perubahan profesional melalui kegiatan penelitian dan rumusan konsep perubahan yang akan ditawarkan.

Mardikanto (2019) menyebutkan beberapa peran fasilitator adalah sebagai berikut:

1. Peran Edukasi

Berperan seperti seorang guru untuk mendidik dengan tujuan untuk mengembangkan proses belajar kolektif bersama penerima manfaat. Dan berusaha menanamkan pentingnya belajar sampai liang kubur kepada penerima manfaat.

2. Peran Diseminasi Inovasi

Bertindak untuk menyebarluaskan informasi maupun gagasan dari luar lingkup masyarakat yang diberdayakan dan sebaliknya.

3. **Peran Fasilitasi**

   Memberikan kemudahan dan atau menunjukan sumber-sumber kemudahan yang diperlukan oleh masyarakat dalam melaksanakan program pemberdayaan.

4. **Peran Konsultasi**

   Berperan untuk meberikan nasihat dan alternatif guna memecahkan masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat penerima manfaat.

5. **Peran Advokasi**

   Memberikan bantuan yang kaitannya pengambilan keputusan kebijakan yang berpihak pada masyarakat yang diberdayakan.

6. **Peran Supervisi**

   Sebagai penyedia pelaksanaan kegiatan advokasi dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan.

7. **Peran Pemantauan dan Evaluasi**

   Berperan untuk mengamati, mengukur dan menilai proses dan hasil kegiatan pemberdayaan yang sedang ataupun sudah dilakukan.

   Dari peran-peran yang dijabarkan oleh Mardikanto, peneliti menemukan kekurangan pada gagasannya, yakni Mardikanto belum menjabarkan peran fasilitator untuk memastikan masyarakat penerima manfaat berpartisipasi secara aktif dan bergerak sesuai keinginan mereka dengan tetap berpedoman kepada program yang sudah dirumuskan. Oleh karena itu peneliti menggunakan gagasan milik Melkote dan Steeves. Melkote dan Steeves (2008) menggunakan istilah DSC (*Development Support Communication*) dimana di dalam DSC Melkotee dan Steeves mengkategorikan fasilitataor, kolaborator, aktivis, advokat untuk individu maupun kelompok dll sebagai peran agen perubahan (Melkote & Steeves, 2008).

   DSC sendiri menurut Melkote dan Steeves memiliki tanggung jawab untuk menjembatani kesenjangan komunikasi antara spesialis teknis dengan kemampuan yang ekspert di bidangnya (seperti kesahatan, pertanian dan literasi) dan potensial user

yang membutuhkan pengetahuan dan penerapan ilmu yang spesifik untuk meningkatan performa mereka, produktivitas mereka ataupun untuk meningkatkan kesehatan mereka.

2) Kualifikasi Fasilitator

Untuk menjamin kegiatan pemberdayaan yang akan dilaksanakan berjalan dengan baik, seorang fasilitator harus memiliki beberapa kriteria yang dibutuhkan dalam melaksanakan program tersebut. Kriteria ini harus dimiliki oleh seorang fasilitator mengingat kewajiban dan tanggung jawab seorang fasilitator yang tidak mudah. Menurut Berlo (1960) dalam Mardikanto (2019) ada 4 kualifikasi yang harus dimiliki oleh seorang fasilitator, diantaranya:

1) Kemampuan Berkomunikasi

Dalam melaksanakan program pemberdayaan, seorang fasilitator tidak hanya diwajibkan untuk memiliki kemampuan memilih gagasan baru, menentukan media komunikasi yang tepat dan efektif, menentukan teknik pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan kondisi masyarakat tersebut, memilih alat peraga yang akan digunakan dalam kegiatan, namun lebih penting lagi, seorang fasilitator harus memiliki kemampuan untuk berempati dan berinteraksi dengan masyarakat yang akan diberdayakan.

2) Sikap Penyuluh/Fasilitator

a. Sepenuh hati bangga dengan profesinya sebagai penyuluh, dan menyadari kehadirannya dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan memang dibutuhkan oleh masyarakat penerima manfaat.
b. Meyakini bahwa ide inovasi yang disampaikan sudah terbukti, memiliki peluang berhasil jika dilaksanakan dalam masyarakat yang diberdayakan, memberikan keuntungan dan tidak bertentangan dengan nilai moral dan sosial yang berlaku, serta seorang fasilitator harus dapat meyakini bahwa inovasi yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

c. Menyukai dan mencintai masyarakat yang diberdayakan, selalu siap memberikan bantuan dan melaksanakan kegiatan demi sebuah perubahan di masyarakat tersebut.

3) Kemampuan Pengetahuan Penyuluh/Fasilitator tentang:

a. Isi, fungsi, manfaat, dan nilai-nilai yang terkandung dalam inovasi yang disampaikan dan akan diterapkan, baik dari sudut pandangan praktis maupun kontekstual.
b. Latar belakang masyarakat yang akan diberdayakan, baik itu perilaku masyarakat, nilai dan moral yang berlaku,keadaan alam, kebutuhan yang diperlukan masyarakat
c. Segala hal yang menyebabkan masyarakat suka atau tidak menginginkan terjadinya perubahan maupun segala sesuatu yang menjadi sebab masyarakat dalam menerima dan menerapkan inovasi dalam jangka waktu cepat ataupun lambat.

4) Karakteristik Sosial-Budaya Penyuluh

Dalam praktek dilapangan, standar kualifikasi seorang fasilitator tidak cukup dengan persyaratan keterampilan, sikap dan pengetahuan saja, tetapi keadaan latar belakang (suku, bahasa, agama, kebiasaan) seorang fasilitator juga seringkali menentukan keberhasilan program yang dilaksanakan.

Oleh sebab itu seorang fasilitator yang sebaiknya memiliki latar belakang yang sesuai ataupun hampir sama dengan latar belakang masyarakat yang akan diberdayakan. Bahkan dalam beberapa kasus di lapangan, seorang fasilitator adalah seseorang yang berasal dari dalam lingkungan masyarakat yang akan menerima manfaat.

4. Desa/Lingkungan Ramah Anak

Melindungi hak anak adalah menjadi kewajiban semua orang dan menjadi tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan hukum untuk melindungi anak-anak. UNICEF, menyebutkan elemen penting dalam melindungi hak anak adalah perkembangan dan peningkatkan kebijakan yang harus terus menerus dikontrol demi melindungi hak anak.

Selain menjadi fokus setiap negara dalam melindungi hak anak, lembaga internasional seperti UNICEF juga ikut andil dalam menjaga hak anak. Misalnya mereka memasukan perlindungan anak dalam salah satu program SDGs (*Sustainable Development Goals*/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan). Mengingat anak-anak adalah salah satu kelompok rentan di dunia, maka perkembangan perlindungan mereka menjadi bagian dari program SDGs. Adapun beberapa indikator SDGs yang fokus dengan anak-anak adalah:

a. **Sasaran 4.1**: Memastikan semua anak laki-laki dan perempuan dapat menyelesaikan pendidikan dasar dan tinggi secara gratis, setara dan bermutu, yang menuju kepada hasil-hasil pembelajaran yang relevan dan efektif.
b. **Sasaran 4.A**: Membangun dan memperbaiki fasilitas pendidikan yang sensitif terhadap anak, penyandang disabilitas dan gender, dan memberikan lingkungan belajar yang aman, anti-kekerasan, inklusif dan efektif untuk semua.
c. **Sasaran 5.2**: Menghapuskan semua bentuk kekerasan terhadap semua perempuan dan anak perempuan di ruang umum dan pribadi, termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.
d. **Sasaran 5.3**: Menghapuskan semua praktek membahayakan, seperti perkawinan anak dan pernikahan paksa
e. **Sasaran 16.2**: Mengakhiri pelecehan, eksploitasi, perdagangan manusia dan semua bentuk kekerasan dan penganiayaan terhadap anak-anak
f. **Sasaran 16.9**: Memberikan identitas legal, termasuk akta kelahiran, untuk semua (UNICEF, 2020).

Merujuk pada draft RW 18 ramah anak Leles, mereka membuat peraturan tertulis tentang desa ramah anak yang berdasar pada: Pancasila dan UUD 1945, UU Nomor 35 Tahun 2014, Peraturan Menteri Nomor 12 tahun 2011 dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 12 tahun 2018. Desa/lingkungan ramah anak yang dimaksud dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 12 dalam bab 1 pasal 1 butir 1 dan 2

"(1). Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA, adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

(2). Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek- aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak."

Menciptakan lingkungan yang ramah anak adalah dengan memenuhi hak anak dan melindungi anak dari berbagai ancaman. Dalam Peraturan Bupati Sleman bab 3 pasal 8 ayat 1 terdapat setidaknya 5 hak anak yang harus dijaga dan dipenuhi, hak tersebut meliputi (1). Hak sipil dan kebebasan, (b). Lingkungan dan pengasuhan alternatif, (c). Kesehatan dan kesejahteraan, (d). pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan (e). Perlindungan khusus (Pemerintah Kabupaten Sleman, 2018).

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini dirancang dengan menggunakan pendekatan dan jenis penelitian kualitatif, penelitian ini adalah metode penelitian dengan datanya berupa kata-kata dan menggunakan pertanyaan terbuka untuk memperoleh data (Creswell, 2017). Jenis desain penelitian dipilih karena tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan memahami realita yang terjadi dalam kegiatan pemberdayaan yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat di RW 18 Leles Ramah Anak, Condong Catur melalui program kawasan ramah anak serta membandingkan perubahan yang terjadi karena pandemi Covid-19.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ini akan berlangsung pada November 2020 sampai dengan Juli 2021 dengan lokasi penelitian di desa Leles RW 18, Condong Catur, Sleman, Yogyakarta.

3. Narasumber

Narasumber penelitian ini adalah Satgas PPA RW 18 Leles Ramah Anak yang tak lain adalah warga sekitar dan perangkat desa. Merujuk pada kriteria yang dibutuhkan, seperti pengetahuan dan kemampuan dalam memberikan informasi RW 18 Leles Ramah Anak, narasumber penelitian ini adalah Sumarni, fasilitator, Indrayani, sekretaris desa ramah anak Leles dan Paijan, ketua RW 18 desa ramah anak Leles dan masyarakat lainnya. Mereka peneliti pilih karena sudah berkontribusi sejak awal program RW 18 Leles Ramah Anak berjalan dan kemampuan mereka dalam memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitan. Selain itu data dari masyarakat akan digunakan untuk memperkaya data.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dari penelitian ini dibagi menjadi 2 sumber, yakni:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang langsung didapatkan oleh peneliti atau pengumpul tanpa perantara (Sugiyono, 2015). Adapun teknik pengumpulan data untuk sumber data primer pada penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi partisipatif. Peneliti menggunakan observasi jenis ini karena peneliti akan masuk dan terlibat ke dalam kegiatan pemberdayaan yang berlangsung di desa ramah anak Leles dengan tujuan untuk dapat melihat realita yang terjadi dengan lebih seksama.

2. Wawancara

Penelitian ini bertujuan untuk melihat realita serta menganalisisnya kedalam bentuk kalimat deskriptif. Wawancara digunakan sebagai salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian ini karena wawancara memungkinkan peneliti menemukan realita yang terjadi dilapangan secara lebih mendetail dari narasumber yang dianggap memiliki pengalaman yang sesuai dengan kegiatan

pemberdayaan di desa ramah anak Leles. Penelitian ini akan menggunakan bentuk wawancara semi-terstruktur agar dalam pelaksanaan tanya jawab dapat lebih bebas dan menyesuaikan dengan temuan serta agar peneliti dapat menemukan permasalahan dan ide dari narasumber dengan lebih terbuka. Narasumber dalam penelitian ini adalah Indrayani, sekretaris desa ramah anak Leles dan Paijan ketua RW 18 desa Leles serta orang tua anak yang tinggal di desa ramah anak Leles.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data yang berasal dari penelitian terdahulu, berita, artikel dan jurnal terkait desa ramah anak Leles, Condong Catur.

5. Teknik Analisis Data

analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh baik itu dari sumber primer maupun sekunder dengan cara mengorganisasikan ke dalam kategori, menjabarkannya, menyusun ke dalam pola, melakukan sintesa, memilih mana yang penting dan tidak dan menarik kesimpulan dari kegiatan analisis agar lebih mudah untuk dipahami.

Dalam penelitian kualitatif, proses analisis sudah dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, saat di lapangan dan setelah selesai di lapangan.

a. Analisis Sebelum di Lapangan

Sebelum memasuki lapangan, peneliti melakukan analisis dan studi terhadap berbagai naskah-naskah penelitian dan berbagai bentuk data yang tersebar baik dalam bentuk fisik maupun elektronik. Tujuan peneliti melakukan analisis sebelum masuk kelapangan adalah untuk menemukan pembaruan penelitian dan menentukan fokus masalah yang akan diteliti.

b. Analisis Data di lapangan Model Miles dan Huberman

Analisis data jenis ini peneliti pilih karena peneliti menganggap analisis jenis ini adalah analisis yang paling sesuai jika diterapkan dalam penelitian ini. Analisis jenis ini menuntut peneliti untuk

menemukan data sebanyak mungkin sesuai dengan kebutuhan penelitian. Jika data yang dibutuhkan masih kurang, peneliti akan kembali lagi ke lapangan untuk mencari data yang kurang sampai data yang didapatkan dirasa cukup. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2015) menyatakan bahwa kegiatan dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus-menerus sampai selesai. Ada 3 tahapan yang harus dilakukan dalam model ini, yakni:

1. **Reduksi Data**

   Reduksi data adalah tahapan merangkum, mengkategorikan, memilih data penting yang didapatkan di lapangan. Dengan begini, peneliti akan lebih mudah dalam membaca data dan menentukan pertanyaan selanjutnya jika masih ada data yang kurang.

2. **Penyajian Data**

   Setelah tahap reduksi selesai dan data yang didapatkan sudah mencukupi kebutuhan penelitian, tahap selanjutnya adalah mendisplay atau menyajikan data. Tujuan penyajian data adalah untuk mempermudah memahami apa yang terjadi di lapangan dan merencanakan kegiatan selanjutnya. Dalam penelitian ini penyajian data akan disajikan dalam bentuk teks deskriptif maupun ilustrasi untuk mempermudah pemahaman.

3. ***Conclusion Drawing/Verification***

   Tahapan terakhir dari analisis model Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif umumnya adalah temuan-temuan baru. Temuan yang dimaksud dapat berupa deskripsi maupun gambaran suatu objek yang sebelumnya masih samar dan diperjelas setelah penelitian selesai dilakukan.

6. Jadwal Penelitian

Rencana jadwal penelitian adalah terpapar dalam tabel berikut:

No.	Bulan Ke-	Kegiatan	Keterangan
1.	1-2	Menyusun Proposal	Melakukan analisis data terdahulu, menyusun dan merumuskan masalah, menyusun proposal (Bab 1)
2.	2-3	Kerja Lapangan	Melakukan observasi dan wawancara
3.	3-4	Olah Data	Mengolah data yang ditemukan di lapangan kemudian disajikan ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk dimengerti
4.	4	Laporan	Menyusun laporan sesuai dengan temuan dan olah data yang sudah dilakukan
5.	5	Ujian	Menguji penelitian yang telah dilakukan.

BAB II
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. RW 18 Leles Ramah Anak

Sebagai salah satu dari sekian kawasan ramah anak yang berada di jogja, RW 18 Leles menjadi salah satu RW ramah anak yang konsisten dalam menjaga program kawasan ramah anak tetap berjalan sejak Maret 2015. RW 18 Ramah Anak Leles sudah mendapat berbagai kunjungan dari berbagai kalangan, mulai dari lembaga pemerintahan maupun kaum akademik untuk kepentingan penelitian maupun kepentingannya masing-masing. Secara administratif, RW 18 leles berada di bawah otoritas pemerintahan Ngringin, Condongcatur, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara geografis, RW 18 Leles terletak tepat berada di utara rumah sakit JIH dan dekat dengan berbagai akses di daerah urban seperti pusat perbelanjaan/mal, universitas, dan terminal. RW 18 Leles kemudian terbagi lagi menjadi dua RT yakni RT 01 dan RT 02.

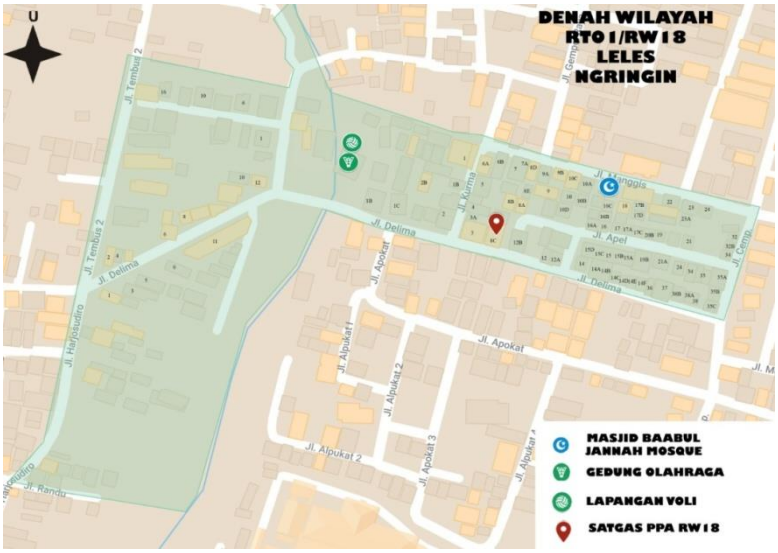

Gambar 2.1
Denah Wilayah RT 01/RW18, Leles
Sumber: Edrick, KKN Mandiri Sanata Dharma

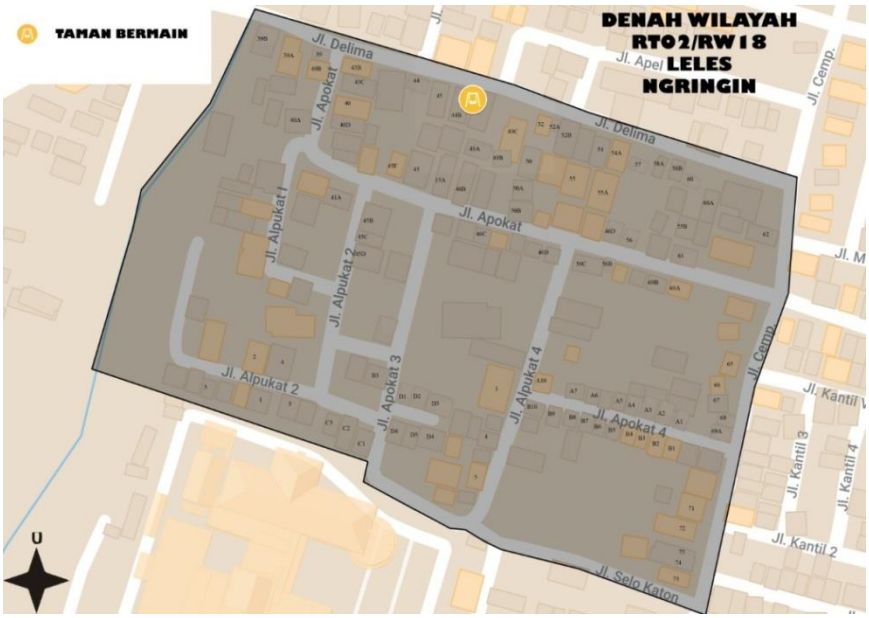

Gambar 2.2
Denah Wilayah RT 02/RW 18, Leles
Sumber: Edrick, KKN Mandiri Sanata Dharma

Pemerintah Kabupaten Sleman membuat berbagai langkah untuk menekan angka kejahatan mengingat daerah urban cenderung dekat rentan dengan berbagai ancaman untuk anak-anak seperti eksploitasi anak, kekerasan seksual, terpaan teknologi dan lain sebagainya. Salah satu bentuk nyata tindakan preventif pemerintah Kabupaten Sleman dengan mengadakan simulasi PKDRT pada tahun 2014 yang salah satu pesertanya adalah RW 18 Leles. Menurut penuturan Paijan selaku ketua RW 18 Leles, simulasi PKDRT (Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) adalah sebuah kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah guna mengurangi dan mengendalikan angka kekerasan dalam rumah tangga (Paijan, Ketua RW dan penanggung jawab, Wawancara 15 Januari 2021).

Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak kabupaten Sleman kemudian memberikan pendampingan kepada RW 18 Leles sebagai bentuk apresisasi atas kinerja dari masyarakat Leles yang berperan aktif dalam program simulasi PKDRT. Dari pendampingan tersebut, masyarakat Leles membentuk Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak RW 18 Leles. Satgas PPA RW 18 Leles menjalankan aktivitas di wilayah mereka yang kemudian dikenal dengan RW 18 Leles Ramah Anak. Adapun dasar hukum yang digunakan yang digunakan oleh Satgas PPA RW 18 Leles adalah:

1. Pancasila dan UUD 1945
2. UU Nomor 35 tahun 2014, Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Anak
3. Peraturan Menteri Nomor 12 tahun 2011, Indikator Kabupaten Layak Anak - atau yang kemudian disingkat KLA.
4. Peraturan Bupati Sleman Nomor 12 tahun 2018, Tentang Kabupaten Layak Anak.

RW 18 Leles Ramah Anak menjalankan berbagai aktivitasnya berdasarkan semangat untuk memenuhi hak dasar anak, yakni: hak hidup, hak tumbuh kembang, berpartisipasi, tumbuh kembang dan diskriminasi. Lebih lanjut, mereka memiliki visi untuk merangkul warga dan masyarakat dalam mengasuh dan mendidik anak tanpa kekerasan, misi mendukung terwujudnya desa Condongcatur Ramah Anak menuju Kabupaten Sleman Layak Anak dan tujuan untuk menjamin dan melindungi terpenuhinya hak anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa adanya kekerasan serta sasaran mereka dalam program ini adalah perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Seiring dengan berjalannya waktu, Satgas PPA kemudian berinovasi untuk mengambangkan program mereka, diantaranya melakukan pembatasan penggunaan gawai pada anak-anak, melarang anak yang belum memiliki SIM untuk mengendarai kendaraan bermotor, melakukan kampanye kawasan anti narkoba, larangan merokok dan minuman keras, dan kampanye klitih dan lain-lain (Satgas PPA RW 18 Leles, 2015)

Satgas PPA RW 18 Leles memfasilitasi masyarakat yang tinggal dan menetap di RW 18 Leles dengan sarana dan prasarana yang menunjang keberhasilan program Ramah Anak yang sudah dirumuskan. Fasilitas yang dialokasikan menjadi salah satu instrumen penting dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari di wilayah Ramah Anak ini. beberapa fasilitas fisik yang nampak di RW 18 Leles ramah ini adalah penyediaan taman bermain, lapangan voli, pos ronda yang juga berfungsi sebagai taman baca, berbagai poster dan mural yang memvisualkan edukasi tentang kekerasan seksual pada anak, pembatasan kendaraan di sepanjang jalan delima pada pukul 15:30-17:30 untuk kenyamanan anak-anak dalam bermain, dan lain sebagainya.

Gambar 2.3
Kegiatan les Bahasa Inggris di Taman Bermain
Sumber: Dokumentasi Peneliti

Selain fasilitas fisik, Satgas PPA RW 18 Leles Ramah Anak juga menyediakan berbagai kegiatan agar anak-anak mendapatkan haknya, misalnya selalu ada orang tua maupun Satgas yang mengawasi anak ketika bermain di taman bermain, menyediakan les bahasa Inggris, les menari, les komputer dan TPA. Satgas PPA RW 18 Leles memegang peran peran penting dalam menjalankan berbagai kegiatan yang terjadi dalam kawasan ramah anak tersebut. Dalam hal ini Satgas PPA RW 18 Leles berperan sebagai fasilitator yang bertanggung jawab untuk menjalankan dan melakukan pengawasan kegiatan.

B. Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak RW 18

Berdasarkan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) Satgas PPA RW 18 Leles adalah sebuah organisasi yang terbentuk pada 1 desember 2015 di Leles RW 18, Ngringin, Condongcatur, Depok, Sleman. Satgas PPA RW 18 Leles sendiri adalah organisasi non profit yang terbentuk karena kepedulian dengan anak dan perempuan yang berkedudukan di Condongcatur. Organisasi ini yang kemudian menjadi motor penggerak dari kegiatan yang berlangsung di RW 18 Leles Ramah Anak.

Tujuan dari organisasi ini terlampir dalam draft AD/ART adalah untuk menjadi sarana setiap anggotanya memperkuat jaringan dalam mencegah dan

menangani kekerasan pada perempuan maupun anak-anak, sebagai inspirasi untuk setiap anggota dalam berkarya di bidang terkait untuk wilayah sekitar, menjadi motor pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak-anak, sarana komunikasi untuk informasi terkait dan menyediakan penyuluhan ataupun event kegiatan yang mengkampanyekan anti kekerasan pada wanita dan anak-anak. Satgas PPA RW 18 Leles sendiri beranggotakan tidak kurang dari 30 anggota yang berasal dari wilayah RW 18 yang berasal dari berbagai bidang, mulai dari guru, ibu-ibu PKK, kader posyandu, karang taruna dan lain sebagainya. Setiap anggota ini kemudian yang menjalankan kegiatan di RW ramah anak ini sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Tabel 2.1
Anggota Satgas PPA RW 18 Leles

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak
1	Reno Candra Sangaji, SIP	Kepala Desa	Pembina
2	Muji Purwanta, A.md.	Dukuh Ngringin	Pengarah
3	Aiptu Sudaryo	Polsek Depok	Pelindung
4	Paijan Trisno Harjono	Ketua RW 18	Penanggung Jawab
5	Suyanto	Tokoh Masyarakat	Ketua
6	Murgianta, S.E	Tokoh Masyarakat	Wakil Ketua
7	Indrayani	Sekretaris PKK RW	Sekretaris
8	Harganingsih	Kader	Bendahara
9	Suwardi	Ketua RT 02	Koordinator Divisi Penanganan Kekerasan pada Perempuan dan Anak
10	Samuel Rudi	Tokoh Masyarakat	Koordinator Divisi Pencegahan Kekerasan pada Perempuan dan Anak
11	Edy Wahyudi, S.E	Tokoh Masyarakat	Koordinator Divisi Humas dan Jaringan Kemitraan

Satgas PPA RW 18 Leles bertanggung jawab dalam mencegah dan melindungi perempuan dan anak dari kekerasan, kemudian Satgas PPA RW 18 Leles merumuskan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang meliputi: Penyadaran, Pelaporan dan penanganan dan pemantauan. SOP ini dibuat untuk memperjelas langkah dan proses yang harus diambil oleh Satgas ketika menghadapi kasus kekerasan pada perempuan dan anak dan memperjelas peran dan tugas para pemangku kepentingan dalam proses penanganan kasus terkait. Berikut adalah penjabaran SOP pada penanganan kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak:

1. Pihak yang melihat, mendengar, mencurigai ataupun mendapatkan laporan kekerasan wajib melaporkan kepada Satgas PPA
2. Laporan diterima oleh Divisi Penanganan dengan mengisi formulir
3. Identifikasi keselamatan untuk kemudian menentukan langkah selanjutnya
4. Satgas PPA kemudian mengidentifikasi kasus berdasarkan:
    a. Jika ringan sampai sedang, menggunakan jalur mediasi dengan pemangku kepentingan.
    b. Jika berat dan mengalami masalah kesehatan, segera dirujuk ke Puskesmas/Rumah Sakit terdekat.
    c. Jika berat dan kasusnya non medis, Satgas PPA kemudian meneruskan kepada pihak yang terkait dengan kasus (Polsek Depok, FPK2PA Depok, UPT P2TP2A Sleman, LSM)
    d. Kemudian melakukan pemantauan terhadap korban.

Jika merujuk pada AD/ART Satgas PPA RW 18 Leles beranggotakan 39 anggota, namun dokumen ini adalah dokumen yang disahkan pada 1 Desember 2015, sehingga banyak perubahan yang terjadi dalam keanggotaan Satgas PPA RW 18 Leles. Misalnya, Suyanto yang memutuskan untuk mengundurkan diri pada pertemuan yang dilakukan bulan November 2020 lalu. Dalam hasil wawancara yang dilakukan dengan ketua RW, Paijan menuturkan untuk keanggotaan ini tidak terbatas dan selalu terbuka untuk setiap warga Leles yang ingin bergabung dengan Satgas PPA RW 18 Leles (Paijan, Ketua RW dan penanggung jawab, Wawancara 15 Januari 2021).

Gambar 2.4
Pertemuan Satgas PPA RW 18 Leles
Sumber: Dokumentasi Peneliti

Satgas PPA RW 18 Leles memiliki agenda pertemuan rutin yang diselenggarakan setiap sebulan sekali guna membahas permasalahan yang ada di RW ramah anak serta evaluasi untuk mempertahankan program yang sudah terlaksana. Hal ini membuat Satgas PPA RW 18 Leles tetap konsisten dalam menjaga *output* mereka yang sudah berjalan sejak tahun 2015. Namun pertemuan rutin ini ditiadakan selama pandemi, Satgas PPA RW 18 Leles juga tidak menjalankan pertemuan daring, hanya sebatas persebaran informasi melalui grup aplikasi Whatsapp.

BAB III
TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan

Penelitian ini dirancang dengan metode kualitatif yang membutuhkan data deskriptif, yakni data yang berupa kalimat, tutur maupun teks yang peneliti dapatkan baik melalui analisis dokumen dan hasil kerja lapangan yang peneliti dapatkan dengan terjun langsung selama 2 bulan di RW 18 Leles, Depok, Condongcatur. Peneliti mengumpulkan data dengan metode wawancara dan observasi langsung dari lapangan serta mengambil data dari penelitian maupun dokumen terdahulu. Peneliti kemudian memilah data yang didapatkan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pada bab ini peneliti akan menjabarkan dan membahas temuan peneliti selama kerja lapangan.

1. Pemberdayaan RW 18 Leles Ramah Anak

Pemberdayaan dalam bahasa Inggris adalah *empowerment*, istilah ini dikontraskan dengan *power* dimana makna *power* adalah kebalikan dari *empowerment* atau orang-orang yang perlu diberdayakan. Orang miskin atau orang yang tidak memiliki daya perlu diberikan daya/diberdayakan agar mereka dapat memiliki dan mengakses aset dan kapabilitas yang seharusnya mereka miliki. Pemberdayaan yang berlangsung di RW 18 Leles adalah pemberdayaan yang dilakukan secara kolektif yang digagas oleh fasilitator yang berasal dari dalam lingkup masyarakat RW 18 Leles.

Pemberdayaan kolektif terjadi dalam lingkup suatu komunitas atau masyarakat yang bergerak secara bersama aksi perubahan sosial yang menguntungkan bagi mereka. Komponen dari pemberdayaan kolektif adalah kepemilikan bersama, keterlibatan dalam komunitas, kontrol atas organisasi dalam komunitas, dan pembangunan komunitas. Pemberdayaan dalam penelitian ini dilaksanakan oleh anggota masyarakat RW 18 Leles yang berlokasi di RW 18 Leles, Depok, Condongcatur. Berangkat dari keprihatinan masyarakat terhadap dampak negatif dari arus teknologi, masyarakat kemudian bergerak bersama untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan untuk melindungi hak anak dan pendampingan atas orang tua (Satgas PPA Leles).

Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh masyarakat Leles dikenal oleh masyarakat secara luas dengan Kampung Ramah Anak (KRA).

Pemberdayaan ini sudah berlangsung sejak 2015 dengan penyelenggara/fasilitornya yang dikenal dengan organisasi Satgas PPA RW 18 Leles/Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak. Kegiatan ini berlangsung berdasarkan dengan 5 indikator yang sudah ditetapkan dalam berbagai peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Indikator ini menjadi standar kegiatan dalam proses pemberdayaan di RW 18 Leles. Kegiatan pemberdayaan di RW 18 sendiri bertujuan agar masyarakat mendapat akses atas pengetahuan dalam mengasuh dan membesarkan anak-anak, melindungi hak perempuan dan anak, memberikan ruang anak-anak dalam berekspresi, pemenuhan kesehatan untuk ibu dan anak, dan lain sebagainya. RW 18 Leles sendiri menggunakan indikator kabupaten layak anak yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sleman No: 12 tahun 2018, tentang kabupaten layak anak. Adapun indikator tersebut adalah:

A. Hak Sipil dan Kebebasan

Pemenuhan hak anak yang paling dasar menjadi indikator pertama dalam Peraturan Bupati Sleman No: 12 tahun 2018. Hak dasar yang terpenuhi ini kemudian menjadi pondasi awal untuk masyarakat 18 Leles dapat mengartikulasikan cerita mereka sendiri. Hak dasar yang dibahas dalam indikator ini meliputi hak identitas, perlindungan identitas, hak berekspresi, hak informasi layak anak dan lain sebagainya. Hak identitas sendiri sesederhana tanggung jawab orang tua memberikan nama kepada anak dan mendaftarkan anak ke dalam dokumen resmi negara/akta.

Merujuk pada dokumen daftar nama anak di RW 18 Leles yang disahkan pada tahun 2019 oleh Suyanto, sebanyak 196 anak yang terdaftar sudah memiliki nama, tempat dan tanggal lahir yang jelas, agama serta alamat tinggal.

> "...di rw 18 tidak ada anak yang putus sekolah tidak ada anak yang tidak punya akte". (Paijan, Ketua RW dan penanggung jawab, Wawancara 15 Januari 2021).

Pemenuhan hak atas nama akan mempengaruhi keterlibatan anak sebagai individu dalam lingkungan sosial mereka. Robbins,

Chatterjee, & Canda (dalam Mardikanto, 2019) mengemukakan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses individu maupun kelompok untuk mendapatkan kekuatan, akses terhadap sumber daya dan kontrol atas hidup mereka sendiri.

Hak berekspresi dan berkumpul juga menjadi fokus dalam hak dasar anak. Dalam hal untuk berekspresi dan berkumpul, RW 18 Leles ramah anak menyediakan berbagai fasilitas guna menunjang hak-hak ini terpenuhi tanpa adanya pembatasan dari berbagai pihak.

> "...cuma anak-anak bermain seperti biasa yaa kita awasi ya kita bermain biasa yaa bersosialisasi dengan teman, terus belajar berbagi dengan teman, misal ada mainan ya enggak berebutan, bisa bergantian atau apa yaaa… anaknya diajari biar bisa berkomunikasi dengan temen, biasa kreativitas sendiri disitu di arena bermain tidak kita kamu harus ini ya, tidak. Monggo terserah anak-anak kita mau seperti apa. Ya bermain tapi kita tungguin kita arahkan gitu…". (Indrayani, Sekretaris, Wawancara 16 Januari 2021).

Hal ini juga diperkuat dengan hasil observasi yang nampak anak-anak bebas bermain dan memilih teman bermainnya sendiri dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlangsung, misalnya mereka tetap bermain dengan menggunakan masker dan menjaga jarak ketika kegiatan les komputer, bahasa inggris maupun kegiatan lainnya. Selama masa pandemi ini ada banyak perubahan yang terjadi, misalnya kegiatan yang awalnya rutin dilakukan terpaksa ditunda sementara menunggu keputusan pemerintah. Selain itu, jalan Delima yang awalnya ditutup pada jam bermain dan belajar anak, kini kembali dibuka dan kendaraan bermotor bebas berkendara di jalan Delima.

Gambar 3.1
Anak-anak Bermain di Taman Bermain
Sumber: Dokumentasi Peneliti

Akses terhadap informasi menjadi salah satu fokus dalam pemberdayaan. Keterbatasan individu dalam mengakses informasi akan mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Informasi layak anak dan kelompok anak menjadi indikator yang harus dipenuhi guna mendukung terwujudnya wilayah ramah anak. Di RW 18 Leles sendiri belum ada forum anak, namun disana ada semacam karang taruna atau kepemudaan.

> "Kalau forum anak belum ada, tapi yang ada kepemudaan, jadi yang ada forum anak itu di tingkat kelurahan dan tingkat kecamatan, kalau di kampung adanya pemuda, jadi istilahnya pemuda-pemudi Leles yang namanya OPEL, organisasi pemuda-pemudi Leles". (Paijan, Ketua RW dan penanggung jawab, Wawancara 15 Januari 2021).

B. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Sebagai salah satu kelompok rentan, anak yang berusia di bawah 17 tahun masih sangat membutuhkan pengasuhan yang mendukung tumbuh kembangnya baik dari lingkungan keluarga maupun lingkungan dalam masyarakatnya. Dalam klaster ini membahas tanggung jawab orang tua, anak yang terpisah dari orang tua sampai eksploitasi anak. Beberapa indikator yang dibahas dalam klaster ini adalah persentase pernikahan pada usia anak-anak. Lebih lanjut Paijan sebagai penanggung jawab RW 18 Leles ramah anak menuturkan

> “Di rw ramah anak, di rw 18 belum terjadi pernikahan usia anak, maksudnya gitu. ------- karena gini kalau ada desas-desus, kami akan menelusuri, kok katanya anaknya mau dinikahkan itu belum lulus sekolah, katakanlah seperti itu, itu saya tanyakan sebabnya, ooo seandainya sebabnya dia kurang mampu untuk biaya yaa kita harus kembalikan gimana caranya biar anak itu selesai sekolah. Yook kita ciptakan atau carikan pekerjaan untuk dia. Tapi alhamdulilah di RW18 ramah anak belum ada perkawinan di usia anak.” (Paijan, Ketua RW dan penanggung jawab, Wawancara 15 Januari 2021).

Negara sendiri sudah mengatur batas usia perkawinan pada UU nomor 16 tahun 2019 bahwa batas perkawinan di Indonesia ketika pria dan wanita sudah berusia minimal 19 tahun. Pertimbangan batas minimal perkawinan anak tak lepas dari dampak yang ditimbulkan dari perkawinan anak dibawah batas minimal dapat menimbulkan dampak negatif dan mengganggu tumbuh kembang anak. Selain itu, pernikahan anak akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti perlindungan atas kekerasan dan diskriminasi, hak kesehatan, hak pendidikan, hak sosial dan hak sipil anak.

Oleh karena itu, dalam membangun Kawasan Ramah Anak, Satgas PPA RW 18 Leles bertanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya pernikahan di usia anak-anak, yakni dibawah 18 tahun. Hal ini sudah dilakukan oleh Satgas PPA RW 18 Leles dengan bergerak aktif dalam menindak desas-desus pernikahan usia anak-anak. Paijan menjelaskan, ketika ada desas-desus tentang pernikahan anak, Satgas PPA RW 18 Leles akan menelusuri sebab pernikahan tersebut dan berusaha mengembalikan anak kepada hak-hak dasarnya seperti hak pendidikan, hak kesehatan, hak sosial, hak sipil anak dan lain sebagainya. Lebih lanjut, Paijan juga menekankan tidak ada pernikahan usia anak di RW 18 Leles.

C. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Akses atas kesehatan dan kesejahteraan menjadi bagian yang sering diwacanakan dalam program pemberdayaan. Masyarakat miskin yang tidak memiliki daya sering dikaitkan dengan keterbatasan mereka dalam mengakses kesehatan dan mengakses sumber daya guna memenuhi kehidupan mereka sehari-hari. Satgas PPA RW 18 Leles sebagai bagian dari fasilitator dalam bidang kesehatan akan berusaha membantu masyarakat RW 18 Leles sebagai masyarakat penerima manfaat untuk mendapatkan akses kesehatan.

Pada indikator kesehatan dasar dan kesejahteraan banyak membahas tentang kesehatan dasar ibu dan anak (balita), pemenuhan hak-hak mereka dalam lingkungan dan dukungan dari lingkungan sosial demi kesejahteraan mereka. Aktivitas dalam pemenuhan indikator kesehatan dasar dan kesejahteraan berlangsung sejak Ibu mengandung anak mereka dan hak akan udara bersih dan air bersih.

Angka kematian bayi menjadi poin pertama yang masuk dalam indikator ini, kemudian prevalensi kekurangan gizi, ibu yang memberikan ASI untuk anak-anaknya, ruang ASI, imunisasi dasar dan lembaga yang memberikan informasi kesehatan reproduksi maupun mental. Klaster ini dilaksanakan oleh ibu-ibu Satgas yang juga bertugas sebagai kader Posyandu.

> “kalau itu memang kami awasi semua mas imunisasinya, memang kita mulai dari diketahui ibu hamil itu ada pendataan. Pendataan kita itu dari ibu hamil, mulai dari hamil bulan keberapa, setiap bulan ibu hamil harus datang ke posyandu, kita timbang juga, kita lila, lila itu ukur lengannya, itu seperti itu nanti terus pas hamil pun kita tanya sudah imunisasi obatnya apa saja? Itu juga kita tanya walaupun yang hamil sudah ke klinik atau ke bidan, tapi kalau nanti dateng ke posyandu yaa tetep kita tanya-tanya. Kita harus pastikan juga setelah anak lahir itu harus dapat hak imunisasi dasar, yang pertama bentuknya itu kan BSG, nanti ada hepatitis, ada DPT, DPT 1 2 3, pokoknya anak sebelum usia 2 tahun tu harus sudah terpenuhi semua imunisasi dasar anak.” (Indrayani, Sekretaris, Wawancara 16 Januari 2021).

Hasil wawancara menunjukan bahwa Satgas sudah melakukan pendataan sejak Ibu hamil dan terus memantau imunisasi setiap anak yang tinggal dan hidup di wilayah RW 18 Leles. Selanjutnya mereka dibantu dengan Posyandu, Puskesmas maupun Rumah Sakit terdekat guna memenuhi kebutuhan gizi ibu dan anak. Mengingat pentingnya pemantauan dan pemenuhan kesehatan Ibu saat mengandung, hal ini sangat berpengaruh pada presentasi keselamatan ibu dan bayi saat ibu melahirkan anaknya. Indrayani menuturkan tidak ada bayi yang meninggal dalam beberapa tahun terakhir. Sedangkan untuk kasus gizi buruk RW 18 Leles tidak ada kasus yang ekstrim, hanya sebatas pada berat badan anak yang tidak naik dalam beberapa bulan. Jika ada kasus anak yang berat badannya tidak naik dalam beberapa bulan, Puskesmas akan memberikan bantuan berupa makanan penambah berat badan seperti kacang hijau, biskuit, telur dan lainnya.

> "yang BGM, di bawah garis merah istilahnya disini kalau kurang gizi kan nanti ininya (nunjuk grafik) ngga naik, cuman ini kalau dibawah garis ini udah gizi buruk (nunjuk grafik), atau gizi yang kurang. Itu dipantau terus dari puskesmas pasti ada bantuan. Pasti ada bantuan dan bantuan itu jarang diberikan secara uang cash, biasanya biskuit itu pasti setiap anak, kadang malah ada anak yang berat badannya kurang atau timbangannya kurang dalam beberapa bulan tidak naik itu dapatnya satu karton itu. Terus nanti yang memang gizinya ya belum buruk-buruk banget tapi sudah di ambang anu, itu biasanya dapetnya bantuan gizi kayak kacang ijo, terus gula merah atau apa, pokoknya macem-macem gizi nanti biar diolah, telur kayak-kayak gitu. Itu kan dari puskesmas dipantau terus, makanne setiap bulan kita melaporkan hasil perkembangan ini kan, bulan ini misalnya alisya berat badannya berapa, lingkar kepala berapa, lingkar lengan berapa, terus kalau naik ee opo berat badannya naik nggak, kalau tetap, kan TT istilahnya, kalau naik yaa naik, berarti kan nanti kita hitung, kita data yang naik berapa, yang turun berapa, yang naik ituu eee yang turun itu karena apa kan kita data terus, kita kondisikan terus dan itu terpantau terus, misalnya ada anak yang bgm ataupun bahkan sampe kurang gizi, pasti terpantau terus."

Lebih lanjut lagi Indrayani menjelaskan

> "iyaa, tapi kalau disini belum sampai yang ekstrem, paling cuma dibawah garis merah, maksudnya hanya 2 3 bulan

> tidak naik gitu lo, 2 3 bulan tidak naik berat badannya biasanya dengan bu kader, dengan yang biasanya koordinasi disana dengan bu bandi ataupun bu ros nanti disampaikan disana, ni ada balita yang sudah 3 bulan tidak naik. Nanti dari puskesmas diedukasi, yaa ditanya bu-bu ini makannya gimana? Terus minum susu nggak? Itu nanti biasanya dapet biskuit atau apa… nanti memang ada undangan tersendiri, ibu yang memang anaknya 3 4 bulan itu ngga naik bbnya dapet undangan dateng ke puskesmas, nanti bertemu dengan (ahli) gizi di sana nanti langsung dikasih tau di sana sendiri. Kita tidak.. Kader tidak.. Bisanya kan di kasih tau di posyandu malah nggak fokus, biasanya kan puskesmas depok 2 itu seperti itu sistemnya, teknisnya seperti itu. Kalau itu kalau udah memang bener-bener kurang atau memang atau apa biasanya kalau ngga diambilin kader-kader bantuan biskuitnya, nanti kesana sambil nanti disana dikasih tau. Mungkin kalau susah maeme yaa mungikin maemmee ngga usah dijamin, siang sore mau ngga usah, sesering mungkin setiap kali dia mau dimaemin sedikit, tapi sedikit nggak papa nanti maem lagi." (Indrayani, Sekretaris, Wawancara 16 Januari 2021).

Kemudian Indrayani juga menjelaskan pengawasan kepada ibu yang masih memberikan ASI kepada bayinya.

> "Iyaa hee'ee iyaaa, kaan setiap pokoknya kita itu kader satgas pun dari kader posyandu setiap bulan pun misalnya ada bayi yang baru yaa kita tanya, ini asi eksklusif nggak? Maksudnya asi eksklusif itu udah ditambah asi belum? Udah ditambah makanan tambahan belum? Belum bu, berarti kan masih asi eksklusif, karena kalau asi eksklusif kan harusnya 6 bulan dari 0 sampe 6 bulan, tapi kadang kan kalau orang tua rewel kadang dikasih formula itu kita tengok sendiri di lembar, pokoknya nanti kalau njenengan di posyandu nanti bisa melihatnya di lembaran buku yang pertama dateng tu nanti ditanya namanya kan siapa, terus nanti ditanya ibunya tu asi eksklusif nggak atau udah tambahan, kalau asi eksklusif nanti tandanya AE, kalau hanya asi pake tambahan udah A+ kayak gitu…….. Kalau untuk asi itu pasti, tapi untuk data lebih lengkapnya nanti di posyandu."

Aksi kolektif ini dilakukan oleh aktor-aktor yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Narayan (2002) mengemukakan bahwa orang miskin yang memiliki kesehatan dan pendidikan yang lebih baik dapat berkontribusi secara lebih efektif untuk melakukan aksi kolektif dan disaat yang sama, aksi kolektif ini dapat meningkatkan kesetaraan orang miskin dalam mengakses pendidikan maupun

kesehatan. Meskipun dalam kondisi sosial di RW 18 Leles tidak termasuk dalam kategori miskin, namun gerakan kolektif yang dilakukan oleh masyarakat itu memberikan akses dan pengawasan kesehatan yang lebih baik.

Kegiatan yang dilakukan oleh satgas dan masyarakat Leles termasuk kedalam bentuk kegiatan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Manusia (UKBM) dengan upaya surveilans yang berbasis kepada masyarakat (Hartono et al., 2010). Dimana dalam kegiatan tersebut Puskesmas berperan menjadi mitra desa ataupun kelompok masyarakat. Masyarakat kemudian ikut berperan aktif dalam program pemberdayaan kesehatan yang diawasi oleh Puskesmas setempat dengan membentuk Posyandu, Posyandu Lansia, Kelurahan/Desa Siaga Aktif, dan lain-lain (Restuastuti et al., 2004).

Gambar 3.2
Posyandu di RW 18 Leles
Sumber: Dokumentasi Peneliti

Selain pengawasan dan hak akses atas kesehatan, akses atas sumber daya menjadi hal penting lainnya dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat. Keterbatasan atas sumber daya mendasar seperti air bersih dan udara bersih menjadi fokus dalam perwujudan wilayah ramah anak. Setiap masyarakat berhak atas akses tersebut dan fasilitator bertanggung jawab dalam memberikan bantuan

kepada masyarakat penerima manfaat untuk mendapatkan hak atas air dan udara bersih.

Penekanan kesejahteraan anak yang berasal dari keluarga miskin dan hak atas air serta udara bersih juga menjadi fokus sendiri dalam indikator ini. Adapun di RW 18 Leles tidak ada keluarga yang masuk kategori miskin. Indrayani kemudian memberikan keterangan bahwa dulu ada beberapa keluarga yang masuk kategori miskin, namun dalam beberapa tahun terakhir mereka sudah membaik dari segi ekonomi dan anak-anaknya sudah menikah. Jika ada keluarga yang masuk kategori miskin, mereka masih memiliki usaha seperti menjual sayuran.

> "Ngga ada. Kalau disini untuk kk miskin udah kita data di administrasi. Kayak misal dulu kan ada pak --- masuk kk miskin tapi karena anaknya ada 2 dan sudah menikah semua, terus anaknya udah pada kerja semua yaa ekonominya sudah meningkat semua, yaa kami coret." (Indrayani, Sekretaris, Wawancara 16 Januari 2021).

Air bersih menjadi salah komponen penting dalam kehidupan sehari-hari, sehingga keberadaan air bersih menjadi tanggung jawab bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Suatu daerah yang tidak memiliki air bersih masyarakatnya akan mengalami berbagai gangguan kesehatan. Di Leles sendiri semua warganya sudah mendapat akses air bersih dari sumur.

Lebih lanjut, sebagai wilayah yang menerapkan konsep wilayah ramah anak, RW 18 Leles juga harus mampu memberikan wilayah bebas asap rokok untuk semua orang terutama untuk anak-anak dan ibu. Indrayani menyebutkan beberapa tempat yang bebas rokok di RW 18 Leles diantaranya adalah taman bermain, Posyandu, TPA (halaman masjid). Namun hasil dari observasi yang dilakukan peneliti tidak menemukan tanda maupun peringatan kawasan bebas asap rokok.

D. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya

Setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses pendidikan. Pemerintah Indonesia sendiri telah memberlakukan wajib sekolah selama 12 tahun yang meliputi 6 tahun di jenjang sekolah dasar, 3 tahun sekolah menengah pertama dan 3 tahun terakhir di jenjang sekolah menengah atas atau sederajat (Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 2016). Pemenuhan hak pendidikan anak juga menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam aktivitas di kawasan layak anak.

Selain pendidikan, hak anak dalam memanfaatkan waktu luang dengan berbagai kegiatan yang positif baik itu kegiatan yang menghibur, kegiatan kebudayaan maupun olahraga. Setiap anak berhak memilih dan menentukan kegiatan mereka selepas kegiatan wajib sekolah 12 tahun. RW 18 Leles sendiri tidak ada anak yang tidak sekolah. Paijan menuturkan tidak ada anak yang tidak mendapatkan akses pendidikan. Dan untuk kegiatan selepas sekolah, RW 18 Leles menyiapkan berbagai kegiatan guna menunjang pemenuhan hak anak akan kegiatan liburan, kegiatan kebudayaan, dan olahraga.

Satgas PPA RW 18 Leles menyiapkan jadwal rutin yang bebas dipilih oleh anak-anak sekitar RW 18 Leles untuk pemenuhan/pemanfaatan waktu luang mereka. Jadwal kegiatan yang telah:

a. Senin-Selasa : Belajar komputer
b. Kamis : Belajar bahasa Inggris
c. Jumat : Belajar menari

Kegiatan tersebut adalah kegiatan yang disesuaikan dengan masa pandemi. Indrayani dan Windarti menuturkan sebelum pandemi mereka melaksanakan kegiatan TPA yang dilaksanakan di halaman Masjid Baabul Jannah setiap hari Selasa dan Kamis, namun kegiatan ini terpaksa berhenti untuk sementara dan diganti dengan belajar komputer dan belajar bahasa Inggris.

Gambar 3.3
Kegiatan Bimbingan Belajar
Sumber: Dokumentasi Peneliti

RW 18 Leles juga menyediakan fasilitas guna memenuhi hak-hak anak dalam klaster ini. Misalnya Satgas menyiapkan taman bermain serta berbagai permainan anak-anak seperti egrang, ayunan, engklek dan lain sebagainya. Guna memaksimalkan kualitas bermain anak, Satgas RW 18 Leles berinisiatif untuk menutup akses kendaraan bermotor di sepanjang jalan Delima mulai pukul 15:30 - 17:30. Hal ini dilakukan demi kenyamanan anak-anak saat bermain dengan bebas tanpa harus khawatir dengan kendaraan bermotor yang lewat.

Pengadaan taman baca juga dilakukan oleh Satgas. Sebelum pandemi, kegiatan ini dilakukan di Gardu Pintar yang berada di jalan Delima, namun selama peneliti melakukan observasi sejak November 2020, peneliti belum melihat kegiatan ini berlangsung. Indrayani menjelaskan kegiatan ini memang sudah dilakukan sebelum pandemi, karena pandemi kegiatan ini dihentikan untuk sementara dan buku-buku yang sudah disediakan disimpan di rumah beberapa orang Satgas.

E. Perlindungan Khusus

Perlindungan khusus meliputi perlindungan dan pengawasan anak yang terlibat dengan masalah hukum, termasuk di dalamnya perlindungan terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi anak. Dalam klasters ini, RW 18 Leles sudah memiliki SOP untuk menangani anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban maupun tersangka.

1. Pihak yang melihat, mendengar, mencurigai ataupun mendapatkan laporan kekerasan wajib melaporkan kepada Satgas PPA
2. Laporan diterima oleh Divisi Penanganan dengan mengisi formulir
3. Identifikasi keselamatan untuk kemudian menentukan langkah selanjutnya
4. Satgas PPA kemudian mengidentifikasi kasus berdasarkan:
    a. Jika ringan sampai sedang, menggunakan jalur mediasi dengan pemangku kepentingan.
    b. Jika berat dan mengalami masalah kesehatan, segera dirujuk ke Puskesmas/Rumah Sakit terdekat.
    c. Jika berat dan kasusnya non medis, Satgas PPA kemudian meneruskan kepada pihak yang terkait dengan kasus (Polsek Depok, FPK2PA Depok, UPT P2TP2A Sleman, LSM)
    d. Kemudian melakukan pemantauan terhadap korban

Cangkupan dari SOP ini meliputi penyadaran dan pencegahan, pelaporan, identifikasi kasus, mediasi, rujukan dan pemantauan.

Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan berdasarkan Peraturan Bupati Sleman No: 12 tahun 2018, tentang kabupaten layak anak tersebut tak lepas dari peran penting fasilitator atau penyuluh. Penyuluh atau fasilitator adalah seseorang maupun organisasi yang berasal dari pemerintah, swasta maupun dalam masyarakat itu sendiri yang mengemban tanggung jawab dalam

mempengaruhi masyarakat penerima manfaat guna menata kehidupan mereka yang lebih baik.

Fasilitator atau penyuluh dalam kegiatan pemberdayaan di RW 18 Leles berbentuk organisasi yang dikenal dengan nama Satgas PPA RW 18 Leles yang anggotanya berasal dari masyarakat RW 18 Leles. Fasilitator yang berasal dari dalam anggota masyarakat itu sendiri akan lebih mudah dalam melaksanakan program pemberdayaan mengingat mereka sudah mengenal dan dikenal oleh masyarakat penerima manfaat. Hal ini juga dapat dilihat sebagai potensi dalam kegiatan pemberdayaan.

Salah satu peran penting fasilitator dalam menjalankan program pemberdayaan adalah dengan membangun jaringan atau mitra dengan berbagai lembaga terkait, baik pemerintah maupun swasta guna mensukseskan kegiatan pemberdayaan yang berlangsung. Hasil dari observasi dan wawancara yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa Satgas PPA RW 18 Leles sebagai fasilitator tidak bergerak dengan sendiri, mereka menjalin mitra dengan berbagai pihak. Hal ini diperkuat dengan wawancara:

> "Sehingga satgas itu saat bekerja tidak sendiri murni *pure* dengan anggota satgas enggak mas, makannya ada divisi kemitraan, di susunan anggota satgas itu ada divisi kemitraan, nah mereka itu yang membangun jejaring di sekitar satgas itu berada. Disitu ada sekolah, disitu ada polsek, disitu ada polda, disitu ada puskesmas dan rumah sakit dan sebagainya, mereka yang nanti akan nge-*link* untuk mendapatkan bantuan, kerja sama." (Sumarni, Fasilitator, Wawancara 16 Februari 2021).

Mardikanto (2019) menjelaskan ada beragam peran Fasilitator dalam kegiatan pemberdayaan. Peran-peran tersebut harus dapat dilaksanakan oleh fasilitator agar kegiatan pemberdayaan berlangsung dengan maksimal. Peran-peran tersebut meliputi peran edukasi, peran diseminasi inovasi, peran fasilitasi, peran konsultasi, peran advokasi, peran supervisi, dan peran pemantauan atau evaluasi.

Sebagai fasilitator, Satgas PPA RW 18 Leles berusaha melaksanakan tugasnya dengan berpedoman kepada SOP, AD/ART dan beragam standar kerja yang sudah mereka buat. Pada awal kegiatan pemberdayaan akan dimulai, Satgas PPA RW 18 Leles sebagai fasilitator

memiliki tanggung jawab sebagai pendidik guna memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat penerima manfaat tentang pentingnya program yang akan mereka laksanakan. Proses ini menekankan pada proses partisipasi aktif, dimana masyarakat penerima manfaat diposisikan sejajar dengan fasilitator dan diharapkan dapat berperan aktif dan berkolaborasi dalam kegiatan.

Satgas PPA RW 18 Leles berperan dalam memastikan proses ini berlangsung secara terus-menerus. Hal ini dilakukan oleh Satgas PPA RW 18 Leles dengan ajakan yang syarat akan pemahaman tentang pentingnya kegiatan ini. Hal ini ditunjukan dengan wawancara:

> "yaa dengan ajakan, awalnya dengan pemahaman-pemahaman itu. Ketika dia paham kok tertarik ikut bergabung." (Sumarni, Fasilitator, Wawancara 16 Februari 2021).

Setelah berhasil memberikan pemahaman-pemahaman tersebut, Satgas PPA RW 18 Leles harus dapat membantu masyarakat penerima manfaat dalam menjaga konsistensi dan tetap berproses dalam mengembangkan kegiatan pemberdayaan kearah yang lebih baik. Masyarakat yang sudah paham dengan pentingnya program ini akan lebih mudah untuk bergerak dan berkolaborasi. Hal ini ditunjukan dengan wawancara

> "kalau yang kesadarannya sudah penuh itu ini, apa, lebih mudah untuk memberi bantuan misalnya. Itu mudah. Merasa oo ini penting to untuk anak kita."

> "kebetulan kalau nari dari luar. Tapi kontribusinya dari swadaya masyarakat. Nah contohnya itu, ketika masyarakat itu sadar bahwa program itu penting untuk anak kita maka nggak akan sulit. Kita tetep narinya terus ada yang bayarin. Itu juga narinya bukan untuk anaknya dia, tapi juga untuk semua anak disitu. Gurunya dia yang bayarin. Ini bukti kesadaran bahwa ini tu penting untuk tumbuh kembang anak-anak kita. Nah, yang sulit kan proses itu kan mas? Membangun kesadaran itu. Nah ketika sudah ada yang sadar meskipun 1 bangganya kami sudah tak terkira. Rasanya senang sekali gitu lo." (Sumarni, Fasilitator, Wawancara 16 Februari 2021).

Setelah sebagian besar masyarakat penerima manfaat sadar dengan pentingnya kegiatan Kawasan Ramah Anak, Satgas PPA RW 18 dan masyarakat bertanggung jawab untuk tetap menjaga kegiatan ini agar tetap berlangsung dan menanamkan pemahaman belajar sampai akhir hayat

kepada siapapun dan dimanapun. Hal ini dilakukan oleh Satgas PPA RW 18 dengan bentuk sosialisasi.

> "Anak-anak kan sering di ruang bermain itu ya? Nah disitu kan sering mendengarkan ada sosialisasi, misalnya mendengarkan ada apa ya? Pemahaman-pemahaman secara sederhana untuk anak-anak. Contohnya gini, saat kami menyampaikan tentang bahaya gadget untuk anak-anak kita, kita pake ilmu internet yang ramah anak itu yaa, sebaiknya anak-anak itu tidak usah terburu-buru untuk dikenalkan dengan gadget, ada masanya." (Sumarni, Fasilitator, Wawancara 16 Februari 2021).

Kolaborasi yang baik antar masyarakat dan Satgas PPA RW 18 menjadikan RW 18 Leles Ramah Anak salah satu yang terbaik di Jogja. Paijan dan Sumarni mengatakan bahwa kegiatan ini menjadi satu-satunya kegiatan Kawasan Ramah Anak yang berada pada lingkup RW. Hubungan yang baik antara masyarakat RW 18 Leles, Satgas PPA RW 18 Leles dan Pemerintah membuat program ini tetap bertahan dalam jangka waktu lama dan terus berkembang dengan inovasi-inovasi yang dikembangkan secara kolektif antara penerima manfaat dan fasilitator.

Dalam pelaksanaan program pemberdayaan, informasi yang terkait dengan kegiatan pemberdayaan menjadi sangat penting. Hal ini menjadi peran Satgas PPA RW 18 Leles dalam menyebarkan informasi tersebut seluas-luasnya kepada penerima manfaat dan lembaga yang berhubungan dengan kegiatan pemberdayaan tersebut.

Satgas PPA RW 18 Leles memanfaatkan berbagai macam media untuk menyebarkan pesan tersebut. Indrayani dan Sumarni mengatakan salah satu cara untuk menyebarkan pesan ini dilakukan secara *door to door* ataupun dengan menggunakan metode lain seperti saat evaluasi, perkumpulan ibu-ibu PKK, perkumpulan posyandu dan selama masa pandemi penggunaan Whatsapp sebagai media penyampai pesan meningkat.

> "kita bersama-sama. Kita bersama-sama door-to-door, bersama-sama kita agendakan. Ada kita foto-fotonya itu. Saya sedang menempel stiker. Dulu awal yang kita buat adalah stiker, he'e to? Stikernya kita tempelkan di pintu-pintu semua warga. Kita muter sore bersama, kamu bagian barat, saya bagian selatan." (Sumarni, Fasilitator, Wawancara 16 Februari 2021).

Lebih lanjut Sumarni menjelaskan:

> “Disamping itu juga kita sering ngisi melalui, pertemuan pkk, kita kan ada pertemuan pkk rt dan rw, kebetulan masing-masing ada itu, nah di pertemuan pkk itu sering kita edukasi secara lisan untuk semacam sosialisasi kalau ada update-update program terbaru dari pemerintah itu kita langsung gulirkan disitu. Biasanya ibu-ibu yang sering banyak kumpul.” (Sumarni, Fasilitator, Wawancara 16 Februari 2021).

Selain pertemuan PKK, Sumarni menceritakan berbagai kegiatan di RW 18 Leles Ramah Anak yang dapat menjadi titik penyebaran pesan seperti event-event besar, rapat evaluasi, pertemuan warga dan lain sebagainya. Kondisi pandemi yang memaksa pertemuan-pertemuan tersebut menjadi terbatas, namun Satgas PPA RW 18 Leles tetap menyebarkan informasi dengan menggunakan media alternatif seperti Whatsapp.

Lebih lanjut, guna menunjang keberhasilan program, fasilitas menjadi salah satu elemen penting dalam kegiatan pemberdayaan. Hal ini juga menjadi tanggung jawab fasilitator untuk dapat memberikan maupun menunjukan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi kegiatan yang berlangsung. Fasilitas yang dimaksud dapat fasilitas secara fisik seperti bangunan, arena bermain, taman belajar dan lain sebagainya ataupun fasilitas non fisik seperti ketersediaan tenaga yang berkompeten di bidangnya.

Hasil observasi peneliti menemukan Satgas PPA RW 18 Leles dan masyarakat menggunakan - mengalihfungsikan - beberapa fasilitas fisik yang ada di lingkungan RW 18 Leles. Seperti penutupan jalan Delima selama jam bermain agar anak-anak bebas bermain, penggunaan gardu Siskamling sebagai taman belajar, penggunaan taman bermain sebagai taman bermain anak sekaligus tempat perkumpulan Satgas PPA RW 18 Leles dan masyarakat, penggunaan halaman rumah warga yang luas sebagai Posyandu dan lain sebagainya.

Selain fasilitas fisik, fasilitas non fisik seperti kegiatan belajar untuk anak-anak juga disediakan oleh Satgas PPA RW 18 Leles dan masyarakat. Mereka memaksimalkan taman bermain sebagai tempat belajar dan menyediakan pendamping atau guru untuk mendampingi anak-anak selama proses belajar. Hal ini terpenuhi oleh masyarakat yang sadar dengan

pentingnya program ini dan berinisiatif untuk menanggung upah pendamping anak-anak belajar.

> "Kebetulan kalau nari dari luar. Tapi kontribusinya dari swadaya masyarakat. Nah contohnya itu, ketika masyarakat itu sadar bahwa program itu penting untuk anak kita maka nggak akan sulit. Kita tetep narinya terus ada yang bayarin. Itu juga narinya bukan untuk anaknya dia, tapi juga untuk semua anak disitu. Gurunya dia yang bayarin. Ini bukti kesadaran bahwa ini tu penting untuk tumbuh kembang anak-anak kita." (Sumarni, Fasilitator, Wawancara 16 Februari 2021).

Salah satu kegiatan aktif Satgas PPA RW 18 Leles dalam menyediakan fasilitas adalah ketika Satgas PPA RW 18 Leles, mahasiswa, dan warga bergotong royong untuk membangun lapangan volly. Selain itu, penyediaan fasilitas dengan tujuan untuk mempermudah keberlangsungan program melalui jaringan kemitraan juga disediakan oleh Satgas PPA RW 18 Leles. Jaringan kemitraan ini dibangun berdasarkan dengan lembaga terkait yang dapat membantu program pemberdayaan di kemudian hari. Seperti membangun mitra dengan pemerintah, Puskesmas, Rumah Sakit, Polsek ataupun dengan pemuda setempat.

> "Nah, pemuda itu kan sebagai mitra, programnya program Satgas, dukungan SDM bagian masyarakat kan gitu to. Kan pemberdayaan itu tadi, kita memberdayakan ya tidak *pure* yang diberdayakan para satgasnya, tapi juga masyarakat bagian dari partisipasi. Yang punya keahlian apa ya ayuk, seperti yang tadi bahasa inggris dan sebagainya kan juga pemberdayaan. Kalau sudah ada yang ahli itu, kenapa tidak? Daripada kita nyari guru dari luar bayar. Pemuda juga gitu, kan banyak yang punya anu seni, punya potensi seni, pinter gambar, pinter mural, he'e to? Dikala satgas mau buat itu (mural), panggil mereka "yok bantu" seneng dia. Jadi ruang untuk dia berekspresi juga to?" (Sumarni, Fasilitator, Wawancara 16 Februari 2021).

Satgas PPA RW 18 Leles juga mengemban peran dapat memberikan ruang konsultasi untuk masyarakat RW 18 Leles sebagai penerima manfaat guna memecahkan masalah yang dihadapi. Satgas PPA RW 18 Leles memberikan ruang kepada siapapun yang ingin berkonsultasi terkait dengan permasalahan mereka dan disediakan pihak yang lebih berkompeten sesuai dengan bidangnya. Jalinan kemitraan yang berhasil dibangun oleh Satgas PPA RW 18 Leles membuat Satgas PPA RW 18 Leles memiliki opsi dalam

memberikan ruang konsultasi kepada masyarakat RW 18 Leles sebagai penerima manfaat sesuai dengan permasalahan mereka.

> “Di kita, di pemerintah ini kan ada namanya UPTD-PPA, Unit Pelayanan Teknis Daerah - Perlindungan Perempuan dan Anak. Satgas PPA itu kepanjangan, tangannya UPTD-PPA, otomatis dia punya tugas dan fungsi merespon setiap kasus yang didapati. Mendengar laporan, menerima laporan, sepanjang laporan atau kasus yang didapat itu, masih bisa dimediasi oleh satgas, maka satgas akan memediasi kasus yang tadi dilaporkan itu. Misal kasusnya masih bisa didamaikan. Kan di SOP ada, SOP kan kalau menemukan kasus yang ringan, cukup Satgas, tapi kalau kasusnya berat sampai luka-luka dan berdarah-darah misalnya, satgas harus segera mengamankan untuk dibawa ke layanan kesehatan, kayak gitu. Nah, kasusnya ini tentang kasus kekerasan dan pelecehan dan sebagainya, Satgas diberi kewenangan untuk asesmen awal. Melakukan asesmen, menggali data lengkapnya dulu, ketika itu tidak menjadi kapasitas (satgas) untuk menyelesaikan kasus, karena tugas satgas tidak untuk menyelesaikan kasus, maka akan dibawa untuk dirujuk ke UPTD-PPA”

Sumarni menjelaskan lebih lanjut

> “Dulu ada pelecehan seksual di kampung kami yang dilakukan oleh orang dewasa yang tinggal di rumah kontrakan. Nah saat itu kan namanya anak ya akrab juga dengan dia. Tendensinya kan mau ngajarin belajar gitu lo, terus ternyata ada kejadian lain. Terus anak itu melaporkan ke orang tuanya, kemudian orang tuanya lapor ke satgas. Kemudian satgas menjangkau ke lokasi, bersama ketua, bersama ketua divisi, ada ketua, ada koordinator divisi to? Untuk mengedukasi dan melakukan asesmen lebih dalam. Seperti apa kebenaran masalahnya? Kemudian dirapatkan di satgas, rapat terbatas tentunya. Karena rahasia kalau penanganan kasus, tidak semua satgas terlibat. Karena ya itu tadi, rahasia kan kalau dipegang banyak orang bahaya, konsepnya seperti itu. Rapat terbatas, kemudian “wah ini udah anu ini, udah masuk ranah hukum” gitu to, berarti kan satgas tidak punya kewenangan disitu. Kan ini harus masuk ke ranah hukum karena ini termasuk tindak pidana, kejahatan orang dewasa kepada anaka itu kan, seks orang dewasa kepada anak itu kan tindak pidana. Dan satgas setuju untuk memproses kasus itu melalui ranah hukum. Kemudian anaknya kita rujuk ke puskesmas, karena disana kan ada psikolog, semua konsultasi (Puskesmas) kita kan ada psikolognya. Sehingga satgas itu saat bekerja tidak sendiri murni pure dengan anggota satgas enggak mas, makannya ada divisi kemitraan, di susunan anggota satgas itu ada divisi kemitraan, nah mereka itu yang membangun jejaring di sekitar satgas itu berada. Disitu ada sekolah, disitu ada polsek, disitu ada polda, disitu ada puskesmas dan rumah sakit dan sebagainya, mereka yang nanti akan nge-link untuk mendapatkan bantuan, kerja sama. Yaa itu tadi, kalau kasus pelecehan seksual maka dirujuk ke puskesmas untuk

> mendapat pendampingan secara psikologis, psikis anaknya karena korban. Kemudian dirujuk lagi ke rumah sakit untuk mendapatkan *visum et repertum*" (Sumarni, Fasilitator, Wawancara 16 Februari 2021).

Pernah terjadi kasus tindak pidana di RW 18 Leles. Satgas PPA RW 18 Leles kemudian menindak sesuai dengan SOP yang sudah mereka rumuskan dalam AD/ART. Sumarni menjelaskan ketika terjadi kasus tindak pidana, Satgas PPA RW 18 Leles akan meninjau apakah kasus tersebut dapat selesai hanya menyediakan mediasi yang dilakukan secara tertutup antara pihak-pihak yang terkait. Jika mediasi tersebut sudah memasuki ranah hukum yang lebih serius, Satgas PPA RW 18 Leles akan menyerahkan kasus tersebut kepada pihak yang berwajib.

UPTD-PPA menjadi lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam setiap laporan dan memberikan ruang konsultasi ataupun menjadi pihak yang membantu dalam menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Selanjutnya Satgas PPA RW 18 Leles akan menyediakan ruang untuk korban yang membutuhkan bantuan baik itu secara medis maupun psikis. Untuk bantuan medis akan diserahkan kepada puskesmas maupun rumah sakit terdekat dan untuk bantuan secara psikis akan diserahkan kepada psikolog yang berada di puskesmas.

Situasi-situasi genting seperti yang dipaparkan oleh Sumarni membutuhkan pengambilan keputusan yang tepat. Disini Satgas PPA RW 18 Leles berperan untuk dapat membantu masyarakat dalam mengambil keputusan tersebut. Salah satu contoh pengambilan keputusan yang peneliti temukan saat observasi adalah kondisi pandemi yang membuat masyarakat dan Satgas PPA RW 18 Leles menjadi dilema apakah akan tetap menjalankan kegiatan dengan peserta terbatas atau menghentikan kegiatan. Masyarakat dan Satgas PPA RW 18 Leles kemudian mengambil langkah untuk tetap mematuhi anjuran dari pemerintah.

> "Karena psbb kan udah mau mulai lagi kegiatan kita di mulai tanggal 11 kemaren karena mengajar komputer kan hari senin dan selasa, nah mulai hari senin tanggal 11 tu baru mau kita mulai senin selasa, hari kamis bahasa inggris jumat menari. Tapi kok ada pengumuman tanggal 11 PSBB kita sampaikan ke amikom, kata amikom "kalau saya nderek ibu aja, kita manut aja kalau memang disitu ada pembatasan kami libur dulu juga ngga papa" - "sebentar

> mas, saya usulkan dulu ke pengurus satgas semuanya, hasil dari masukan satgas yaudah kita libur dulu aja. Kita juga dari satgas istilahnya ikut pemerintahlah, pemerintah menganjurkan seperti apa, nanti nda malah kena sanksi. Kita tidak tau apa-apa, taunya kita kan hanya ingin berbuat baik, ternyata kan keliru salah nanti malah dapet teguran atau apa jadi yaa sementara ya sudah kita liburkan dulu." (Indrayani, Fasilitator, Wawancara 16 Januari 2021).

Dari hasil wawancara diatas, dapat ditarik kesimpulan untuk pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah dengan. Lebih lanjut, Sumarni juga menjelaskan:

> "Kalau satgas kan tidak orang perorang mas, he'e to? Mereka kan ketemu duduk bersama merapatkan hehe merapatkan, membahas maksud saya, membahas itu, membahas masalah-masalah itu "ini kok gini, alternatif ini gini" naa nanti kan didiskusikan. Diskusi dari para satgas itu kemudian mengerucut dan dijadikan untuk pengambilan keputusan. Di diskusi itu kan pasti ada memetakan plus-minusnya. Itu dulu juga pernah ee kasus ini, kasus penganiayaan kalau nggak salah. Itu juga ada. Sehingga ditimbang plus-minusnya, ternyata akhirnya yaudah, cukup selesai dimediasi, tidak di ranah hukumkan, gitu." (Sumarni, Fasilitator, Wawancara 16 Februari 2021).

Musyawarah sangat membantu Satgas PPA RW 18 Leles guna memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Dengan musyawarah, akan banyak kepala yang terlibat dan memberikan beragam solusi dalam setiap masalah.

> "iyaa, betul, itu menjadi senjata kita. Tidak boleh satgas mengambil keputusan sendiri-sendiri. Harus forum, forum satgas maksudnya." (Sumarni, Fasilitator, Wawancara 16 Februari 2021).

Setelah keputusan dibuat dengan bermusyawarah, Satgas PPA RW 18 Leles dan masyarakat penerima manfaat harus menjaga keputusan tersebut tetap berjalan dalam koridornya. Tidak hanya sebuah keputusan, keberlangsungan kegiatan secara keseluruhan harus tetap diawasi dan dijalankan sesuai dengan ketentuan yang sudah dibuat. Disini Satgas PPA RW 18 Leles berperan sebagai penyelia pelaksanaan kegiatan advokasi dan kegiatan pemberdayaan yang terjadi di RW 18 Leles Ramah Anak. Bentuk nyata yang dilakukan oleh Satgas PPA RW 18 Leles dan masyarakat untuk menjaga program berjalan sesuai dengan tujuan adalah dengan membuat AD/ART dan SOP sebagai acuan dalam merumuskan program kerja.

> “Kalau dulu kan memang menginisiasi dari ee apa, mengedukasi, menanamkan bahwa ini lo ramah anak itu apasih? Kemudian nanti seperti apa, tujuannya, kemudian manfaatnya, mengapa kita perlu mengembangkan ini di kampung kita, kan jadi lebih pada membangun mindset dulu kan mas? Awal-awalnya itu, jadi kan ketika mereka sudah memiliki mindset yang sama seperti yang kita harapkan “yok kita bergerak bersama mau?” “mau mau mau bu, mau mau” yaudah kalau mau, kita bikin SK blablabla dan sebagainya. Terus setelah kita menyandang predikat sebagai satgas ditetapkan dengan keputusan kepala desa, maka kita harus punya rencana kerja, kita punya program kerja, yok kita ketemu membahas program kerja itu. Nah, setelah kita punya program kerja, agar kita kerjanya lebih terarah dan sebagainya, yok kita nyusun SOP, kita nyusun SOP. Nah, agar SOP ini bisa kita taati dan pedomani bersama, yok kita simulasikan, kayak gitu terus sampai saatnya temen-temen itu semua paham “ooo ngene ki to!? Sebagai satgas itu punya kewajiban ini, punya kewajiban itu, seperti itu. Kemudian cara kerjanya, berpedoman pada ini, ada ad/art ada SOP dan sebagainya. Seperti itu mas. Jadi berprosesnya juga cukup lama untuk membangun/menyamakan mindset itu.” (Sumarni, Fasilitator, Wawancara 16 Februari 2021).

Guna mengetahui kegiatan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan jalurnya, Satgas PPA RW 18 Leles dan masyarakat penerima manfaat harus memonitor semua program yang sudah berjalan. Kegiatan ini bertujuan untuk meninjau kembali kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Satgas PPA RW 18 Leles dan masyarakat penerima manfaat. Satgas PPA RW 18 Leles melakukan monitoring evaluasi besar yang diadakan setiap akhir tahun.

> “Setiap akhir tahun sebelum membuat perencanaan baru kami selalu melakukan evaluasi. Apa yang sudah kita lakukan dalam setahun ini yok apa yang tidak terlaksana, apa yang belum terlaksana, apa yang masih keteteran kemarin, sebelum kita munculkan program di tahun berikutnya.” (Sumarni, Fasilitator, Wawancara 16 Februari 2021).

Selain evaluasi yang dilakukan setahun sekali, agar Satgas PPA RW 18 Leles dapat melihat ritme kegiatan dengan kurun waktu lebih pendek, Satgas PPA RW 18 Leles juga melakukan kegiatan evaluasi setiap bulan yang diadakan dalam pertemuan-pertemuan maupun event .

> “Kalau bulanan anu, kita biasanya, setelah event-event gitu. Dan kalau rutin cukup berjalan di sharing pertemuan itu.” (Sumarni, Fasilitator, Wawancara 16 Februari 2021).

Lebih lanjut, Sumarni menjelaskan tentang hambatan terbesar selama program ini berlangsung.

> "Kendalanya anggaran heheh. Dulu kan kita pengen sekali punya baliho besar, nah tapi tu itu terwujudnya belum lama lo mas, baliho yang di jalan yang di sawah itu, baru kemarin, baru. Padahal itu rencana udah lama banget, itu menjadi bagian dari evaluasi berkali-kali. Ini anu kita, mimpi kita ada yang belum terwujud, membuat baliho besar di sebelah kampung." (Sumarni, Fasilitator, Wawancara 16 Februari 2021).

Melihat peran fasilitator yang beragam dan tidak mudah, Berlo (1960) dalam Mardikanto (2019) mengungkapkan setidaknya fasilitator harus memenuhi beberapa kualifikasi sebelum memulai kegiatan pemberdayaan. Kualifikasi tersebut meliputi kemampuan berkomunikasi, sikap fasilitator, kemampuan pengetahuan fasilitator, dan karakteristik sosial budaya fasilitator.

Kemampuan berkomunikasi menjadi penting dalam kegiatan pemberdayaan. Satgas PPA RW 18 Leles sebagai fasilitator harus dapat menyampaikan gagasan dan inovasi dengan baik kepada masyarakat penerima manfaat. Kemampuan ini bukan hanya sekedar kemampuan dalam menyampaikan pesan. Kemampuan fasilitator dalam memilih media yang akan digunakan dalam menyampaikan pesan juga menjadi hal yang penting. Pemerintah, sebagai lembaga yang memiliki program Kawasan Ramah Anak memiliki tanggung jawab untuk dapat memastikan Satgas di setiap desa memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik.

> "Yaa unsur dari pembinaanlah, kita bekali, kemudian kita berikan pelatihan, yang salah satunya adalah konvensi hak anak tadi, terus ada pelatihan *publik speaking*, bagaimana kita memberikan bekal agar para satgas kita itu bisa ngomong yang sistematis, yang membuat masyarakat bisa terpengaruh, ada ilmunya." (Sumarni, Fasilitator, Wawancara 16 Februari 2021).

Peneliti banyak menemukan pesan-pesan yang tampak tentang RW 18 Leles ramah anak saat melakukan observasi. Satgas PPA RW 18 Leles menggunakan berbagai media komunikasi seperti banner, poster, stiker dan mural untuk menyampaikan pesan tentang hak-hak anak dan sebagai atribut identitas RW 18 Leles adalah Kawasan Ramah Anak. Pesan-pesan ini tersebar di seluruh penjuru RW 18 Leles agar dapat menjangkau banyak *audiens*. Penambahan bentuk pesan juga terjadi selama masa pandemi.

Pesan ajakan untuk menjaga kesehatan, mematuhi protokol, dan mencuci tangan juga tersebar di penjuru RW 18 Leles.

Selain itu, bentuk komunikasi yang digunakan oleh Satgas PPA RW 18 Leles dalam melaksanakan program ini adalah dengan bentuk komunikasi langsung. Satgas PPA RW 18 Leles berinteraksi dengan masyarakat penerima manfaat dalam forum-forum yang tersedia seperti dalam rapat evaluasi, event-event, pertemuan ibu-ibu PKK, Posyandu, dan sebagainya. Dalam prosesnya, Satgas PPA RW 18 Leles harus memiliki sikap yang bangga dan senang dengan tugasnya sebagai fasilitator. Hal ini akan sangat mempengaruhi interaksi yang terjadi dalam masyarakat.

Fasilitator yang bangga dengan profesinya akan lebih mudah dalam menyampaikan gagasan dan inovasinya. Satgas PPA RW 18 Leles terlihat sangat antusias ketika bertemu dengan tamu, baik itu dari lembaga pemerintah, swasta maupun mahasiswa. Mereka merasa bangga dengan program yang sudah mereka jalankan sejak 2015.

> "Seperti waktu malam itu saya cerita ke mas Edo, saat ini tu sekarang kami lebih anu, lebih tampak riang dan senang gitu, karena rasanya tidak sendiri lagi kami harus gembar-gembor menyampaikan perlindungan dan pemenuhan hak anak karena sudah temen-temen dari mahasiswa perguruan tinggi di sekitar jogja ini mulai melirik. Jadi otomatis kan kita akan mengedukasi masyarakat, hasilnya kan pasti akan dibaca entah kapan, oleh siapapun, he'e to? Pasti dibaca. Mereka kan nanti pasti punya anak (di masa depan)." (Sumarni, Fasilitator, Wawancara 16 Februari 2021).

Satgas PPA RW 18 Leles juga menyadari bahwa mereka sangat dibutuhkan oleh masyarakat penerima manfaat dan masyarakat lain yang membutuhkan. Hal itu disadari oleh Satgas PPA RW 18 Leles dengan tetap terus berinovasi dalam kegiatan dan terbuka dengan kedatangan tamu dari luar. Mengembangkan program pemberdayaan dengan berbagai inovasi dan menyambut tamu dari luar yang ingin belajar di RW 18 Leles menuntut Satgas PPA RW 18 Leles sebagai fasilitator untuk memiliki pengetahuan terkait dengan program pemberdayaan yang mereka laksanakan.

Kemampuan pengetahuan fasilitator harus tertanam dengan baik di benak setiap Satgas PPA RW 18 Leles. Satgas PPA RW 18 Leles harus mengetahui tentang isi, fungsi, manfaat dan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap inovasi yang akan mereka kembangkan. Memiliki pengetahuan

ini menjadi hal yang sangat penting agar tidak menimbulkan keraguan di masyarakat terhadap Satgas PPA RW 18 Leles sebagai fasilitator.

Pemerintah ikut terlibat dalam memastikan setiap Satgas di daerah-daerah memiliki pengetahuan dengan mengadakan berbagai pelatihan.

> "Pelatihannya macem-macem, prinsip yang harus ditanamkan pertama kali kepada para satgas itu adalah pemahaman tentang konvensi hak anak. Nah, itu menjadi poin pertama yang kita latihkan kepada semua Satgas, tidak hanya satgas disana (leles)." (Sumarni, Fasilitator, Wawancara 16 Februari 2021).

Lebih lanjut Sumarni menjelaskan

> "Karena disitu ilmu perlindungan dan pemenuhan hak anak itu ada. Karena kan peran fungsi mereka adalah sebagai penggerak, sebagai pelopor untuk mengajak masyarakat melakukan upaya-upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak. Laa kalo dia sendiri selaku, masnya menyebut fasilitator, tidak punya ilmunya kan lucu. Bisa jadi tidak perlindungan, tapi yang terjadi nggak tau kita. Kan begitu!?" (Sumarni, Fasilitator, Wawancara 16 Februari 2021).

Pelatihan ini mengacu pada program yang sudah dirumuskan oleh pemerintah. Namun, setiap daerah memiliki karakteristik sosial-budayanya masing-masing, oleh karena itu, pelaksanaan program pemberdayaan Kawasan Ramah Anak diserahkan kepada Satgas yang bertanggung jawab di tiap daerahnya. Hal ini dibuktikan dengan wawancara

> "Tetep mengacunya pada programnya pemerintah, tapi kalau pengembangan di lokasi sudah diserahkan ke-kearifan lokal masing-masing. Jadi yang merumuskan satgas disana. Kan tidak sama gerakan di wilayah satu dan wilayah lain pasti akan beda-beda. Mungkin yang lain pertemuannya 2 kali seminggu atau 2 kali sebulan, misalnya, ada yang 1 kali sebulan. Kalau itu menyesuaikanlah, fleksibel dengan kondisi lokal di lingkup masing-masing." (Sumarni, Fasilitator, Wawancara 16 Februari 2021).

Perbedaan karakteristik masyarakat di setiap daerah inilah yang menentukan model dan keberhasilan program pemberdayaan yang berlangsung. Kualifikasi fasilitator terakhir yang dibahas oleh Berlo (1960) dalam Mardikanto (2019) adalah kualifikasi fasilitator tentang karakteristik sosial-budaya fasilitator. Perbedaan karakteristik sosial budaya antara fasilitator dengan penerima manfaat akan menjadi hambatan dalam

melaksanakan kegiatan pemberdayaan. Begitu pula sebaliknya, kesamaan karakteristik akan menjadi potensi tersendiri dalam pelaksanaan program.

Anggota Satgas PPA RW 18 Leles yang berjumlah tidak kurang dari 30 anggota berasal dari dalam masyarakat RW 18 Leles. Hal ini menjadi potensi tersendiri karena anggota Satgas PPA RW 18 Leles diasumsikan sudah mengenal baik kondisi sosial budaya di RW 18 dan akan lebih mudah dalam menyampaikan program yang akan dilaksanakan.

2. Komunikasi Pemberdayaan

Dalam kegiatan pemberdayaan baik yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat maupun bantuan dari pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat, komunikasi menjadi peran penting dalam prosesnya. Dalam kajian akademik, komunikasi pemberdayaan merupakan kajian ilmu komunikasi yang fokus terhadap keterlibatan masyarakat yang bertujuan memajukan ekonomi sosial masyarakat untuk menaikan taraf hidup mereka dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya (Dewi, n.d.)

Komunikasi pemberdayaan sebagai proses memerlukan agen perubahan yang bertanggung jawab dalam keberlangsungan program pemberdayaan. Agen perubahan ataupun yang dikenal secara luas sebagai fasilitator/penyuluh adalah seseorang yang berasal dari lembaga pemerintah, lembaga pemberdayaan masyarakat atau berasal dari masyarakat itu sendiri yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan pengaruh ataupun gagasan guna pengambilan keputusan yang dilakukan oleh masyarakat yang diberdayakan (Lippit dan Rogers, dalam Mardikanto, 2019).

Fasilitator/penyuluh memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan program-program pemberdayaan kepada penerima manfaat dengan metode yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang terjadi. Dalam kondisi pandemi, penyampaian pesan secara langsung memiliki banyak hambatan terutama untuk penyampaian pesan yang harus diadakan dalam bentuk pertemuan antar penyuluh dan penerima manfaat. Media komunikasi - misalnya gawai - menjadi solusi saat pandemi, namun keterbatasan

kemampuan individu dalam menggunakan gawai juga menjadi kendala tersendiri dalam berkomunikasi.

Fasilitator berperan sebagai komunikator yang bertanggung jawab dalam dalam menyukseskan kegiatan pemberdayaan di RW 18 Leles Ramah Anak. Menurut Dewi, fasilitator harus mampu menyusun pesan dengan baik, menentukan media yang akan digunakan, dan membangun hubungan baik dengan penerima manfaat. Fasilitator dituntut untuk terampil dalam berkomunikasi, penuh dengan inovasi dan kreativitas.

Fasilitator di RW 18 Leles Ramah anak berbentuk organisasi yang kemudian dikenal dengan nama Satgas PPA RW 18 Leles yang beranggotakan tidak kurang dari 30 orang. Anggota Satgas PPA sendiri berasal dari masyarakat yang tinggal di RW 18 Leles dengan berbagai latar belakang. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara peneliti dengan Sumarni

> "Iyaa, dari masyarakat, asli masyarakat Leles dan kita ambilkan dari berbagai kelompok eee tokoh." (Sumarni, Fasilitator, Wawancara 16 Februari 2021).

Dalam kegiatan pemberdayaan yang berlangsung, Satgas PPA RW 18 Leles menggunakan berbagai bentuk pesan yang dapat dilihat secara fisik, seperti poster, banner dan mural. Mereka menyampaikan berbagai pesan yang memiliki keterkaitan dengan program mereka, yakni melindungi anak-anak. Pesan-pesan ini diproduksi oleh Satgas PPA RW 18 Leles guna mengajak masyarakat yang tinggal dan menetap di RW Leles untuk ikut berperan aktif dalam program pemberdayaan yang berlangsung.

Gambar 3.4
Banner di Pintu Masuk Jalan Delima
Sumber: Dokumentasi Peneliti

Mereka memasang berbagai poster di jalan akses masuk ke RW 18 dengan pesan selamat datang di RW ramah anak. Dalam hal ini mereka menunjukan identitas mereka sebagai wilayah ramah anak kepada masyarakat luas. Dengan berbagai atribut yang melekat dalam identitas wilayah ramah anak, setiap masyarakat yang masuk ke wilayah RW 18 Leles ramah anak harus mentaati peraturan yang berlaku. Misalnya pemberlakuan penutupan akses jalan di sepanjang jalan Delima pada jam bermain anak-anak.

Kemudian di depan pintu masuk jalan Delima dari arah Terminal Condongcatur, terdapat banner yang bertuliskan Selamat Datang, slogan Semua Anak, Anak Kita, serta himbauan untuk mematikan mesin kendaraan saat akan melewati jalan Delima selama jam bermain Anak (15:30 - 17:00). Di dalam area bermain sendiri, terdapat berbagai mural dengan pesan edukasi untuk menjaga anak dari berbagai ancaman dan hak-hak mereka. Misalnya terdapat mural yang bertuliskan pesan 4 hak dasar anak - hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan hak partisipasi - di sekitar area bermain anak-anak.

Gambar 3.5
Mural 4 Hak Dasar Anak
Sumber: Dokumentasi Peneliti

Selain itu, pandemi membuat Satgas maupun masyarakat untuk memproduksi pesan baru, terutama pesan yang diperuntukan untuk menjaga kesehatan dan mematuhi protokol. Di sekitar pintu masuk menuju wilayah ramah anak, terdapat poster himbauan untuk mematuhi protokol yang berlaku selama pandemi. Dengan menggunakan poster bertuliskan "Kawasan Wajib Pakai Masker", Satgas PPA RW 18 Leles juga menyelipkan pesan anak-anak di bawah 18 tahun dibatasi menggunakan gawai dan pesan ajakan untuk menghentikan kekerasan pada perempuan dan anak.

Pesan ajakan untuk mematuhi protokol kesehatan selama pandemi terdapat di berbagai sudut wilayah, seperti di depan pintu masuk RW, tempat ibadah, taman bermain, diding sepanjang jalan desa dan lainnya. Media sangat menentukan tersampainya pesan yang disampaikan oleh Satgas PPA RW 18 Leles sebagai komunikator. Demi tersampainya pesan secara efektif, Satgas PPA RW 18 Leles menggunakan berbagai media yang dapat mereka manfaatkan.

Dari hasil observasi yang dilakukan, peneliti menemukan berbagai bentuk media yang dijadikan wadah penyampai pesan. Media tersebut

meliputi poster, banner, mural yang digambar di dinding taman bermain maupun di jalanan dan stiker yang ditempel di jendela rumah masyarakat. Media-media tersebut digunakan sebagai penyampai pesan agar masyarakat menjaga kenyamanan di wilayah ramah anak, sebagai identitas RW 18 Leles adalah kawasan ramah anak maupun sebagai media penyampai pesan agar masyarakat baik sekitar maupun pendatang untuk mematuhi protokol kesehatan yang berlaku di masa pandemi.

Gambar 3.6
Penggunaan Stiker Sebagai Media Komunikasi
Sumber: Dokumentasi Peneliti

Selain media-media tersebut, selama masa pandemi media komunikasi melalui gawai dan jaringan internet menjadi alternatif terbaik di masa ini. Namun, anggota Satgas PPA RW 18 Leles belum menggunakan media komunikasi virtual dengan maksimal, dan masih memilih pertemuan langsung dengan protokol kesehatan.

Orang tua, anak-anak dan perempuan menjadi komunikan dalam konteks penelitian ini. Peneliti membatasi penelitian pada ranah anak-anak agar penelitian tetap dapat fokus. Anak-anak menjadi fokus penelitian mengingat anak-anak menjadi kaum yang rentan dengan perkembangan teknologi dan dinamisnya perkembangan masyarakat kota yang rentan dengan kekerasan. Sebagai salah satu komunikan dalam program ini, orang tua dan anak diberikan berbagai program dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di RW 18 Leles Ramah Anak.

Rentang penerima manfaat di RW 18 Leles Ramah Anak berlangsung sejak ibu hamil. Ibu hamil diawasi dan diberikan pendampingan oleh kader Satgas PPA RW 18 Leles Ramah Anak yang dibantu dengan Posyandu, Puskesmas dan Rumah Sakit terdekat. Bentuk pendampingan yang terjadi adalah pengawasan ibu hamil, pemberian imunisasi pada anak, memberikan bantuan makanan penambah gizi kepada anak dan lain sebagainya. Setelah masa imunisasi pada anak sudah selesai, anak-anak kemudian diberikan kebebasan untuk bermain dan belajar di sekitar RW 18 Leles Ramah Anak dengan pendampingan dan pengawasan dari orang tua dan Satgas.

Pengawasan baik dari orang tua maupun Satgas di masa pandemi ini menjadi sesuatu yang wajib mengingat anak-anak belum memiliki kesadaran maupun kedisiplinan yang tinggi. Misalnya pada saat kegiatan belajar bahasa Inggris di taman bermain, anak-anak selalu diingatkan untuk mencuci tangan, menjaga jarak dan menggunakan masker dengan benar.

Dari kegiatan pemberdayaan yang berlangsung, komunikasi pemberdayaan tak lepas dari *feedback* atau timbal balik yang didapatkan oleh komunikator dari komunikan. Menurut Dewi, *feedback* adalah proses *mutual understanding* (MU) dalam kegiatan pemberian daya kepada penerima manfaat. Feedback ini yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh fasilitator guna mengevaluasi kegiatan yang sudah berlangsung.

Dalam kegiatan pemberdayaan di RW 18 Leles, Satgas PPA RW 18 Leles mendapat feedback dari masyarakat berupa apresiasi yang disampaikan langsung kepada Satgas PPA RW 18 Leles. Misalnya perubahan anak-anak yang awalnya lebih suka bermain gadget menjadi lebih suka bermain dengan sebayanya. Selain itu, feedback dari masyarakat yang sadar akan program ini juga dirasakan oleh Satgas PPA RW 18 Leles. Masyarakat yang sadar akan pentingnya program ini untuk anak-anak, mereka akan dengan sukarela menyiapkan dan mengusahakan kegiatan untuk anak-anak. Misalnya dalam kegiatan menari, masyarakat RW 18 Leles mendatangkan pembimbing dari luar RW dan secara swadaya memberikan upah kepada pembimbing tersebut.

B. Pembahasan

1. Fasilitator

Sebagai fasilitator Satgas PPA RW 18 Leles berkewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan pengaruh ataupun gagasan guna pengambilan keputusan yang dilakukan oleh masyarakat yang diberdayakan atau penerima manfaat. Penerima manfaat sendiri menurut Mardikanto (2019) bukanlah objek atau "sasaran tembak", penerima manfaat memiliki kedudukan yang sama dengan fasilitator, pemangku kepentingan maupun penentu kebijakan. Ini berarti penerima manfaat juga memiliki hak dan kebebasan untuk mengikuti ataupun menolak inovasi yang disampaikan oleh fasilitator. Disaat yang sama, penerima manfaat juga memiliki kebebasan dalam menawar dan ikut serta menentukan inovasi yang akan digunakan dalam kegiatan pemberdayaan (Mardikanto, 2019).

Satgas PPA RW 18 Leles adalah fasilitator swadaya yang berasal dari dalam lingkungan masyarakat RW 18 Leles. Fasilitator yang dimaksud disini adalah seseorang yang dengan kesadaran dirinya melihat masalah yang ada di lingkungan masyarakat untuk kemudian tergerak untuk melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat di lingkungannya. Sebagai agen perubahan yang berbentuk organisasi, Satgas PPA RW 18 Leles memiliki berbagai peran penting dalam masyarakat penerima manfaat. Mardikanto (2019) mengemukakan beberapa peran penting penyuluh dalam kegiatan pemberdayaan, adapun peran-peran tersebut adalah:

A. Peran Fasilitator

Satgas PPA RW 18 Leles memiliki tanggung jawab yang besar dalam keberlangsungan kegiatan RW 18 Leles Ramah Anak. Satgas PPA RW 18 Leles dituntut untuk dapat mengajak masyarakat penerima manfaat berperan aktif dalam setiap kegiatan di RW 18 Leles Ramah Anak, pengembangan inovasi, menentukan keputusan, pemantauan dan evaluasi serta berbagai kegiatan yang menunjang keberlangsungan program pemberdayaan di RW 18 Leles Ramah Anak.

Tidak hanya sebatas itu, Satgas PPA RW 18 Leles juga harus dapat menjalin hubungan dengan pemerintah dan pemangku kepentingan yang mendukung kegiatan Kawasan Ramah Anak guna

mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Satgas PPA RW 18 Leles juga harus dapat membangun jaringan dan bermitra dengan lembaga-lembaga yang berada disekitar RW 18 Leles maupun lembaga yang memiliki kepentingan serupa. Tanggung jawab ini sudah dilakukan dengan beragam upaya oleh Satgas PPA RW 18 Leles.

Sumarni menjelaskan bahwa Satgas PPA RW 18 Leles tidak benar-benar bekerja dengan sendiri. Satgas PPA RW 18 Leles memiliki divisi kemitraan yang bertugas untuk menjalin mitra dengan lembaga-lembaga yang berada di sekitar RW 18 Leles seperti sekolah, Polsek, Polda, Puskesmas dan Rumah Sakit. Divisi kemitraan ini kemudian akan menjalin hubungan baik dengan lembaga tersebut agar dapat membangun kerja sama dan agar mendapat bantuan terkait kesulitan yang dialami.

Sebagai sebuah kegiatan pemberdayaan yang memiliki beragam bidang yang harus dilaksanakan, Satgas PPA RW 18 Leles tidak dapat bekerja sendiri dan memerlukan bantuan dari luar yang disesuaikan dengan bidang yang dimaksud. Dalam bidang kesehatan misalnya, Satgas PPA RW 18 Leles harus dapat menjalin kemitraan dengan Puskesmas, Rumah Sakit ataupun lembaga terkait guna mendukung setiap kegiatan yang berlangsung. Hal ini akan sangat berguna ketika ada tindak kekerasan pada anak atau kebutuhan medis yang mendesak, Satgas PPA RW 18 Leles dapat lebih cepat dalam melakukan penanganan pertama.

Mardikanto (2019) menjelaskan ada beragam peran Fasilitator dalam kegiatan pemberdayaan. Adapun peran Satgas PPA RW 18 Leles sebagai fasilitator adalah sebagai berikut:

1. **Peran Edukasi**

   Satgas PPA RW 18 Leles mengemban tugas dalam memberikan arahan dan pengetahuan tentang program yang akan dilaksanakan kepada penerima manfaat. Satgas PPA RW 18 Leles harus dapat memposisikan diri setara dengan penerima manfaat namun proses belajar dalam kegiatan tetap berlangsung. Sehingga proses belajar yang dimaksud lebih kepada kegiatan

kolaborasi antara fasilitator dan penerima manfaat. Dalam hal ini, penerima manfaat juga diharapkan untuk berperan aktif/berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan dan terus belajar dan berproses bersama setiap elemen yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan.

Pada saat awal program pemberdayaan akan berlangsung, peran ini sangat penting dilakukan oleh Satgas PPA RW 18 Leles sebagai fasilitator guna mengedukasi masyarakat akan pentingnya melaksanakan kegiatan pemberdayaan kawasan layak anak. Memberikan pemahaman pada masa-masa awal kegiatan menjadi penting karena sangat menentukan bagaimana kegiatan ini kedepannya. Satgas PPA RW 18 Leles mengajak masyarakat untuk terlibat aktif/berpartisipasi dalam kegiatan ini dengan ajakan-ajakan dan memberikan pemahaman-pemahaman pentingnya program kawasan layak anak.

Ife (2008) menyebutkan beberapa hal yang mendorong partisipasi, diantaranya adalah: orang akan berpartisipasi jika mereka merasa suatu kegiatan penting untuk dilakukan, orang harus merasa bahwa aksi yang dilakukan menghasilkan perubahan, berbagai bentuk partisipasi harus diakui dan dihargai, setiap orang harus berpartisipasi dan didukung partisipasinya, dan struktur dan proses tidak boleh mengucilkan (Ife & Tesoriero, 2008).

Sumarni (2021) menceritakan ketika masyarakat paham akan pentingnya program ini dan bergabung, akan lebih mudah bagi Satgas PPA RW 18 Leles dalam memberikan pengarahan dan edukasi lainnya. Terlebih, jika banyak masyarakat yang sadar dan menjadi kesadaran kolektif kegiatan akan jauh lebih mudah dilakukan. Namun, untuk membangun kesadaran tersebut tidaklah mudah.

Satgas PPA RW 18 Leles terus berupaya untuk menanamkan pentingnya program ini kepada masyarakat dengan berbagai cara seperti ajakan, membuktikan dengan hasil,

menggunakan berbagai media komunikasi yang dapat dimanfaatkan seperti banner, mural, poster dan stiker, dan ajakan-ajakan lain yang mengedukasi masyarakat. Setelah 5 tahun berjalan, sudah banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya kegiatan ini dan hasil dari kolaborasi yang baik antara Satgas PPA RW 18 Leles dan masyarakat RW 18 Leles mampu mempertahankan kegiatan ini sampai sekarang.

2. Peran Diseminasi Inovasi

Satgas PPA RW 18 Leles bertugas dalam menyampaikan setiap informasi ataupun gagasan yang berkaitan kegiatan program kepada masyarakat penerima manfaat. Penyebaran informasi ini dilakukan dalam jangkauan seluas-luasnya, sehingga pemilihan media akan sangat menentukan keefektifan informasi. Satgas PPA RW 18 Leles menggunakan berbagai macam metode yang digunakan untuk menyebarkan informasi kepada penerima manfaat maupun masyarakat luas.

Indrayani dan Sumarni menceritakan salah satu cara dalam menyebarkan pesan dilakukan secara *door to door* ataupun dengan menggunakan metode lain seperti saat perkumpulan evaluasi, perkumpulan PKK, perkumpulan posyandu dan selama masa pandemi penggunaan Whatsapp sebagai media penyampai pesan meningkat.

Selain itu, sebelum pandemi masyarakat RW 18 selalu terlibat dalam event-event besar seperti perayaan hari raya, perayaan hari kemerdekaan, perayaan hari kartini dan lain sebagainya. Event-event seperti ini yang kemudian dimanfaatkan oleh Satgas PPA RW 18 Leles untuk menyebarkan pesan secara lisan.

Penyebaran informasi menjadi penting dalam kegiatan pemberdayaan di RW 18 Leles Ramah Anak. Informasi yang berguna dapat memberikan masyarakat ataupun fasilitator ide-ide baru dalam mengembangkan inovasi. Selain mengembangkan inovasi, informasi juga dapat memberikan wawasan baru kepada pihak yang terpapar informasi.

3. Peran Fasilitasi

Satgas PPA RW 18 Leles juga berperan untuk dapat memfasilitasi masyarakat penerima manfaat dalam artian Satgas PPA RW 18 Leles harus dapat memberikan kemudahan dan atau menunjukan sumber daya yang diperlukan oleh masyarakat RW 18 Leles dalam menjalankan Kawasan Ramah Anak. Masyarakat RW 18 Leles memiliki beragam sumber daya yang dapat mereka olah guna menunjang pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan mereka.

Satgas PPA RW 18 Leles akan berkolaborasi dengan masyarakat untuk memetakan sumber daya yang mereka miliki agar penggunaannya tepat sasaran dan efektif. Beberapa contoh fasilitas yang berhasil dimaksimalkan oleh Satgas PPA RW 18 Leles dan masyarakat RW 18 Leles adalah penggunaan gardu siskamling sebagai taman baca, taman bermain yang digunakan sebagai sarana bermain anak, tempat belajar anak sekaligus tempat kumpulan Satgas PPA RW 18 Leles dan masyarakat RW 18 Leles, penggunaan halaman rumah milik warga yang luas sebagai tempat posyandu, penutupan jalan Delima dari kendaraan bermotor selama jam bermain anak dan lain sebagainya.

Pengadaan kegiatan selepas sekolah juga tak lepas dari hasil partisipasi aktif antara Satgas PPA RW 18 Leles dan masyarakat RW 18 Leles. Satgas PPA RW 18 Leles dan masyarakat RW 18 Leles memaksimalkan taman bermain sebagai tempat kegiatan belajar bahasa inggris, menari dan komputer. Mereka sudah memiliki tempat yang cukup dan hanya memerlukan pendamping atau guru untuk mendampingi anak-anak selama proses belajar. Hal ini terpenuhi oleh masyarakat yang sadar dengan pentingnya program ini dan berinisiatif untuk menanggung upah pendamping anak-anak belajar.

Peran fasilitasi juga nampak ketika Satgas PPA RW 18 Leles, masyarakat RW 18 Leles dan mahasiswa bergotong royong dalam membangun lapangan volley. Selain fasilitasi

yang sifatnya fisik, Satgas PPA RW 18 Leles juga berperan dalam menunjukan sumber daya yang sifatnya membangun jejaring atau kemitraan. Contoh kemitraan yang dibangun oleh Satgas PPA RW 18 Leles adalah membangun mitra dengan pemerintah, Puskesmas, Rumah Sakit, Polsek ataupun dengan pemuda setempat.

Dari kegiatan membangun mitra tersebut, Satgas PPA RW 18 Leles dapat memanfaatkan potensi pemuda lokal yang memiliki jiwa seni. Satgas PPA RW 18 Leles kemudian memfasilitasi mereka untuk berkreasi dengan membuat mural di sekitar RW 18 Leles. Hasil karya mural ini yang kemudian dapat mempercantik suasana di RW 18 Leles.

4. Peran Konsultasi

Memberikan ruang konsultasi kepada penerima manfaat guna memecahkan masalah yang sedang terjadi juga menjadi tanggung jawab Satgas PPA RW 18 Leles sebagai fasilitator. Hal ini Satgas PPA RW 18 Leles berperan untuk mendengarkan dan merumuskan masalah yang sedang dihadapi, memberikan alternatif-alternatif solusi yang dapat digunakan dan membantu dalam pengambilan keputusan. Satgas PPA RW 18 Leles memberikan ruang konsultasi tersebut kepada pihak-pihak yang berkompeten di bidangnya.

Pihak-pihak yang dimaksud adalah lembaga yang sudah menjalin kerja sama dengan Satgas PPA RW 18 Leles. Hal ini membuat Satgas PPA RW 18 Leles tidak bekerja sendirian dan memiliki ruang konsultasi yang sesuai dengan bidangnya. Misalnya dalam hal kesehatan ibu dan anak, Satgas PPA RW 18 Leles menyediakan Posyandu dan memberikan ruang untuk setiap masyarakat penerima manfaat berkonsultasi perihal kesehatan ibu dan anak. Selain itu juga terdapat lembaga pemerintah yang dikenal dengan UPTD-PPA. Fungsi dan tugas lembaga ini adalah untuk menindak laporan dari Satgas PPA RW 18 Leles tentang suatu kejadian yg genting.

Sumarni menceritakan di RW 18 Leles pernah terjadi kasus tindak pidana yang melibatkan anak-anak. Tindakan tersebut adalah pelecehan seksual yang terjadi di RW 18 Leles. Kemudian orang tua anak melaporkan kejadian ini kepada Satgas PPA RW 18 Leles untuk ditindak lebih lanjut. Karena ini termasuk dalam ranah hukum, Satgas PPA RW 18 Leles menyerahkan kasus ini ke pihak yang berwajib dan tetap didampingi oleh UPTD-PPA.

Satgas PPA RW 18 Leles memberikan ruang konsultasi kepada orang tua korban dengan memberikan akses kepada UPTD-PPA dan kepolisian guna menyelesaikan kasus yang menimpa mereka. Sedangkan untuk korban, Satgas PPA RW 18 Leles memberikan akses dan ruang konsultasi sesuai dengan yang dibutuhkan korban, seperti akses ke rumah sakit dan ke psikolog untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

5. Peran Advokasi

Peran Satgas PPA RW 18 Leles selanjutnya adalah untuk memberikan bantuan yang kaitannya pengambilan keputusan kebijakan yang berpihak pada masyarakat RW 18 Leles sebagai penerima manfaat. Sebagai fasilitator, Satgas PPA RW 18 Leles harus berpihak kepada masyarakat RW 18 Leles sebagai penerima manfaat dan dapat memberikan *win-win solution* jika pengambilan keputusan menyangkut kepentingan banyak pihak.

Hal ini nampak dilakukan oleh Satgas PPA RW 18 Leles selama masa pandemi yang tetap mengikuti arahan dari pemerintah tentang penanggulangan kasus COVID-19 di Yogyakarta. Satgas PPA RW 18 Leles mengambil tindakan untuk tetap melaksanakan beberapa kegiatan dengan mematuhi protokol yang berlaku seperti mencuci tangan, menjaga jarak dan tetap menggunakan masker selama kegiatan berlangsung. Selain itu, Satgas PPA RW 18 Leles juga bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan karantina warga yang terkonfirmasi COVID-19. Indarti menceritakan perihal mahasiswa yang terkonfirmasi COVID-19 dan diharuskan

karantina mandiri, Satgas PPA RW 18 Leles dan masyarakat sekitar kemudian membantu mereka dengan memberikan sembako harian.

Lebih lanjut, untuk pengambilan keputusan sendiri tidak dilakukan sebatas pada Satgas PPA RW 18 Leles saja. Masyarakat dan pemangku kepentingan juga dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut kegiatan mereka. Satgas PPA RW 18 Leles menerapkan konsep musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan yang penting. Musyawarah akan sangat membantu Satgas PPA RW 18 Leles dan masyarakat RW 18 Leles untuk merumuskan masalah, memetakan opsi yang ada, dan mengambil keputusan terbaik dari opsi yang dijabarkan dalam proses musyawarah.

6. Peran Supervisi

Satgas PPA RW 18 Leles juga berperan sebagai penyelia pelaksanaan kegiatan advokasi dan kegiatan pemberdayaan yang terjadi di RW 18 Leles Ramah Anak. Penyelia yang dimaksudkan di sini adalah sebagai pengarah dalam setiap kegiatan agar kegiatan yang berlangsung tetap sesuai dengan rumusan program kerja yang mereka miliki. Satgas PPA RW 18 Leles sendiri sudah memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga atau AD/ART yang dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan program kerja.

Pengawasan yang dilakukan oleh Satgas PPA RW 18 Leles didasarkan kepada AD/ART yang sudah disusun. Setiap pengambilan keputusan maupun untuk pengambilan tindakan penting dalam pelaksanaan program, Satgas PPA RW 18 Leles harus berpegang teguh kepada AD/ART dan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang sudah disusun.

Sebagai fasilitator yang berperan sebagai penggerak, Satgas PPA RW 18 Leles harus dapat menggerakan masyarakat RW 18 Leles dan membangkitkan semangat untuk dapat bergerak maju secara kolektif. Satgas PPA RW 18 Leles harus dapat membangun kesadaran kolektif dengan berbagai kegiatan yang

sesuai dengan program Kawasan Ramah Anak. Setelah masyarakat sudah memiliki kesadaran kolektif akan pentingnya program ini, mereka akan bergerak dengan sendirinya dengan tetap didampingi oleh Satgas PPA RW 18 Leles sebagai fasilitator.

Hal ini sudah dilakukan oleh Satgas PPA RW 18 Leles untuk mengajak masyarakat RW 18 Leles untuk dapat berperan aktif dalam menyukseskan Kawasan Ramah Anak di RW mereka. Peran supervisi dari Satgas PPA RW 18 Leles dituntut untuk aktif dalam mengarahkan masyarakat RW 18 Leles pada masa awal program dan keberlanjutan program untuk tetap berjalan. Peran ini bertujuan agar setelah Satgas PPA RW 18 Leles berhasil mengarahkan dan menggerakan masyarakat RW 18 Leles mereka dapat dengan mandiri melanjutkan program Kawasan Ramah Anak. Selanjutnya peran supervisi Satgas PPA RW 18 Leles harus tetap dijaga dan juga Satgas PPA RW 18 Leles berperan untuk dapat mengawasi setiap program yang sedang berjalan agar sesuai dengan harapan.

7. Peran Pemantauan dan Evaluasi

Peran terakhir yang diemban oleh Satgas PPA RW 18 Leles sebagai fasilitator adalah peran pemantauan dan evaluasi. Peran ini bertujuan untuk mengamati, mengukur dan menilai proses dan hasil kegiatan pemberdayaan yang sedang ataupun sudah dilakukan. Pengamatan ini dapat dilakukan oleh fasilitator dan penerima manfaat dengan berbagai metode yang disesuaikan dengan kondisi lapangan. Program yang dievaluasi harus dinilai apakah program ini layak, efektif atau butuh pengembangan. Setelah suatu program dievaluasi, fasilitator dan penerima manfaat akan memutuskan apakah program akan dilanjutkan, dilanjutkan dengan modifikasi, atau dihentikan.

Satgas PPA RW 18 Leles melakukan pemantauan program dengan terjun langsung ke lapangan, mengingat anggota Satgas PPA RW 18 Leles juga termasuk ke dalam masyarakat RW 18 Leles. Kemudian mereka melakukan

evaluasi yang diadakan di akhir tahun. Sumarni (2021) menceritakan Satgas PPA RW 18 Leles menyelenggarakan evaluasi akhir tahun untuk meninjau kembali apa saja kegiatan yang sudah mereka lakukan. Program yang sudah terlaksana kemudian ditinjau ulang, apakah program tersebut berjalan efektif dan sesuai rencana atau tidak. Selain itu, pertemuan tersebut juga membahas program kerja yang belum terlaksana agar kemudian dapat terlaksana di periode berikutnya. Sedangkan untuk evaluasi dalam rentang waktu bulanan, Satgas PPA RW 18 Leles melakukannya selepas Satgas PPA RW 18 Leles melaksanakan event-event atau saat sharing di pertemuan-pertemuan seperti pertemuan pelatihan, pertemuan dengan mahasiswa KKN, pertemuan PKK dan lain sebagainya.

Lebih lanjut, Sumarni menjelaskan bahwa dalam pertemuan evaluasi tersebut Satgas PPA RW 18 Leles lebih banyak membahas perihal hambatan kemudian merumuskan alternatif solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan hambatan tersebut. Sumarni juga menuturkan tentang salah satu hambatan terbesar selama program ini berjalan adalah anggaran.

Untuk menjelaskan partisipasi aktif masyarakat di RW 18 Leles Ramah Anak, peneliti menambahkan gagasan yang dikemukakan oleh Melkote dan Steeves. Bentuk partisipasi aktif masyarakat di RW 18 Leles tak lepas dari peran Satgas PPA RW 18 Leles Ramah Anak yang menjembatani pengetahuan tentang konvensi hak anak kepada masyarakat serta memberikan arahan secara kolaboratif untuk merumuskan program RW 18 Leles Ramah Anak. Masyarakat yang sadar dengan pentingnya hak anak dan kebermanfaatan program ini memiliki inisiatif yang tinggi untuk berpatsipasi aktif.

> “Kalau dulu kan memang menginisiasi dari ee apa, mengedukasi, menanamkan bahwa ini lo ramah anak itu apasih? Kemudian nanti seperti apa, tujuannya, kemudian manfaatnya, mengapa kita perlu mengembangkan ini di kampung kita, kan jadi lebih pada membangun mindset dulu kan mas? Awal-awalnya itu, jadi kan ketika mereka sudah memiliki mindset yang

sama seperti yang kita harapkan “yok kita bergerak bersama mau?” “mau mau mau bu, mau mau” yaudah kalau mau, kita bikin SK blablabla dan sebagainya. Terus setelah kita menyandang predikat sebagai satgas ditetapkan dengan keputusan kepala desa, maka kita harus punya rencana kerja, kita punya program kerja, yok kita ketemu membahas program kerja itu. Nah, setelah kita punya program kerja, agar kita kerjanya lebih terarah dan sebagainya, yok kita nyusun SOP, kita nyusun SOP.”

Lebih lanjut Sumarni menjelaskan

“Betul, itu yang paling pokok, yang paling pokok adalah swadaya masyarakat dari anggota itu. Kemudian kalau dari pemerintah itu kan ya, hanya support sesekali. Karena tidak selalu ada juga dan membutuhkan itu kan semua desa. Jadi ada skala prioritasnya.”

Partisipasi masyarakat saat merumuskan program juga diperkuat dengan wawancara berikut:

“Kalau saya boleh jawab itu kita pikir bersama-sama. Kembali itu ke masyarakat, jadi ada yang mencetuskan “baiknya bapak ibu kita bikin gini” gitu-gitu ada. Tapi kan tetep nanti itu menjadi karya bersama to mas? -..... Kalau di saya itu kan, nganu yaa...eeee setiap pertemuan itu pasti diminta menyampaikan, apa yang terupdate, kan gitu. Nahh saya bisanya disitu menjadi jembatan untuk membuka wawasan, “ini loh bapak-ibu, yang belum ada di kita itu ini”. Penting nggak bagi kita? Kalau penting yaudah yuk kita rencanakan.”

“Kan pemberdayaan itu tadi, kita memberdayakan ya tidak pure yang diberdayakan para satgasnya, tapi juga masyarakat bagian dari partisipasi. Yang punya keahlian apa ya ayuk, seperti yang tadi bahasa inggris dan sebagainya kan juga pemberdayaan. Kalau sudah ada yang ahli itu, kenapa tidak? Daripada kita nyari guru dari luar bayar.”

Lebih lengkap lagi Sumarni menceritakan

“Kebetulan kalau nari dari luar. Tapi kontribusinya dari swadaya masyarakat. Nah contohnya itu, ketika masyarakat itu sadar bahwa program itu penting untuk anak kita maka nggak akan sulit. Kita tetep narinya terus ada yang bayarin. Itu juga narinya bukan untuk anaknya dia, tapi juga untuk semua anak disitu. Gurunya dia yang

bayarin…..” (Sumarni, Fasilitator, Wawancara 16 Februari 2021).

Dari data wawancara tersebut dapat disimpulkan Satgas PPA RW 18 Leles bersama masyarakat melaksanakan program ini dengan menerapkan skema partisipasi aktif. Dimana masyarakat memiliki kemampuan atau daya untuk ikut mempengaruhi keputusan-keputusan dalam program untuk kehidupan mereka. Peran Satgas PPA RW 18 Leles sebagai fasilitator sangat vital. Mereka bertanggung jawab untuk menanamkan pemahaman konvensi hak anak dan pentingnya program ini serta memastikan masyarakat berdaya dengan berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Bentuk partisipasi dari masyarakat dalam program ini seperti pengadaan dana secara swadaya untuk kebutuhan program, ikut terlibat dalam kegiatan belajar mengajar anak-anak dan menyuarakan keputusan terkait pengembangan program. Sumarni juga menekankan meskipun program ini milik pemerintah, namun penerapannya diserahkan kepada kearifan lokal di masing-masing daerah.

2. Kualifikasi Fasilitator

Menjadi penggerak dalam roda-roda pemberdayaan, anggota Satgas PPA RW 18 Leles harus memenuhi beberapa hal untuk menjadi fasilitator. Menurut Berlo (1960) dalam Mardikanto (2019) setidaknya ada 4 karakteristik yang harus dipenuhi oleh seseorang atau kelompok guna menjadi fasilitator. Adapun kualifikasi yang dimaksud adalah:

1. Kemampuan Berkomunikasi

Agar gagasan dan inovasi dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat penerima manfaat, Satgas PPA RW 18 Leles sebagai fasilitator harus memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik. Kemampuan berkomunikasi ini tidak hanya sebatas pada kemampuan berbicara di depan masyarakat RW 18 Leles sebagai penerima manfaat ataupun di depan khalayak yang lebih luas. Kemampuan berkomunikasi di sini juga meliputi kemampuan Satgas PPA RW 18 Leles dalam memilih media komunikasi tepat dan efektif yang akan mereka gunakan selama program pemberdayaan, menentukan teknik pemberdayaan masyarakat yang

sesuai dengan kondisi masyarakat di RW 18 Leles, memilih alat peraga yang akan digunakan dalam kegiatan, namun lebih penting lagi, seorang fasilitator harus memiliki kemampuan untuk berempati dan berinteraksi dengan masyarakat yang akan diberdayakan.

Kemampuan berkomunikasi ini tidak hanya sekedar dibebankan kepada Satgas PPA RW 18 Leles. Pemerintah sebagai pemangku kepentingan juga ikut andil dalam memastikan setiap fasilitator Kawasan Ramah Anak dapat menyampaikan gagasan mereka di hadapan penerima manfaat. Kontribusi yang dilakukan oleh pemerintah dalam memastikan Satgas PPA RW 18 Leles memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik adalah dengan memberikan mereka pelatihan *public speaking*. Hal ini bertujuan agar Satgas PPA RW 18 Leles dapat menyampaikan gagasan mereka dengan lebih sistematis dan dapat diterima oleh masyarakat RW 18 Leles.

Lebih lanjut, dalam budaya masyarakat desa dikenal istilah tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat ini diasumsikan memiliki pengetahuan dan wawasan lebih. Selain itu, tokoh masyarakat ini memiliki potensi dalam mempengaruhi masyarakat lain. Sehingga mereka dianggap sebagai orang kunci (*key people*) (Soetomo, 2018). Dalam kegiatan pemberdayaan di Leles, beberapa tokoh masyarakat seperti ketua RT, ketua RW, kepolisian dll masuk dalam struktur kelembagaan Satgas PPA RW 18 Leles Ramah Anak. Hal ini menjadi potensi dalam kualifikasi fasilitator guna menyampaikan gagasan dengan efektif. Selain kemampuan berkomunikasi, pemilihan media komunikasi yang digunakan oleh Satgas PPA RW 18 Leles juga akan sangat mempengaruhi keberhasilan program pemberdayaan

Salah satu program kerja Satgas PPA RW 18 Leles adalah memastikan setiap anak di kawasan RW 18 Leles mendapatkan hak belajar di jam belajar yang sudah ditentukan. Satgas PPA RW 18 Leles melakukan sidak dari rumah ke rumah untuk melihat langsung apakah orang tua memberikan hak belajar kepada anak mereka. Jika orang tua didapati tidak memberikan hak anak dengan mendampingi

mereka, Satgas PPA RW 18 Leles akan mengingatkan kembali orang tua tersebut.

Secara garis besar Satgas PPA RW 18 Leles lebih banyak menggunakan media komunikasi yang nampak secara fisik seperti banner, stiker, baliho dan mural untuk menyampaikan pesan-pesan pemberdayaan Kawasan Ramah Anak juga sebagai atribut wajah RW 18 Leles adalah Kawasan Ramah Anak. Media-media ini terpasang di setiap sudut wilayah RW 18. Di masa pandemi ini, penggunaan media berupa poster, mural dan banner juga dimaksimalkan oleh Satgas PPA RW 18 Leles.

Media-media tersebut digunakan untuk memperingatkan setiap masyarakat yang tinggal dan berkunjung ke RW 18 Leles untuk mematuhi protokol kesehatan yang berlaku seperti "kawasan wajib masker", rajin mencuci tangan, menjaga jarak, menjaga kesehatan dan lain sebagainya. Masa pandemi juga mengubah beberapa kegiatan pemberdayaan di Leles, seperti pertemuan tatap muka yang terbatas untuk mematuhi himbauan dari pemerintah. Hanya saja, peneliti belum melihat penggunaan media virtual yang dimanfaat secara maksimal oleh anggota PPA RW 18 Leles.

2. Sikap Fasilitator

Selanjutnya Berlo (1960) dalam Mardikanto (2019) menjelaskan bahwa fasilitator harus memiliki sikap yang bangga dengan tugasnya sebagai seorang fasilitator. Satgas PPA RW 18 Leles diharapkan dapat sepenuh hati dalam menjalankan tugasnya dan bangga dengan profesinya sebagai fasilitator. Selama kerja lapangan, peneliti melihat beberapa anggota Satgas PPA RW 18 Leles terlihat antusias dan bangga dengan kehadiran beberapa mahasiswa yang datang untuk KKN dan kerja lapangan untuk data penelitian mereka.

Satgas PPA RW 18 Leles sebaiknya juga menyadari bahwa kehadiran mereka sangat dibutuhkan dalam kegiatan membangan RW 18 Leles sebagai Kawasan Ramah Anak. Hal ini terlihat dengan seringnya keterlibatan anggota Satgas PPA RW 18 Leles dalam setiap kegiatan, baik itu kegiatan resmi maupun non resmi yang ada

di RW 18 Leles Ramah Anak. Kegiatan-kegiatan tersebut seperti pengawasan anak bermain di taman bermain, pengawasan bimbingan belajar anak di taman bermain, pembangunan lapangan volly, pengawasan posyandu, pertemuan warga, Satgas PPA RW 18 Leles dan mahasiswa, pertemuan rutin anggota Satgas PPA RW 18 Leles dan lain sebagainya.

Seperti halnya dengan kualifikasi fasilitator dalam kemampuan berbicara, Satgas PPA RW 18 Leles juga harus yakin dengan ide inovasi yang mereka serta dapat meyakini masyarakat penerima manfaat bahwa ide inovasi tersebut memiliki peluang berhasil jika dilaksanakan dalam masyarakat yang diberdayakan, memberikan keuntungan dan tidak bertentangan dengan nilai moral dan sosial yang berlaku, serta Satgas PPA RW 18 Leles harus dapat meyakini bahwa inovasi yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Berlo, 1960 dalam Mardikanto 2019).

3. Kemampuan Pengetahuan Fasilitator

Kemampuan selanjutnya yang harus dikuasai oleh anggota Satgas PPA RW 18 Leles sebagai fasilitator adalah pengetahuan fasilitator tentang isi, fungsi, manfaat, dan nilai-nilai yang terkandung dalam inovasi yang disampaikan dan akan diterapkan, baik dari sudut pandangan praktis maupun kontekstual. Kemampuan ini penting dikuasai oleh setiap anggota Satgas PPA RW 18 Leles agar dapat meyakinkan masyarakat RW 18 Leles sebagai penerima manfaat dan guna menjalankan program pemberdayaan dengan baik.

Pengetahuan Satgas PPA RW 18 Leles tentang konsep Kawasan Ramah Anak tak lepas dari kontribusi pemerintah yang memberikan pelatihan-pelatihan terkait Kawasan Ramah Anak. Untuk membangun Kawasan Ramah Anak, Sumarni menjelaskan Satgas PPA RW 18 Leles sebagai fasilitator harus paham dengan konvensi hak anak, apa yang harus dilakukan agar hak anak terpenuhi dan melindungi anak ketika mendapat ancaman. Kegiatan pemberdayaan akan menjadi tidak menentu jika Satgas PPA RW 18 Leles sebagai fasilitator namun tidak mengerti nilai-nilai yang harus dipegang dalam memberdayakan Kawasan Ramah Anak.

Selain itu, pengetahuan tentang nilai-nilai program terkait Satgas PPA RW 18 Leles juga harus memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang latar belakang sosial, budaya dan ekonomi masyarakat RW 18 Leles sebagai penerima manfaat. Latar belakang tersebut termasuk di dalamnya perilaku masyarakat, nilai dan moral yang berlaku,keadaan alam, kebutuhan yang diperlukan masyarakat

Segala hal yang menyebabkan masyarakat suka atau tidak menginginkan terjadinya perubahan maupun segala sesuatu yang menjadi sebab masyarakat dalam menerima dan menerapkan inovasi dalam jangka waktu cepat ataupun lambat.

Mengetahui karakteristik masyarakat RW 18 Leles sebagai penerima manfaat akan sangat membantu Satgas PPA RW 18 Leles dalam menentukan program kerja yang sesuai dengan nilai dan moral yang berlaku, menentukan alat peraga untuk program pemberdayaan, menentukan media komunikasi dan metode komunikasi yang efektif dengan kondisi lapangan dan lain sebagainya. Proses menganalisis kondisi lapangan, nilai sosial-budaya dan kebutuhan masyarakat RW 18 Leles sebagai penerima manfaat harus dilakukan sejak awal program akan dirancang.

Fortunati (2014) menyatakan bahwa untuk memulai proses pemberdayaan, suatu individu atau kelompok harus dapat mengukur dirinya dan pengetahuannya serta mengetahui apa yang mereka butuhkan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Sehingga, proses pemberdayaan dari suatu anggota kelompok masyarakat dengan anggota kelompok masyarakat yang lain akan berbeda metode. Sumarni juga menekankan meskipun program Kawasan Ramah Anak adalah program milik pemerintah, namun pelaksanaannya diserahkan seluruhnya kepada Satgas di masing-masing wilayah.

4. Karakteristik Sosial-Budaya Fasilitator

Setelah fasilitator memenuhi ketiga kualifikasi: kemampuan berkomunikasi, sikap fasilitator dan kemampuan fasilitator tentang program pemberdayaan dan kondisi masyarakat yang akan diberdayakan, kualifikasi selanjutnya menurut Mardikanto (2019)

adalah karakteristik sosial-budaya dari fasilitator itu sendiri. Dalam praktek dilapangan, standar kualifikasi seorang fasilitator tidak cukup dengan persyaratan keterampilan, sikap dan pengetahuan saja, tetapi keadaan latar belakang (suku, bahasa, agama, kebiasaan) seorang fasilitator juga seringkali menentukan keberhasilan program yang dilaksanakan.

Sederhananya, semakin mirip latar belakang fasilitator dengan penerima manfaat, proses penyampaian inovasi dalam mengajak masyarakat penerima manfaat untuk memperbaiki hidup mereka dan proses pemberdayaan akan lebih mudah dilaksanakan. Hal ini terlihat dengan jelas dalam praktik di lapangan. Keseluruhan anggota Satgas PPA RW 18 Leles berasal dari dalam masyarakat RW 18 Leles. Selain itu, Sumarni sebagai anggota Satgas PPA RW 18 Leles sekaligus fasilitator Kawasan Ramah Anak dari lembaga pemerintahan juga berasal dari RW 18 Leles. Hal ini sangat mempermudah Sumarni dan kawan-kawan dalam mengenali kondisi lapangan di RW 18 Leles. Dan juga masyarakat RW 18 Leles lebih mudah menerima kedatangan dan usul dari mereka mengingat anggota Satgas PPA RW 18 Leles masih berasal dari satu Rukun Warga.

3. Perubahan Selama Pandemi

Sejak kasus pertama Corona dilaporkan di Indonesia, pemerintah memberlakukan *lockdown* di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini membuat berbagai perubahan baru dalam kegiatan sehari-hari. Mobilitas masyarakat yang biasanya bebas menjadi sangat terbatas mengingat tujuan *lockdown* adalah untuk menahan penyebaran virus dengan membatasi kegiatan masyarakat. Tempat ibadah, pasar, kegiatan sosial dan kebudayaan, pusat perbelanjaan/*mal* ditutup sementara. Selain itu, protokol ketat juga diberlakukan sebagai bagian dari *lockdown*.

Hal tersebut juga berdampak pada kegiatan pemberdayaan di RW 18 Leles. Perubahan-perubahan tersebut nampak saat memasuki wilayah RW 18 Leles. Terdapat berbagai poster, banner dan bentuk media komunikasi lainnya yang mengajak masyarakat untuk waspada dan mematuhi protokol

yang berlaku seperti menggunakan masker, menjaga jarak saat bersosial, menjaga kesehatan dan rajin mencuci tangan. RW 18 Leles juga menyediakan sabun dan tempat cuci tangan di berbagai titik sebagai usaha untuk mencegah penularan corona di wilayah mereka.

Gambar 3.7
Banner Kawasan Wajib Masker di RW 18 Leles
Sumber: Dokumentasi Peneliti

> "Karena PSBB kan udah mau mulai lagi kegiatan kita di mulai tanggal 11 kemaren karena mengajar komputer kan hari senin dan selasa, nah mulai hari senin tanggal 11 tu baru mau kita mulai senin selasa, hari kamis bahasa inggris jumat menari. Tapi kok ada pengumuman tanggal 11 PSBB kita sampaikan ke AMIKOM, kata AMIKOM "kalau saya nderek ibu aja, kita manut aja kalau memang disitu ada pembatasan kami libur dulu juga ngga papa" - "sebentar mas, saya usulkan dulu ke pengurus satgas semuanya, hasil dari masukan satgas yaudah kita libur dulu aja. Kita juga dari satgas istilahnya ikut pemerintahlah, pemerintah menganjurkan seperti apa, nanti nda malah kena sanksi. Kita tidak tau apa-apa, taunya kita kan hanya ingin berbuat baik, ternyata kan keliru salah nanti malah dapet teguran atau apa jadi yaa sementara ya sudah kita liburkan dulu. Kalau anak-anak yang dari sadar kan memang tidak bersosialisasi dengan anak-anak, 1-2 mungkin hanya datang kerumah si A si B si C ngga lama, mungkin hanya 2 jam 1 setengah jam, jadi kita persilahkan ----- intinya kalau anak sadar boleh kerumah masing-masing anak karena ada pengawasan dari orang tua ---- misalnya anak dari sadar datang ke rumah saya, ngajari anak saya, kan saya ada di rumah jadi saya bisa ikut mengawasi seperti itu." (Sumarni, Fasilitator, Wawancara 16 Februari 2021).

Indrayani menceritakan bahwa Satgas PPA RW 18 Leles juga mematuhi peraturan pemerintah yang berlaku guna menghindari hal buruk maupun sanksi dari pemerintah. Saat pemerintah memberlakukan PSBB/*Lockdown* kegiatan di Leles juga akan dihentikan guna menahan penyebaran virus. Kegiatan yang dimaksud seperti posyandu, pertemuan-pertemuan, event-event, kegiatan belajar les, TPA, dan lain sebagainya. Lebih lanjut, setelah kegiatan boleh dilaksanakan, Satgas PPA RW 18 Leles juga mematuhi protokol kesehatan yang berlaku atau dengan menerapkan *new normal*.

Gambar 3.8
Pengecekan Suhu dan Penyediaan Tempat Cuci Tangan di Posyandu
Sumber: Dokumentasi Peneliti

Namun, penerapan *new normal* masih belum maksimal. Anak-anak saat kegiatan belajar sesekali melepas masker mereka. Disini tugas Satgas PPA RW 18 Leles untuk mengingatkan anak-anak agar selalu menjaga protokol kesehatan yang berlaku.

Gambar 3.9
Foto Bersama Setelah Les Komputer dengan AMIKOM
Sumber: Dokumentasi AMIKOM

Adapun pergeseran sistem pertemuan seperti rapat maupun pertemuan lainnya dari luring menjadi daring masih belum dimaksimalkan. Satgas PPA RW 18 Leles sekedar menggunakan media pesan singkat WhatsApp sebagai media komunikasi dan untuk memantau berbagai kondisi yang terjadi di RW 18 Leles dan memaksimalkan pertemuan langsung dengan mematuhi protokol yang berlaku.

BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan

Pemberdayaan kawasan ramah anak yang dilakukan di RW 18 Leles menjadi pemberdayaan kawasan ramah anak pada wilayah terkecil, yakni dalam lingkup Rukun Warga (RW). Kegiatan ini adalah kegiatan yang menjadikan RW 18 Leles kawasan yang ramah dengan anak-anak dan pemenuhan atas hak mereka berdasarkan Peraturan Bupati Sleman No: 12 tahun 2018, tentang kabupaten layak anak. Kegiatan ini berusaha memenuhi 5 indikator pemenuhan hak yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sleman No: 12 tahun 2018, yakni: hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan perlindungan khusus.

Pemberdayaan ini dilakukan oleh fasilitator yang dikenal dengan Satgas PPA RW 18 Leles. Satgas PPA RW 18 Leles adalah organisasi yang anggotanya berasal dari dalam masyarakat RW 18 Leles itu sendiri. Dimana fokus penelitian ini adalah untuk membahas peran Satgas PPA RW 18 Leles selama masa pandemi, adapun peran yang dilakukan oleh Satgas PPA RW 18 Leles adalah sebagai berikut: **Peran Edukasi,** dengan memberikan arahan, pemahaman dan informasi tentang pentingnya untuk melaksanakan program ini. Dalam peran ini fasilitator dan penerima manfaat diposisikan sejajar sehingga menitikberatkan pada kolaborasi dan partisipasi aktif dari masyarakat penerima manfaat.

Peran Diseminasi Inovasi, Menyebarkan informasi terkait program pemberdayaan kepada masyarakat secara seluas-luasnya. Hal ini dilakukan oleh Satgas PPA RW 18 Leles dengan menggunakan berbagai metode seperti mural, banner, stiker, poster, dalam pertemuan-pertemuan maupun event dan lain-lain.

Peran Fasilitasi, Menyediakan dan mengarahkan masyarakat penerima manfaat untuk memaksimalkan sumber daya yang ada guna menunjang dan mempermudah kegiatan pemberdayaan yang berlangsung. Contoh nyata yang dilakukan oleh Satgas PPA RW 18 Leles dan masyarakat Leles adalah dengan menggunakan gardu siskamling sebagai taman baca, gotong royong membangun lapangan voli, dan menggunakan halaman rumah warga yang luas sebagai posyandu.

Peran Konsultasi, Memberikan ruang kepada masyarakat penerima manfaat guna pemecahan masalah yang dihadapi. Misalnya kejadian tindak pidana yang pernah terjadi di Leles, Satgas PPA RW 18 Leles memberikan ruang konsultasi kepada pihak-pihak terkait seperti rumah sakit, kepolisian, dan psikologi.

Peran Advokasi, Tak jarang kegiatan pemberdayaan mengalami hambatan dan pemangku kepentingan harus segera mengambil keputusan. Peran Satgas PPA RW 18 Leles adalah kaitannya dengan pengambilan keputusan tersebut. Satgas PPA RW 18 Leles menggunakan musyawarah sebagai sarana untuk menentukan dan mengambil keputusan. Misalnya keputusan Satgas PPA RW 18 Leles yang sepakat untuk menghentikan kegiatan selama *lockdown* yang diberlakukan oleh pemerintah.

Peran Supervisi, Sebagai penyelia, Satgas PPA RW 18 Leles berperan untuk mengarahkan kegiatan pemberdayaan agar tetap pada koridornya. Hal ini dilakukan oleh Satgas PPA RW 18 Leles dengan membuat SOP dan AD/ART. SOP dan AD/ART ini yang kemudian menjadi acuan agar kegiatan tetap berjalan sesuai dengan koridor.

Peran Pemantauan dan Evaluasi, Meninjau kembali kegiatan apa saja yang sudah dilakukan, kegiatan sudah dilakukan namun belum maksimal, dan kegiatan yang belum berhasil dilakukan. Merumuskan berbagai kendala yang menerpa kegiatan. Peran ini dilakukan oleh Satgas PPA RW 18 Leles dan masyarakat penerima manfaat setiap bulan dan tahun.

Selain itu peran-peran yang dijelaskan menurut gagasan Mardikanto, peran fasilitator (DCS) menurut Melkote dan Steeves (2008) peneliti tambahkan guna menjelaskan partisipasi aktif warga. Partisipasi aktif warga meliputi: pengadaan dana secara swadaya untuk kebutuhan program, ikut terlibat dalam kegiatan belajar mengajar anak-anak dan menyuarakan keputusan terkait pengembangan program dan sebagainya.

Satgas PPA RW 18 Leles memiliki peran yang sangat vital, oleh karena itu diperlukan beberapa kualifikasi yang harus dipenuhi, kualifikasi tersebut adalah: **Kemampuan Berkomunikasi,** mencangkup kemampuan Satgas PPA RW 18 Leles dalam menyampaikan pesan, memilih media komunikasi yang digunakan dan atribut yang melekat pada Satgas PPA RW 18 Leles sebagai fasilitator, **Sikap Fasilitator,** perasaan senang dan bangga dengan profesinya sebagai fasilitator sehingga menjalani dengan sepenuh hati setiap kegiatan pemberdayaan yang

berlangsung, **Kemampuan Pengetahuan Fasilitator,** mengetahui isi, fungsi, manfaat, dan nilai-nilai yang terkandung dari kegiatan program pemberdayaan yang dilakukan. Satgas PPA RW 18 Leles dituntut untuk mengetahui konsep kawasan ramah anak dan hak-hak anak, dan **Karakteristik Sosial-Budaya Fasilitator,** latar belakang fasilitator yang serupa dengan masyarakat penerima manfaat akan mempengaruhi keberhasilan kegiatan pemberdayaan yang berlangsung. Satgas PPA RW 18 Leles yang berasal dari dalam masyarakat RW 18 Leles menjadi potensi tersendiri dan Satgas PPA RW 18 Leles dianggap sudah mengenal dengan baik kondisi masyarakat Leles.

Dalam kegiatan pemberdayaan yang terjadi, komunikasi pemberdayaan menjadi kunci penting keberhasilan program ini. Satgas PPA RW 18 Leles menggunakan berbagai media komunikasi yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat guna menunjang keberhasilan program. Penggunaan media komunikasi tersebut meliputi penggunaan banner, mural, poster, stiker, penyampaian informasi melalui komunikasi langsung dalam bentuk perkumpulan, perkumpulan ibu-ibu PKK, event-event dan lain sebagainya. Selama masa pandemi yang memaksa mobilitas masyarakat menjadi sangat terbatas, mengharuskan Satgas PPA RW 18 Leles menggunakan media daring aplikasi WhatsApp dalam menyampaikan berbagai informasi.

Selain itu, pandemi juga mengubah berbagai kegiatan yang biasa dilakukan di RW 18 Leles, seperti pertemuan langsung yang menjadi terbatas, hiatus sementara dari kegiatan mengikuti anjuran pemerintah, penambahan pesan komunikasi untuk mengajak memenuhi protokol kesehatan dan penggunaan protokol kesehatan dalam kegiatan terbatas. Singkatnya, kegiatan di RW 18 Leles juga menerapkan *new normal* yang berlaku di wilayah umumnya di Indonesia.

B. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini banyak terjadi saat pengambilan data. Penelitian ini dilaksanakan pada masa *lockdown* pandemi Covid-19, sehingga mobilitas peneliti menjadi sangat terbatas. Pengambilan data yang dilaksanakan peneliti secara daring tidak maksimal dan informasi yang peneliti dapatkan sangat terbatas. Sehingga peneliti memilih menunggu agar dapat mengambil data secara luring.

C. Saran/Rekomendasi

Program kawasan ramah anak adalah program milik pemerintah. Peneliti melihat kegiatan ini memiliki dua lapis pemberdayaan yakni, dari pemerintah ke satgas dan satgas ke masyarakat umum. Penelitian ini memfokuskan pada pemberdayaan pada lapis satgas kepada masyarakat, sehingga masih ada ruang dalam pemerintah yang dapat diteliti oleh peneliti selanjutnya.

Daftar Pustaka

Amalia, N. F., Dayati, U., & Nasution, Z. (2017). Peran Agen Perubahan Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pantai Bajulmati Kabupaten Malang. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan*, *2*(11), 1572–1576. http://journal.um.ac.id/index.php/jptpp/article/view/10249

Antonius, I. (2019). *Potret Lahan Bermain Anak di Ibu Kota yang Masih Kurang Layak*. Www.Merdeka.Com. https://www.merdeka.com/foto/jakarta/1095654/20190723183734-potret-lahan-bermain-anak-di-ibu-kota-yang-masih-kurang-layak-001-debby-restu-utomo.html

APJII. (2018). Potret Zaman Now, Pengguna & Perilaku Internet Indonesia. In *Apjii* (Vol. 23, pp. 1–7). https://apjii.or.id/downfile/file/BULETINAPJIIEDISI23April2018.pdf

Creswell, J. W. (2017). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran* (Edisi Keem). Pustaka Pelajar.

Darisman, M. (2019). *Mengunjungi Kampung Ramah Anak Terbaik di Sleman, Yogyakarta*. Www.Kumparan.Com. https://kumparan.com/kumparannews/mengunjungi-kampung-ramah-anak-terbaik-di-sleman-yogyakarta-1rt3zVzZiJq/full

Dewi, M. (n.d.). *Bahan Ajar Komunikasi Pemberdayaan*. Penerbit Komunikasi UII.

Fanani, F. (2019). *Kurangnya Lahan Bermain, Anak-Anak Berenang di Kali Kotor*. Www.Merdeka.Com. https://www.merdeka.com/foto/peristiwa/1102691/20190820141830-kurangnya-lahan-bermain-anak-anak-berenang-di-kali-kotor-005-nirmatullah-efendi.html

Fortunati, L. (2014). Media Between Power and Empowerment: Can We Resolve This Dilemma? *Information Society*, *30*(3), 169–183. https://doi.org/10.1080/01972243.2014.896676

Gerintya, S. (2017). *73,7 Persen Anak Indonesia Mengalami Kekerasan di Rumahnya Sendiri*. Www.Tirto.Id. https://tirto.id/737-persen-anak-indonesia-mengalami-kekerasan-di-rumahnya-sendiri-cAnG

Hariyanti, P. (2017). Peran Relawan TIK Dalam Program Desa Broadband Terpadu Cikadu, Cianjur, Jawa Barat. *Jurnal Komunikasi*, *12*(1), 19–34. http://jurnal.uii.ac.id/jurnal-komunikasi/article/view/9917

Hartono, B., Rauf, R., & Pramudho, K. (2010). *Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif* (Edisi Pert). Pusat Promosi Kesehatan. https://www.pusdatin.kemkes.go.id/resources/download/penanganan-krisis/pedoman_umum_pengembangan_desa_dan kelurahan_siaga_aktif.pdf

Hikmat, H. (2013). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (Edisi Revi). humaniora.

Ife, J., & Tesoriero, F. (2008). *Coomunity Development: Alternatif Pembangunan di Era Globalisasi* (Edisi ke 3). Pustaka Pelajar.

indonesiabaik.id. (2019). *66,3% masyarakat Indonesia Memiliki Smartphone*. Www.Indonesiabaik.Id. http://indonesiabaik.id/infografis/663-masyarakat-indonesia-memiliki-smartphone-8

Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Edisi Revi). Penerbit Alfabeta.

Melkote, S. R., & Steeves, H. L. (2008). *Communication for Development in the Third World: Theory and Practice for Empowerment* (Edisi Keem). Sage Publications India Pvt Ltd.

Mulyana, D. (2010). *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. PT Remaja Rosdakarya.

Narayan, D. (2002). *Empowerment and Poverty Reduction: A sourcebook*. The World Bank.

Pemerintah Kabupaten Sleman. (2018). *Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kabupaten*

Layak Anak.
Pratiwi, M. Y., & Dewi, M. (2019). *Fasilitator dalam Pemberdayaan Lansia pada Program Bina Keluarga Lansia (Studi Kasus pada Bina Keluarga Lansia Mugi Waras) NASKAH PUBLIKASI*.
Putri, M. R. (2018). *Lahan Sawah Kulonprogo Berkurang 4.000 Ha untuk Bandara*. Www.Republika.Co.Id. https://republika.co.id/berita/ekonomi/pertanian/18/04/09/p6wxsz384-lahan-sawah-kulonprogo-berkurang-4000-ha-untuk-bandara
Restuastuti, T., Chandra, F., & Restila, R. (2004). Analisis Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan. *Jurnal Kesehatan Melayu*, 14–19.
Sintaasih, D. K., Nyoman, N., Yasa, K., Mujiati, N. W., & Indrawatim, A. D. (2014). Peran Pemberdayaan Dalam Menopang Kreativitas Sumber Daya Manusia Sebagai Sumber Daya Saing Industri Kecil Dan Menengah (Ikm) Di Kabupaten Badung Provinsi Bali. *Piramida*, *9*(2), 105–112.
Soetomo. (2018). *Pemberdayaan Masyarakat: Mungkinkah Muncul Antitesisnya?* Pustaka Pelajar.
Subarkah, L. (2019). *Ada Tol hingga Bandara, Ini Sisi Lain Dampak Masifnya Pembangunan Infrastruktur di Jogja*. Www.Jogjapolitan.Harianjogja.Com. https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2019/12/26/510/1027914/ada-tol-hingga-bandara-ini-sisi-lain-dampak-masifnya-pembangunan-infrastruktur-di-jogja
Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Penerbit Alfabeta.
Suwarningmas, N. P. W., Suardi, I. D. P. O., & Putra, I. G. S. A. (2017). Peran Penyuluh Pertanian dalam Pembinaan Kelompok Wanita Tani (KWT) (Kasus Pengolahan Kacang Kace Canavalia pada KWT Karang Sari dan KWT Merta Sari di Desa Nyanglan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung). *Jurnal Agribisnis Dan Agrowisata (Journal of Agribusiness and Agritourism)*, *6*(3), 433. https://doi.org/10.24843/jaa.2017.v06.i03.p12
Tarigan, A. P. (2019). Peran Lurah dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bangko Kiri Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017. *JOM FISIP*, *6*, 1–10.
UNICEF. (2020). Perlindungan anak di Indonesia - mengembangkan kebijakan dan peraturan yang kuat untuk setiap anak. In *Unicef*. https://www.unicef.org/indonesia/media/5651/file/Perlindungan Anak di Indonesia.pdf

LAMPIRAN

TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber : Paijan Trisno Harjono

Tanggal : 15 Januari 2021

….perkenalkan diri bapak, nama dan jabatan di RW 18 ini
A:Nama saya Paijan Trisno Harjono, jabatan saya ketua RW 18, Leles, Condong Catur, sleman, Yogyakarta
Q: Baik, terimakasih banyak pak untuk perkenalannya. Nah, ini masuk ke pertanyaan pertama…… awal terbentuknya desa ramah anak ini kapan pak?
A: Sebetulnya eeee, bulan maret 2015 (resminya)
Q: Maaf, denger-denger katanya kegiatan disini sudah ada sejak sebelum itu sudah mulai
A: jadi gini, awal mulanya adanya RW ramah anak kami mengadakan kegiatan simulasi PKDRT, kami mewakili desa Condongcatur, kemudian di sana diakui bahwa kegiatan simulasi PKDRT mendapatkan prioritas, mendapatkan juara lalu dinaikan ke eee… GN AKSA mewakili kecamatan depok, dan saat itu kami se kabupaten sleman juara 2 simulasi GN AKSA. Ini sejarah terjadinya atau kami bisa menjadi atau mendeklarasikan RW ramah anak di RW 18 ini.
Q: Okkeyy, nah sebelum itu PKDRT singkatan dari apa ya pak?
A: Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Q: Kalau GN AKSA?
A: Gerakan Anti Kekerasan Seksual Terhadap Anak
Q: Ohh, berarti itu kegiatan awalnya, pionernya, kemudian maret 2015 baru resminya ya pak yaa?
A: Yaa, resminya. Dan itu diresmikan dari kementrian Jakarta, Kementrian perlindunga.. PPA Pusat.
Q: Okee, okee.. Terus yang mensiasati… berarti kan kareni ini dimulai dari kegiatan PKDRT, nah yang ngajak temen-temen buat bikin “ayok kita bikin simulasi PKDRT itu yang mensiasati siapa?”
A: Itu program dari pemerintah, eee iyaaa… lomba pkdrt tuu lomba tingkat desa dari pemerintahan, kami cuma ditunjuk RW 18 untuk mewakili lomba PKDRT. Yang punya program adalah pemerintah. Itu gimana caranya masyarakat biar tau oo gimana caranya untuk mengurangi/mengendalikan kekerasan dalam rumah tangga laaa diwujudkan itu kami mendapat prioritas, kami mendapat kepercayaan dan akhirnya kami itu mengajak dengan masyarakat gimana caranya biar menekan angka kriminalitas dalam rumah tangga.
Q: oo gitu, …… itu tadi latar belakangnya, terus pak, kan setelah simulasi PKDRT itu selesai, kemudian kan lanjut? Jadi desa ramah anak ini, nah, kalau boleh tau, sebenarnya yang jadi sasaran dari program ramah anak ini tu siapa? Apa sebates anak-anak kampung sini? Atau anak-anak dari luar yang bermain kesini? Atau siapa apa?
A: Jadi gini, awal mulanya kita mensiasati atau mengadakan atau mendeklarasikan rw ramah anak itu kami untuk menekan atau mengurangi anak-anak di usia dini, di usia anak, yang dikatakan anak itu masih 0, usia 0 sampai 17 tahun, yaitu mengurangi pemakaian gadget di waktu-waktu tertentu maka dari itu, kami mengadakan kegiatan itu eee di waktu senggang dan kegiatan itu sudah dikoordinasikan dan dipublikasikan pada masyarakat, dan masyarakat mengiyakan untuk gimana caranya kita mengurangi ee anak di usia anak untuk pemakaian gadget. Awal mulanya kami mengadakan, atau medeklarasikan tentang rw ramah anak.

Q: Target awalnya itu ya pak yaa? Untuk mengurangi anak-anak main gadget. Terus selanjutnya seiring berjalannya waktu ada target-target lain ngga pak?
A: Jadi gini, ee untuk selain untuk penekanan tentang anak untuk mengurangi bermain gadget yaitu anak masih tahapnya belajar, jadi anak tidak diperkanankan untuk mengedarai motor, selanjutnya anak giamana caranya untuk bisa menjauhi dengan narkoba, nah jadi disamping kita memaksimalkan eeee/ kenakalan anak juga kami untuk melindungi ibu, jadi kami membentuk satgas perlindungan perempuan dan anak namanya satgas PPA. ini program kedepan dan bisa mengembangkan ee produk-produk di rw ramah anak.
Q: Okkee… berarti nggak cuma anak ya pak? Ibu juga yaa pak yaa? Terus pak kan karena concern saya di anak untuk saat ini, nah berarti desa ini kan bikin kegiatan biar anak-anak nyaman disini, nah itu ada apa aja pak?
A: jadi gini, kami sudah komitmen dengan temen-temen satgas PPA, jadi untuk mengurangi kejenuhan anak di rumah, 1 kami mengadakan atau membuat arena bermain, 2 untuk kegiatan tambahan yaitu ada latihan nari, untuk latihan komputer, untuk ee tambahan latihan bahasa inggris, jadi gimana caranya jadi anak biar tidak jenuh untuk mengurangi kejenuhan atau menghilangan image bermain anak itu bermain gadget.
Q: okkeeyyy, nah kalau untuk fasilitas kan kemaren saya sudah keliling-keliling, saya sudah lihat taman bermain, terus lihat lapangan voli, terus kemaren juga saya lihat ngobrol sama warga ada taman baca yang di ps ronda yaa? Bukunya ada di tempat bu Nani, nah selain itu, yang sudah saya lihat itu ada lagi ngga pak? Apa emng itu aja?
A: untuk fasilitas anak yaa kadang kala, karena ini masanya pandemi kitaa ngga bisaa -- kalau kapan tempo kita bisa ajak anak refresing kemana, kita jalan jalan kemana, biar anak tidak jenuh, tapi karena ini pada ee pandemi yaa bisa saya cuma mengedukasi di dalam ee kampung aja, sementara ini seperti itu.
Q: itu kalau jalan-jalan biasanya jalan-jalan kemana ya pak?
A: yaa kita ke monumen, istilahnya naik kereta mini, atau nanti anak diajak ke tempat yang menyenangkan bagi anak-anak biar anak-anak tidak jemu, bermain di taman bermain wilayah rw 18 ini
Q: okkeee, …. Nah ini pak, kemaren juga buku itu dari desa tau donatur?
A: kalau buku, itu swadaya murni bahkan… ee mohon maaf di rw 18 juga ada para pembimbing atau eee ada guru barangkali jadi ada ee sekedar tali kasih agar anak-anak tidak jemu atau boar belajar kelompok itu yaa dari swadaya satgas ppa, karena satgas ppa juga ada gurunya, ada yang bisa bikin les atau macem-macem, maka dengan kategori itu, cuma swadaya kalau buku.
Q: ……...tapi nanti kalau suatu hari ada donatur gitu pak?
A: yaa kami terima, kami tidak menutup kemungkinan, kemarin itu ada dari amikom itu juga melatih komputer selama 2 bulan. Rencana sebulan, tapi jadi panjang
Q: …… ini harapan dari bapak aja sih, harapan dari bapak tu manfaat dari program ini tu apa buat ee terutama buat anak-anak.
A: program yang jangka pendek, itu biar anak sekaligus mengurangi untuk masalah pemakaian gadget yang jangka pendek, yang jangka panjang biar kita membentuk karakter anak. Anak bisa menjadi tanggung jawab, anak bisa kerja sama dengan anak yang sebaya, anak bisa mandiri, jadi eee contohnya gini, selama yang saya lakukan, anak-anak yang biasanya bermain disini, sama anak-anak yang tidak sama sekali bermain disini, untuk kualitas untuk mutu untuk hasilnya lain, jauh berbeda. Contohnya, kemaren anak-anak yang kelas 6 sd yang sering bermain disini, saya tanya NEMnya berapa? NEMnya ada yang 23, 24, tapi yang anaknya yang tidak sama sekali bermain di tempat bermain NEMnya cuma 16-18, berarti kan untuk kemajuan atau untuk skillnya, untuk tanggung jawabnya untuk kemandiriannya, itu lebih dominan anak-anak yang sering bermain di tempat bermain. ------ jadi bisa untuk kita tuuu meng-- ngerepin hasilnya tu tidak secepat

mungkin, tapi bisa lima tahun yang akan datang, atau sepuluh tahun yang akan datang. Jadi ini tu mencipta anak-anak yang bertanggung jawab, anak anak yang mandiri, anak-anak yang saling kordinasi dengan temen-temen yang lainnyaa, kan gitu, jadi tidak bisa secepat kilat. Tapi yang secepat kilat yang istilahnya tu yang sekarang sudah saya rasakan yang dulunya maniak game, maniak game online atau apa sekarang tidak. Tapi dengan adanya pandemi ini, bisa merusak image di rw ramah anak.
Q: serem juga yaa pak pandemi ini jadi pada mainan gadget lagii..
A: iyaa, ini merusak sistem kami, pencegahan atau pengurangan pemakaian gadget anak-anak.
Q: Terus pak, buat satgas, kalau satgas disini tu ada mas bakti ngga? Misalnya 5 tahun sekali ganti atau gimana?
A: kalau satgas dulu periodenya 3 tahun sekali, dulunyaa… karena ini apa yaa? Satu-satunya di kecematan depok adanya satgas PPA ini karena sering untuk ee tinjauan, sering untuk percontohan, sering untuk kunjungan, jadi dengan asiknya, dengan kita semangatnya, lupa dengan istilahnya, jangka waktu, jangka/tempo pergantian pengurus, jadi ini hasilnya mengalir terus.
Q: okkeee, berarti awalnya 3 tahun tapi sekarang nggak ada ya pak yaa?
A: diperpanjang, karena banyaknya tamu, banyaknya kunjungan, banyaknya penelitian, jadi kita dengan santainya tidak memikir sampe kapan atau berapa tahun, jadi kita terlalu asik untuk kesana.
Q: berarti untuk tahunnya sekarang ngga ada yaa pak?
A: Berjalan terus.
Q: terus kalau buat satgas itu, darimana? Maksudnya warga sekitar kah? Atau ada yang dari luar?
A: yaa, satgas untuk warga sekitar itu adalah sebagai motornya warga...rw 18, yaa ada yang dari kepemudaan, ada yang dari ibu-ibu pkk, ada yang dari takmir masjid, ada yang dari pengurus rt/rw, jadi semua berasal dari tokoh-tokoh masyarakat.
Q: … untuk jumlah satgas pak?
A: Kalau jumlah satgas ada 30 orang
Q: nah, terus, kan sekarang ada 30, kalau misal nanti ada yang mau gabung lagi ada seleksinya nggak?
A: Kita tidak ada menutup kemungkinan siapapun yang akan ikut, masuk sebagai satgas, dengan pintu terbuka boleh saja ikut bergabung. Tidak ada batasan.
Q: ...berarti kan ini peran satgas sangat vital, dan program ini kan dari 2015 pak, bukan sebentar, sekarang sudah mau 6 tahun, nah gimana caranya satgas-satgas mempertahankan program ini?
A: jadi gini, ee sebelum pandemi, kita satgas setiap bulan mengadakan pertemuan rutin membahas kemajuan satgas, membahas permasalahan-permasalahan yang ada di rw 18 terutama permasalahan anak. Karena apa? Permasalahan anak kan...visi misinya rw 18 ramah anak kan semua anak, anak kita, jadi yaa kita setiap bulannya kontinyu untuk mengadakan pertemuan dan saling sharing informasi, yang penting khususnya anak itu kan di rw 18 bisa terpenuhi apa yang menjadi hak-haknya sebagai hak anak.
Q: berarti setiap bulan evaluasi ya pak ya?
A: betul.
Q: kalau pandemi iniii
A: selama pandemi kita tidak ada pertemuan-pertemuan tapi cuma melalui daring kegiatan anak-anak di tempat bermain.
Q: anak-anak disini semua sekolah kan pak?
A: sekolah, di rw 18 tidak ada anak yang putus sekolah tidak ada anak yang tidak punya akte.

Q: terus kalau penghargaan nih pak?
A: kalau penghargaan, di rw ramah anak itu karena saya adalah produknya dari desa condongcatur, iconnya kabupaten, jadi kalau ada penghargaan-penghargaan yang menerima yaa orang desa. ----- keamren sleman mendapatkan peringkat ninda(?) yang mendapat yaa kabupaten sleman, jadi rw ramah anak ada sebagai alat untuk percontohan di kabupaten sleman, khususnya di lingkup, orang condong catur, kecamatan depok. Jadi selama ini tidak ada penghargaan, khususnya di rw ramah anak.
Q: nah itu kan saya pernah liat beberapa media internet menyebut desa ini desa yang terbaik di jogja, itu ngga ada apresiasi dari lurahnya gitu pak?
A: yaa tidak ada. Cuma setiap ada kegiatan dan kita membutuhkan ada dana stimulan dari dana desa, itu pasti ada. Yaa setiap tahun ada dana stimulan dari desa, seperti itu. Kalau dari dinas P2PKB atau dinas PPA kabupaten sleman yaa memantau sampai mana kegiatan kita ini untuk satu-satunya rw ramah anak sedunia. Baru yang ada di rw 18. Kemaren pernah sempat ditangangi dari 5 negara WHO, untuk mengampu apa yang ada di rw ramah anak kok bisa-bisanya cuma rw aja bisa mendeklarasikan sebagai rw ramah anak.
Q: itu tahun berapa yaa pak?
A: yaaa sekitar tahun 2018.
====
Q: terus kalau di kampung ini sudah ada informasi layak anak belum pak?
A: informasi layak anak, karena yaa tadi, karena disini sudah bisa ee apa yaa? Bisa tertangani masalah hak-haknya jadi sudah masuk rw 18 layak anak. Ya tadi, sudah tidak ada yang putus sekolah, sudah tidak ada yang gizinya kurang, tidak ada yang tidak punya akte, dan sudah dapat imunisasi, jadi semua anak disini sudah sesuai dengan layak anak, mulai dari pembelajaran, dari gizi dan dari kegiatannya yang lain.
Q: …. Kalau forum anak di rw ini ada nggak pak? Minimal di tingkat lurah atau kecamatan?
A: kalau forum anak belum ada, tapi yang ada kepemudaan, jadi yang ada forum anak itu di tingkat kelurahan dan tingkat kecamatan, kalau di kampung adanya pemuda, jadi istilahnya pemuda-pemudi leles yang namanya opel, organisasi pemuda-pemudi leles
Q: ……. Pernah nggak pak ada pernikahan dini dibawah 18 tahun
A: di rw ramah anak, di rw 18 belum terjadi pernikahan usia anak, maksudnya gitu. Kalau sekarang tidak boleh menyebut nama dini kan ------- karena gini kalau ada desas-desus, kami akan menelurusi, kok katannya anaknya mau dinikahkan itu belum lulus sekolah, katakanlah seperti itu, itu saya tanyakan sebabnya, ooo seandainya sebabnya dia kurang mampu untuk biaya yaa kita harus kembalikan gimana caranya biar anak itu selesai sekolah yook kita ciptakan atau carikan pekerjaan untuk dia. Tapi alhamdulilah di rw 18 ramah anak belum ada perkawinan di usia anak.

===== lanjut ke wawancara dengan bu nani

Narasumber : Indrayani Supri Haryanti

Tanggal : 16 Januari 2021

……. Karena psbb kan udah mau mulai lagi kegiatan kita di mulai tanggal 11 kemaren karena mengajar komputer kan hari senin dan selasa, nah mulai hari senin tanggal 11 tu baru mau kita mulai senin selasa, hari kamis bahasa inggris jumat menari. Tapi kok ada pengumuman tanggal 11 PSBB kita sampaikan ke amikom, kata amikom "kalau saya nderek ibu aja, kita manut aja kalau memang disitu ada pembatasan kami libur dulu juga ngga papa" - "sebentar mas, saya usulkan dulu ke pengurus satgas semuanya, hasil dari masukan satgas yaudah kita libur dulu aja. Kita juga dari satgas istilahnya ikut pemerintahlah, pemerintah menganjurkan seperti apa, nanti nda malah kena sanksi. Kita tidak tau apa-apa, taunya kita kan hanya ingin berbuat baik, ternyata kan keliru salah nanti malah dapet teguran atau apa jadi yaa sementara ya sudah kita liburkan dulu. Kalau anak-anak yang dari sadar kan memang tidak bersosialisasi dengan anak-anak, 1-2 mungkin hanya datang kerumah si A si B si C ngga lama, mungkin hanya 2 jam 1 setengah jam, jadi kita persilahkan ----- intinya kalau anak sadar boleh kerumah masing-masing anak karena ada pengawasan dari orang tua ---- misalnya anak dari sadar datang ke rumah saya, ngajari anak saya, kan saya ada di rumah jadi saya bisa ikut mengawasi seperti itu.

…….
Q: perkenalkan nama lengkap dan sebagai apa?
A: nama saya Indrayani Supri Haryanti, saya di satgas rw 18 sebagai sekretaris
Q: ------ jadi disini saya lalal yeye, nanya soal hak dasar anak tu nanyanya kemana, terus dijawab sama ibunya kalau beliau juga dari posyandu.
A: kalau itu memang kami awasi semua mas imunisasinya, memang kita mulai dari diketahui ibu hamil itu ada pendataan. Pendataan kita itu dari ibu hamil, mulai dari hamil bulan keberapa, setiap bulan ibu hamil harus datang ke posyandu, kita timbang juga, kita lila, lila itu ukur lengannya, itu seperti itu nanti terus pas hamil pun kita tanya sudah imunisasi obatnya apa saja? Itu juga kita tanya walaupun yang hamil sudah ke klinik atau ke bidan, tapi kalau nanti dateng ke posyandu yaa tetep kita tanya-tanya. Kita harus pastikan juga setelah anak lahir itu harus dapat hak imunisasi dasar, yyang pertama bentuknya itu kan BSG, nanti ada hepatitis, ada DPT, DPT 1 2 3, pokoknya anak sebelum usia 2 tahun tu harus sudah terpenuhi semua imunisasi dasar anak.
Q: Tadi imunisasinya ada apa aja bu? BSG? BSG itu apa?\
A: BSG itu, pas begitu lahir itu lo? Begitu lahir, pokoknya anunya BSG…… pertama begitu lahir itu imunisasi dini, terus ini imunisasinya --- ibunya nunjukin list imunisasi ---- ....
Q: Berarti kalau buat imunisasi sudah terlaksana semua? Maksudnya -----
A: sudah, sudah pasti karena kita kalau posyandu kita lihat ini-nya to mas (nunjuk daftar) pasti kan kalau ada yang dari puskesmas atau dari buku biasa buku KIA, kartu ibu anak sehat, itu kan kadang nggak seperti ini, kayak buku jadi ada tanggal, kayak ini kan juga ada tanggal di pesan datang kapan ini to? Nah ini ada tanggalnya dipesan datang, nanti diingatkan, terus kita pun di grup WA - kita kan ada juga grup balita - itu ditanya terus di bulan ini siapa ibu-ibu yang anaknya imunisasi monggo dishare disini tanggal berapa imunisasi apa? Kayak gitu, nanti kita isikan di buku besar, memang yang mengisikan buku besar itu bu bandi, dulu memang anggota satgas tapi karena sesuatu hal yaa beliau momong yaa apa sembarang terus keluar untuk mengurangi kegiatan. Harusnya kalau kemarin tanggal 14 ini posyandu, masnya bisa datang tapi karena juga psbb juga dan dari puskesmas makannya semua kegiatan kita diliburkan.

--- basa-basi---
Dan kita itu disini pasti, dan setiap anak sudah mempunyai imunisasi lengkapnya pasti, karena kalau tidak pasti kita juga anuu, dilaporan tiap bulannya kan ada mas... -- kita pasti mengingatkan -- jangan lupa bulan ini imunisasi apa tanggal berapa dimana itu mesti kita tanya yang imunisasi tanggal berapa, jangan lupa laporan yang sudah imunisasi apa, bulan ini imunisasi apa, tanggal berapa, dimana? Itu mesti kita tanya.
Q: berarti teman-teman dari satgas mantau terus ya bu?
A: iyaa, kita kan satgas juga ikut di posyandu balita, ikut kader balita. Jadi juga tau persis
Q: ….. Presentase kematian bayi disini kira-kira berapa ya?
A: alhamdulillah nggak ada, dari kita.. Dari beberapa tahun ini ngga ada. Alhamdulilah semuanya bersih.
Q: dari hamilnya sudah dipantau bener ya?
A: iyaa iyaaa, hee'ee. Alhamdulilah ngga ada.
Q: nah itu kalau buat pemantauan gitu buat ibu dan anak, itu dari posyandu mana bu?
A: posyandu kita, kita kan juga ada posyandu. Disini ya setiap bulan setiap tanggal 14 itu. Terus nanti kan beberapa bulan sekali dari puskesmas juga dateng. Kalau dulu di posyandu itu setiap bulan pasti ada petugas puskesmas yang dateng, ntah 3 atau 4 petugas puskesmas yang datang kesini, datang ke posyandu kita. Tapi karena beberapa tahun terakhir ini kan di puskesmas kekurangan tenaga medis juga kadang kita di ee satu desa condong catur itu kan ada beberapa posyandu jadi kita dibaginya susah, jadinya sekarang hanya beberapa bulan sekali puskesmas dareng. Kalo dulu setiap bulan.
Q: terus kalau buat ini, kasus kekurangan gizi bu?
A: yang BGM, dibawah garis merah istilahnya disini kalau kurang gizi kan nanti ininya ngga naik, cuman ini kalau dibawah garis ini udah gizi buruk (nunjuk grafik), atau gizi yang kurang. Itu dipantau terus dari puskesmas pasti ada bantuan. Pasti ada bantuan dan bantuan itu jarang diberikan secara uang cash, bianyasa biskuit itu pasti setiap anak, kadang malah ada anak yang berat badannya kurang atau timbangannya kurang dalam beberapa bulan tidak naik itu dapatnya satu karton itu. Terus nanti yang memang gizinya ya belum buruk-buruk banget tapi sudah di ambang anu, itu biasanya dapetnya bantuan gizi kayak kacang ijo, terus gula merah atau apa, pokoknya macem-macem gizi nanti biar diolah, telur kayak-kayak gitu. Itu kan dari puskesmas dipantau terus, makanne setiap bulan kita melaporkan hasil perkembangan ini kan, bulan ini misalnya alisya berat badannya berapa, lingkar kepala berapa, lingkar lengan berapa, terus kalau naik ee opo berat badannya naik nggak, kalau tetap kan TT istilahnya, kalau naik yaa naik, berarti kan nanti kita hitung, kita data yanng naik berapa, yang turun berapa, yang naik ituu eee yang turun itu karena apa kan kita data terus, kita kondisikan terus dan itu terpantau terus, misalnya ada anak yang bgm ataupun bahkan sampe kurang gizi, pasti terpantau terus.
Q: okee, tapi.. berarti kasus anak kurang gizi tu ada cuma dipantau kalau misal udah ada tanda-tanda kurang dibantu dikasih ---
A: iyaa, tapi kalau disini belum sampai yang ekstrem, paling cuma dibawah garis merah, maksudnya hanya 2 3 bulan tidak naik gitu lo, 2 3 bulan tidak naik berat badannya biasanya dengan bu kader, dengan yang biasanya koordinasi disana dengan bu bandi ataupun bu ros nanti disampaikan disana, ni ada balita yang sudah 3 bulan tidak naik. Nanti dari puskesmas diedukasi, yaa ditanya bu-bu ini makannya gimana? Terus minum susu nggak? Itu nanti biasanya dapet biskuit atau apa… nanti memang ada undangan tersendiri, ibu yang memang anaknya 3 4 bulan itu ngga naik bbnya dapet undangan dateng ke puskesmas, nanti bertemu dengan (ahli) gizi disana nanti langsung dikasih tau di sana sendiri. Kita tidak.. Kader tidak.. Bisanya kan di kasih tau di posyandu malah nggak fokus, biasanya kan puskesmas depok 2 itu seperti itu sistimnya, teknisnya seperti itu. Kalau itu kalu udah memang bener-bener kurang atau memang atau apa biasanya kalau ngga

diambilin kader-kader bantuan biskuitnya, nanti kesana sambil nanti disana dikasih tau. Mungkin kalau susah maeme yaa mungikin maemmee ngga usah dijamin, siang sore mau ngga usah, sesering mungkin setiap kali dia mau dimaemin sedikit, tapi sedikit nggak papa nanti maem lagi.
Q: berarti itu tadi ee kader kader temen-temen satgas itu termasuk pengawasan terhadap ini ya bu? Jadi misal ada orang tua di cek ini misal punya anak di bawah umur 2 tahun dipastiin anaknya dapet asi gitu ?
A: iyaa hee'ee iyaaa, kaan setiap pokoknya kita itu kader satgas pun dari kader posyandu setiap bulan pun misalnya ada bayi yang baru yaa kita tanya, ini asi eksklusif nggak? Maksudnya asi eksklusif itu udah ditambah asi belum? Udah ditambah makanan tambahan belum? Belum bu, berarti kan masih asi eksklusif, karena kalau asi eksklusif kan harusnya 6 bulan dari 0 sampe 6 bulan, tapi kadang kan kalau orang tua rewel kadang dikasih formula itu kita tengok sendiri di lembar, pokoknya nanti kalau njenengan di posyandu nanti bisa melihatnya di lembaran buku yang pertama dateng tu nanti ditanya namanya kan siapa, terus nanti ditanya ibunya tu asi eksklusif ngggak atau udah tambahan, kkalau asi eksklusif nanti tandanya AE, kalau hanya asi pake tamabahan udah A+ kayak gitu…….. Kalau untuk asi itu pasti, tapi untuk data lebih lengkapnya nanti di posyandu.
Q: berarti disini kalau lembaga pelayanan kesehatan reproduksi langsung ke posyandu ya bu ya?
A: kalau reproduksi nanti kita anukan ke ee puskesmas atau bidan dini, ke bidan yaang… ada
Q: terus kalau untuk kesehatan mental?
A: kesehatan mental ada, di puskesmas itu juga kita pun di setiap kelompok posyandu kan ada beberapa kader, nanti dari puskesmas dibaginya ada kader gizi, kader yang mencatat naik turun berat badannya, ada kader jiwa. Jadi yang kader jiwa ini diajari, diedukasikan, kalau seandainya dilungkungan ibu, di lingkungan kamu ada yang ee misalnya kayak gangguan mental atau gangguan kejiwaan itu nanti di kader jiwa ini sudah diberikan pelatihan nanti bisa mengatasi itu. Kalau kader kejiwaan ini kayaknya bu bar itu sama bu darti deh, coba besok kalau ketemu bu darti. Biasanya kalau ada undangan di puskesmas rapat itu kader jiwa itu langsungannya by name, jadi langsung ke kader yang dituju. Jadi undangannya nggak ke kelompok posyandu itu, tapi biasanya saya dapat beberapa kali itu ke by name yang dulu itu bu bandi tapi belakangan ini bu darti, nanti coba tanya-tanya ke mbak darti kalau kader jiwa itu seperti apa sih yang di edukasikan dari puskesmas ditanyakan ke bu darti lebih jelas lagi…… hooo'oo nanti kan disini itu juga ada, tapi bukan warga sini cuma kontrak, tapi kadang-kadang kayak apa ya mas? Dia ni kayak ada bisikan apa gitu loo, itu juga nanti konsulnya di kantor puskesmas kok. Biasnya datang ke mbak darti, nanti dianter ke ibunya itu ya nanti ditensi diajakin ngobrol seperti itu apa psikolognya… eee konsul… jadi puskesmas yang dateng gitu. Karena tau ibu ini kan apaa? Mungkin dia itu kayak apa yaa? Kayak halusinansi banget, kan kalo misalkan itu anuu bawa anak yang kecil, kan kalo disitu kita nggak cuek banget, anak yang kecil itu dikasihkan ke orang, bilang gini, ini dipegang dulu ini aku ni mau dapet anak kembar, dengan syarat anakku ini dikasihkan ke orang, jadikan kayak dapet bisikan-bisikan gitu loo. Yaa saya takutnya kalo bisikannya itu aneh itu kan biasanya ada bayi… itu kan anaknya ada dua gede-gede, kemaren kok hamil lagi, ini ibunya kan agak gini tapi ini kok malah hamil lagi, saya kan takut banget to ee waktu itu suaminya, nggapapa to bu, gini-gini kan suaminya yang disini, yaa kemaren itu heboh lagi, terus dari puskesmas padahal udah mantau terus. Ini puskesmas itu dalam satu bulan itu bisa 4 kali 3 kali dateng ke ibunya. Untuk kejiwaan nanti lebih jelas tanya ke bu darti.
Q: di kampung ini ada keluarga yang masuk ke kategori miskin nggak bu?

A: ngga ada. Kalau disini untuk kk miskin udah kita data di administrasi. Kayak misal dulu kan ada pak --- masuk kk miskin tapi karena anaknya ada 2 dan sudah menikah semua, terus anaknya udah pada kerja semua yaa ekonominya sudah meningkat semua, yaa kami coret.
Q: disini semua kk, terutama yang memiliki anak dapet akses air bersih semua kan bu? Ntah itu sumur atau apaa??
A: iyaa. Semua sumur. Kalau kk miskin ada, tapi nggak yang nelongso. Tapi kita tetep masih masukan kk miskin tetep masih bisa jualan, masih buka warung sayur, kayak-kayak gitu. Nggak yang terus nganu banget itu enggak…….
Q: buat kawasan tanpa rokok? Kan anak-anak layak dapet udara bersih nih, kawasan tanpa asap rokok daerah sini dimana aja bu?
A: yaa di posyandu juga, di posyandu yaa tanpa asap rokok, nanti kalo misal ada bapak, kan ada misal pas tanggal 14 tu harinya sabtu atau hari yang bapaknya suka nganter itu yaa dari awal dari depan udah kita kasih tau.
Q: terus selain di posyandu?
A: yaa disini, (di taman bermain), terus nanti kalo pas anak-anak tpa itu kan halaman masjid luas, kadang ada bapak-bapak yang jemput itu yaa udah nggak boleh ngerokok. Terus itu kan depan rumah saya ada warung, kalo pas ada banyak anak-anak biasanya ada pegawai rumah sakit yang makan disitu sambil ngerokok atau apa yaa dengan sebisa mungkin kita untuk mengingatkan disini masih kawasan anu yaa nggak ngerokok. Kadangan yaa satpamnya rumah sakit yaa kadang ngasih tau juga

Q: …. Anak-anak disini sekolah kan bu? 12 tahun?
A: yaaa sekolah semua
Q: kalau misal ngga ada ni bu, atau kasus anak putus sekolah karena biaya atau apa, pernah nggak?
A: adaa, ini karena emng anaknya yang pengen pindah pindah (intinya anaknya pengen pindah-pindah sekolah).
Q: terus bu untuk yang kegiatan kreatif selain yang sudah saya lihat?
A: ngga ada, cuma anak-anak bermain seperti biasa yaa kita awasi ya kita bermain biasa yaa bersosialisasi dengan teman, terus belajar berbagi dengan teman, misal ada mainan ya enggak berebutan, bisa bergantian atau apa yaaa… anaknya diajari biar bisa berkomunikasi dengan temen, biasa kreativitas sendiri disitu di arena bermain tidak kita kamu harus ini yaa tidak. Monggo terserah anak-anak kita mau seperti apa. Ya bermain tapi kita tungguin kita arahkan gitu….. Tadinya selasa kamis kan tpa, tapi karena ini kan selama pandemi tpa belum mulai makannya bu retno itu bisa ganti hari kamis diisi bahasa inggris karena kamisnya kosong. Tadinya kegiatan hari kamis itu tpa, jadi tadinya kegiatan anak disini itu senin, terus rabu, jumat, sabtu, minggu, terus selasa dan kamis itu semuanya di tpa.

Narasumber : Sumarni S.Sos

Tanggal : 16 Februari 2021

Q: Perkenalkan nama ibu?
A: ...Sebelumnya perkenalkan nama saya Marni, lengkapnya Sumarni S.Sos begitu. Saya di kampung Leles kaitannya dengan pengembangan RW ramah anak ini saya selaku fasilitator. Jadi kepengurusan satgas itu kan ada SK-nya yaa. SK kepala desa tentang satuan tugas perlindungan perempuan dan anak rw 18. Saya selaku fasilitator. Fasilitator ini punya peran sebagai media untuk menghubungkan teman-teman dengan pemerintah. Kebetulan, kebetulan saja ini saya bekerja di pemerintahan mengampu dan mengawal tentang program layak anak di kabupaten sleman, mulai dari tingkat kabupaten… kelurahan, sampe ke rt rw bahkan sampai ke keluarga.
Q: Ibu asli leles?
A: Asli, hee'e. Asli Leles.
Q: Berarti ibu pas awal pengembangannya sudah ada disana?
A: Sudah iyaa, kebetulan saya selaku penggagasnya. Penggagas untuk mengembangkan, pengembangan lingkungan yang layak anak di dalam skup yang paling kecil. Makannya kan belum ada, RW lain yang layak anak atau ramah anak.
Q: Iyaa, emng beberapa ini kelasnya masih kelas kampung yaa bu yaa? Atau desa?
A: Betul. Iyaa, kelasnya desa. Karena memang pengembangan kabupaten layak anak ini kan ada 2 sistem. Top down maupun bottom up. Nah kalau yang top down itu pasti, intervensi dari kami yang ada di kabupaten sleman. Dari kabupaten mengembangkan atau menginisiasi program ini ke… Ke kelurahan, ke pandukuhan dan sebagainya. Tapi kami merencanakan tidak saja menunggu dari program pemerintah artinya bergerak dari pemerintah, karena kan di kabupaten sleman ada 86 desa, kalau satu-satu nanti nunggu kami dari kabupaten sleman menggulirkan kegiatan kesana kan tercapainya akan lama, kami menunggu respon-respon cepat atau inisiatif dari masyarakat yang peduli terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak untuk menginisiasi lingkungan yang paling kecil di wilayahnya, dalam hal ini adalah rt-rw. Jadi ada 2 fungsi dan peran yang kebetulan bisa berjalan bersinergi. Saya selaku warga di Leles, dan saya kebetulan orang pemerintahan yang mengawal program itu. Ini kebetulan saja…….. Kalaupun saya sebagai warga leles, ya itu tadi, mengajak temen-temen yang saya gabungkan dalam sebuah organisasi yang namanya satgas itu untuk bergerak bersama membangun RW 18 menjadi kampung yang ramah anak. Rw yang ramah anak. Begitu.
Q: berarti dulu ibu ikut banget yaa?
A: Iyaaa, ikut banget dan sampe sekarang masih ikut, cuma tidak seintens dulu. Kalau dulu kan memang menginisiasi dari ee apa, mengedukasi, menanamkan bahwa ini lo ramah anak itu apasih? Kemudian nanti seperti apa, tujuannya, kemudian manfaatnya, mengapa kita perlu mengembangkan ini di kampung kita, kan jadi lebih pada membangun mindset dulu kan mas? Awal-awalnya itu, jadi kan ketika mereka sudah memiliki mindset yang sama seperti yang kita harapkan "yok kita bergerak bersama mau?" "mau mau mau bu, mau mau" yaudah kalau mau, kita bikin SK blablabla dan sebagainya. Terus setelah kita menyandang predikat sebagai satgas ditetapkan dengan keputusan kepala desa, maka kita harus punya rencana kerja, kita punya program kerja, yok kita ketemu membahas program kerja itu. Nah, setelah kita punya program kerja, agar kita kerjanya lebih terarah dan sebagainya, yok kita nyusun SOP, kita nyusun SOP. Nah, agar SOP ini bisa kita taati dan pedomani bersama, yok kita simulasikan, kayak gitu terus sampai saatnya temen-temen itu semua paham "ooo ngene ki to!? Sebagai satgas itu punya kewajiban ini, punya kewajiban itu, seperti itu. Kemudian cara kerjanya, berpedoman pada ini, ada ad/art ada SOP dan

sebagainya. Seperti itu mas. Jadi berprosesnya juga cukup lama untuk membangun/menyamakan mindset itu.
…….. Catatan: fasilitator ada 2 lapis, dari satgas dan dari pemerintah
Q: Semua anggota satgas berasal dari masyarakat?
A: iyaa, dari masyarakat, asli masyarakat Leles dan kita ambilkan dari berbagai kelompok eee tokoh.
Q: Terus kalau untuk satgas, selain dari masyarakat ada yg dari luar nggak bu?
A: Kalau dari luar sebagai pengarah atau pembina yaa pak lurah. Kalau pak RW yg penanggung jawab
Q: kan ibu disini sebagai (wakil) pemerintah yang ngajak mereka, nah itu selain yg tadi, kontribusi ngajak masyarakat, ada lagi nggak bu kontribusi dari pemerintah?
A: Ada. Kita ini kan ada fasilitasi, ada anggaran yang bisa dialokasikan ke sana. Loo mereka kan perlu dana to mas? Buat oprasional dan sebagainya, makannya kan ada iuran anggota dan sebagainya kan karena memang (agar) bisa suistanable lah organisasi itu. Kalau nggak didukung itu kan, pasti terseok-seok. Nah dari situ juga kami selalu upayakan sepanjang bisa didukung dengan itu dan bisa dipertanggung jawabkan, kami selalu mengusahakan untuk: misalnya ada event-event yang dilaksanakan secara khusus oleh satgas dalam mendukung ramah anak ini juga kita upayakan untuk itu.
Q: berarti disana sumber dana ada 2 ya bu? Yang pertama swadaya masyarakat?
A: Betul, itu yang paling pokok, yang paling pokok adalah swadaya masyarakat dari anggota itu. Kemudian kalau dari pemerintah itu kan ya, hanya support sesekali. Karena tidak selalu ada juga dan membutuhkan itu kan semua desa. Jadi ada skala prioritasnya.
Q: Ibu sebagai fasilitator dari pemerintahan, ada diadakan pelatihan untuk satgas?
A: Ada
Q: Itu pelatihanya, pelatihan gimana tu bu?
A: Pelatihanya macem-macem, prinsip yang harus ditanamkan pertama kali kepada para satgas itu adalah pemahaman tentang konvensi hak anak. Nah, itu menjadi poin pertama yang kita latihkan kepada semua satgas, tidak hanya satgas disana (leles). Saya melatih semua satgas yang ada di kabupaten sleman ini. 86 desa itu harus terlatih konvensi hak anak. Karena disitu ilmu perlindungan dan pemenuhan hak anak itu ada. Karena kan peran fungsi mereka adalah sebagai penggerak, sebagai pelopor untuk mengajak masyarakat melakukan upaya-upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak. Laa kalo dia sendiri selaku, masnya menyebut fasilitator, tidak punya ilmunya kan lucu. Bisa jadi tidak perlindungan, tapi yang terjadi nggak tau kita. Kan begitu!? Mengapa harus ada campur tangan pemerintah, mas? Jadi ini saya luruskan dulu. Tidak kebetulan saya ada disana (leles), tapi semua satgas itu dibina oleh kita, tidak hanya yang disana, bukan karena saya disana gitu, tapi saya membina semua satgas yang ada di kabupaten sleman. Dulu mas mas luki ini, saya keliling ke 86 desa itu. Yaa unsur dari pembinaanlah, kita bekali, kemudian kita berikan pelatihan, yang salah satunya adalah konvensi hak anak tadi, terus ada pelatihan publik speaking, bagaimana kita memberikan bekal agar para satgas kita itu bisa ngomong yang sistematis, yang membuat masyarakat bisa terpengaruh, ada ilmunya. Tanya, besok tanya mbak nani, tanya pak edi itu, sudah pernah mendapat pelatihan apa saja dari kami?
……(13:10)
Q: Terus ada lagi nggak bu selain itu, tadi kan pelatihannya konvensi hak anak, terus perlindungan anak, publik speaking?
A: publik speaking, terus penyusunan profil anak.
Q: salah satu kegiatan satgas kan sidak, na itu kan sidak untuk mengecek anak di jam belajar ini anak beneran belajar atau main hape
A: kalau kita lebih sidaknya kan pada orang tua, pada orang tuanya to mas, atau orang

dewasa di rumah itu. Karena kan yang harus melakukan perlindungan dan pemenuhan hak anak itu para orang dewasa di sekitar anak, he'ee to? Jadi yang kita sidak itu sebenarnya anggota keluarga yang dewasa disitu. Memperhatikan pemenuhan hak anak terpenuhi atau enggak ketika saatnya hak itu harus diberikan. Belajar itu kan haknya anak, bukan kewajiban anak. Ketika di jam belajar, tapi kok orang tuanya milih melihat tipi, atau lainnya, nah berarti kan tidak memenuhi hak anaknya. Kalo dia memenuhi kan dia harus mendampingi, kalau pun tidak ngajarin ya nungguin anaknya sambil baca. Baca yang lain kan juga boleh, anaknya baca buku pelajaran, ibunya baca (koran mungkin?) iyaa gapapa, jangan melihat tipi.
Q: peringatan jika sedang sidak tidak ada orang dewasa yang memperhatikan anak? Peringatannya bagaimana?
A: sebenarnya kalau peringatan tidak berlaku secara keras, kita lebih pada mengingatkan saja "bapak ibu kan ini saatnya jam belajar untuk anak-anak kita, yuk kita dukung untuk pemenuhan haknya itu"
Q: bagaimana jika orang dewasa ngeyel saat diberi peringatan?
A: yaa kita biasanya nganu, terus saling sharing dengan sesama satgas, saling cerita gitu, ini gini lo, kemarin gini. Tapi sepanjang ini kok ini ya mas, belum ketemu yang itu (ngeyel) kadang anak-anak justru lebih banyak yang mengingatkan orang tuanya. Anak-anak kan sering di ruang bermain itu ya? Nah disitu kan sering mendengarkan ada sosialisasi, misalnya mendengarkan ada apa ya? Pemahaman-pemahaman secara sederhana untuk anak-anak. Contohnya gini, saat kami menyampaikan tentang bahaya gadget untuk anak-anak kita, kita pake ilmu internet yang ramah anak itu yaa, sebaiknya anak-anak itu tidak usah terburu-buru untuk dikenalkan dengan gadget, ada masanya. Terus kemudian mereka (anak-anak) sesekali yang menegur orang tua kalau main gadget. Naa itu kan artinya edukasi yang kita berikan kepada masyarakat itu, apa? Bisa diserap gitu lo mas.
Q: Ternyata malah anaknya yang nerapin?
A: iyaa, he'ee. Termasuk ini, edukasi kita untuk pencegahan kejahatan seksual, kan kita mengajarkannya dengan gerak lagu dan sebagainya to, itu anak-anak sangat paham sekali. Ketika ada anak yang jual-jail, ada anak yang melihat ee melihat, memegang tubuh yang mereka seharusnya tidak disentuh oleh orang lain, tau, "nggak boleh lo kayak gitu" hee'e gitu-gitu. Termasuk oleh keluarganya pun nggak boleh, itu contoh juga ini. Saya juga "wah ya berarti do ngerungokkee" biasanya kalo anak-anak di kampung kami tu, kan biasa kalo mau mandi kan terus dilepas celananya ya? Secara tidak sengaja kok pakdenya megang, naa, itu langsung ditendang oleh dia. He'ee, langsung "jangan lo pakde, nggak boleh itu". Jadi paham sekali bahwa itu tu bagian privasi dia yang tidak boleh disentuh oleh siapapun. Meskipun sesama jenis. Itu salah satu bukti ya, meskipun belum maksimal gitu, tapi apa? Masyarakat itu secara perlahan mulai sadar gitu lo mas untuk upaya-upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak itu menjadi sesuatu yang penting untuk dilakukan bersama-sama.
Q: bagaimana cara memproduksi pesan agar masyarakat ikut serta dalam program?
A: Memang semuanya itu ada modalnya ya mas, ada potensinya. Kebetulan potensi di kampung kami itu kok ya relatif mendukung untuk itu. Potensi masyarakatnya, masyarakatnya mudah digerakan itu kan potensi tersendiri kan mas? Tapi ya akan bicara berbeda ketika akan ketemu masyarakat yang eeehhhh dalam tanda petik yaa mungkin, apa ya? Sulitlah untuk memiliki kesadaran bersama. Tapi kalau untuk di kampung kami ya alhamdulilah, kesadaran bersamanya itu terbangun.
Q: jadi ngajaknya dengan pesan persuasif mungkin?
A: yaa dengan ajakan, awalnya dengan pemahaman-pemahaman itu. Ketika dia paham kok tertarik ikut bergabung.

Q: selain media komunikasi yang nampak secara fisik di kampung leles (stiker, poster, mural dll) ada lagi nggak bu media komunikasi yang digunakan untuk mensukseskan program ini?
A: Kalau pembuatan edukasi-edukasi yang nampak secara fisik itu memang bagian dari program satgas ya mas, kalau edukasi dalam bentuk lain, kita kan pernah ini, melakukan edukasi secara eee melalui seni, seni budaya, dulu kan kita sering pentas dalam bentuk fragmen-fragmen gitu di acara-acara event kampung bisa malam 17'an, bisa peringatan-peringatan apa gitu kita ada fragmen mas. Fragmen ni kayak drama singkat. Jadi anu, seni, semacam theater dan para satgas para peraganya, para pelakunya-aktornya. Bermain peran. Paham belum? Drama lah pokok'e. Saya munculkan kembali itu. Kita kita memainkan itu berkali-kali di rumah dinas bupati untuk peringatan-peringatan hari besar kabupaten: hari ibu, hari kartini, dll.
Q: drama yang disampaikan?
A: dramanya, anu, edukasi. Edukasi perlindungan anak. Sering berganti-ganti judul, contohnya ya: ee saat itu ada anak, anaknya masih sekolah tapi oleh orang tuanya mau dikawinkan, tapi intinya tentang perlindungan perempuan dan anak. Terus fragmen yang lainnya, ee kdrt, kekerasan pada istri, sang suami sangat kejam dan sering menganiaya istrinya sampai babak belur, biru-biru gitu.
Q: itu kalau di leles ditampilkannya di event-event yaa?
A: iya, karena kita punya itu kan kadang kita dipanggil untuk pentas di kabupaten, kayak gitu. Jadi itu salah satu media lain yang kita lakukan. Disamping itu juga kita sering ngisi melalui, pertemuan pkk, kita kan ada pertemuan pkk rt dan rw, kebetulan masing-masing ada itu, nah di pertemuan pkk itu sering kita edukasi secara lisan untuk semacam sosialisasi kalau ada update-update program terbaru dari pemerintah itu kita langsung gulirkan disitu. Biasanya ibu-ibu yang sering banyak kumpul.
Q: berarti ini untuk sasaran sudah jelas, perempuan dan anak yaa bu ya? Tapi kemudian bapak tidak mungkin disepelekan, bapak ikut mendampingi anaknya ya?
A: betul.
Q: kan ibu tadi menjelaskan kalau program ini dirumuskan, kalau menurut ibu program ini sudah cukup untuk memenuhi perlindungan perempuan dan anak?
A: sejauh ini masih perlu ditingkatkan terus mas, karena kan kita membangun kesadaran masyarakat itu tidak sama, he'e to? Masyarakatkan punya tradisi, kemudian punya kearifan lokal, na itu yang masih harus kita, apa ya? Push terus untuk maju. Terus kemudian ini, tradisi itu kan ya yang sampai saat ini masih kuat kan, "anak itu opo si?" iya kan? Terus "perempuan siapa sih?" kayak gitu to? Na itu kan sangat kental di masyarakat, seolah-olah bahwa kalau anak itu yaa kelompok yang belum penting, tidak penting. Perempuan juga begitu, kelompok yang lemah, tidak penting dan sebagainya, nah itu yang terus kita edukasi ke masyarakat melalui program-program itu tadi, makannya terus update terus program kita di upaya perlindungan perempuan dan anak ini terus diperbaharui gitu. Dari dulu ada undang-undang pkdrt, kemudian ada gn-aksa, macem-macem.
Q: berati di leles juga sama bu? Masih perlu ditingkatkan?
A: nah, kalau masalah untuk ditingkatkan itu harus terus mas, soalnya kalau tidak nanti kan kemudian kita menjadi terlena, kalau terlena puas dengan kondisi sekarang, yaa itu yang tidak diinginkan. Jadi terus untuk ditingkatkan.
Q: kemudian saya membahas soal peningkatan ruang seperti laktasi dll
A: nah itu kan, masih perlu ditingkatkan?
Q: Selain itu masih ada yang perlu ditingkatkan?
A: masih, masih. Kalau saya melihatnya ee keterlibatan masyarakat secara keseluruhan, ini yang belum. Kan sampai saat ini masih terbatas juga to mas? ….. (intinya keterlibatan masyarakat dari berbagai kalangan masih perlu ditingkatkan).... Termasuk pengadaan-

pengadaan itu tentunya, kenapa saya nggak singgung-singgung pengadaan? Soalnya… pengadaan-pengadaan itu kan memerlukan biaya besar ya mas? Harapan kami ketika seluruh masyarakat di wilayah itu sadar betul bahwa ini untuk anak, untuk masa depan kita, generasi pengganti kita, itu akan sangat mudah dilakukan. Semahal apapun, kalau itu dilakukan bareng, nahh itu loo maksud saya yang masih perlu ditingkatkan itu. Nah, sepanjang ini kan kita upayanya yaa tertatih-tatih lah cari sponsor sana sini, bantuan sana sini, gitu.
Q: berarti kebutuhan masyarakat akan terpenuhi ketika masyarakat sadar akan kebutuhan mereka?
A: iyaa, betul, iyaaa, begitu too. Meskipun program ini digulirkan pemerintah itu untuk kepentingan masyarakat, sebetulnya, he'e to? Tapi kan, yaa itu tadi, karena kesadaran itu kan tidak sama berkembangnya di masing-masing individu. Kesadaran kolektifnya itu… tapi kan ini juga kesulitan di kelompok masyarakat lainnya, juga kayak gini. Tapi kalau kami yakinnya gini mas, sepanjang masih ada pioner-pioner, ada pelopor-pelopor yang bersedia untuk menjadi penggerak itu insha allah tidak akan pudar. Makannya satgas itu menjadi garda depan kami, gitu lo, dalam pengembangann program ini. Prinsip kami tu gini, sepanjang ada penggeraknya, ada motornya, insyaallah program itu nggak akan padam, tapi sebagus apapun program itu, tapi tidak ada yang ayo-ayo gitu nggak akan ada pamornya gitu. Maka menjadi penting bagi kami adalah penguatan satgas PPA. Program kami itu menguatkan, menguatkan, menguatkan itu.
Q: Penguatan itu, yang dikuatkan apa saja?
A: jadi seperti yang didepan, pemberian pelatihan kemampuan dan sebagainya. Kemudian sharing, sharing pengalaman antar satgas. Mana yang bisa diadopsi. Sharingnya antar satgas, kita ketemu di kabupaten kan semua satgas disini, setiap perwakilan kan bisa menyampaikan hambatan dan masalah di satgasnya masing-masing. Mungkin ada kegiatan baru dari satgas lain bisa diadopsi. Modelnya kan beda-beda mas, dari widomartani itu ee pengambangannya diawali dari desa kemudian satgas desa itu mengembangkan di semua padukuhan, dari padukuhan ke semua RW, bergeraknya begitu. Ada yang masif seperti itu, kemudian di penguatan satgas itu kita ketemukan, ada fgd, ada sharing-sharing, bisa berbagi, gitu.
Q: Bagaimana respon orang tua? Ada yang curhat karena adanya program ini anak saya jadi…
A: oo adaa, yang anaknya dulu sering main game, tidak mau main dengan temannya, terus pergi apa, playstation itu, dengan adanya program ini, kemudian mereka memilih bermain dengan teman-temannya, karena itu juga mungkin pengaruh ini, kami tu sering berbagi di pertemuan ibu-ibu, bahwa pentingnya anak-anak itu bermain dengan sebayanya. Memang sekarang ini zamannya gadget, tapi bukan berarti kita membiarkan anak kita besar bersama gadget. Kita harus tetap mengarahkan anak kita tumbuh dan berkembang bersama teman-temannya. Mengapa harus bersama dengan teman-temannya? Ketika kita, patokan seorang anak, anak kita berinteraksi dengan orang lain itu ada 5 kecerdasan yang terbangun disitu. Yang pertama kecerdasan sosial, pasti ya kan? Berbagi, berempati, bersosialisasi dan sebagainya. Kecerdasan intelektual, mereka kan berbagi pengalaman, menjadi satu sama lain lebih aktif. Kecerdasan motorik, mereka akan berbagi (mereka bergerak?), betul, seperti itu.
Q: Selain itu, umpan balik dari masyarakat?
A: kalau yang kesadarannya sudah penuh itu ini, apa, lebih mudah untuk memberi bantuan misalnya. Itu mudah. Merasa oo ini penting to untuk anak kita.
Q: kalau feedbacknya yang agak jelek gitu bu?
A: selama ini belum pernah denger si.
Q: Perumusan program tingkat RW?

A: tetep mengacunya pada programnya pemerintah, tapi kalau pengembangan di lokas sudah diserahkan ke-kearifan lokal masing-masing. Jadi yang merumuskan satgas disana. Kan tidak sama gerakan di wilayah satu dan wilayah lain pasti akan beda-beda. Mungkin yang lain pertemuannya 2 kali seminggu atau 2 kali sebulan, misalnya, ada yang 1 kali sebulan. Kalau itu menyesuaikanlah, fleksibel dengan kondisi lokal di lingkup masing-masing.
Q: potensinya tadi gimana bu?
A: kalau saya melihat potensi masyarakatnya itu ingin maju.
Q: berarti motivasi mereka, "oh iya ini maju bareng-bareng"
A: iyaa, betul. Kemajuan bersama.
Q: berarti mereka keliatan semangat ya bu?
A: iya, semangat sekali. Kelihatan semangatnya lagi dulu setelah saya menginisiasi awal itu, "tapi jangan kaget bapak ibu, ketika saatnya kita sudah berkembang dan didengar oleh dunia, insyaallah akan banyak sekali yang berkunjung kesini". Ternyata betul, hampir setiap saat kan ada kunjungan, ada wartawan dll.
Q: Selain motivasi sebagai sumberdaya, ada lagi sumberdaya yang lain?
A: biasanya kan ada figur ya mas? ----------
Q: kalau sumberdaya kurang, finasial kurang, itu swadaya ya bu?
A: iyaa, swadaya.
Q: siapa yang mengorganisir program?
A: kalau saya boleh jawab itu kita pikir bersama-sama. Kembali itu ke masyarakat, jadi ada yang mencetuskan "baiknya bapak ibu kita bikin gini" gitu-gitu ada. Tapi kan tetep nanti itu menjadi karya bersama to mas? -..... Kalau di saya itu kan, nganu yaa...eeee setiap pertemuan itu pasti diminta menyampaikan, apa yang terupdate, kan gitu. Nahh saya bisanya disitu menjadi jembatan untuk membuka wawasan, "ini loh bapak-ibu, yang belum ada di kita itu ini". Penting nggak bagi kita? Kalau penting yaudah yuk kita rencanakan. Tapi kalaupun ada itu (ada yang mengajak, membuka wawasan dan musyawarah) yang dibawah tidak merespon dan tidak mendukung kan nggak jadi mas, nek saya menganggapnya gitu sih. Mbok aku punya ide seperti apa-apa ketika yang ada di lingkungan ini tidak menyambut baik pasti ide ini tidak akan terealisasi, he'e to? Apa itu, poinnya ada di apa? Ketika ada yang ngomong, kemudian disengkuyung bareng? Tapi kan menjadi tidak berarti ketika ada yang ngomong neng dah gitu lo. Intinya selama ini, ketika ngomong, yaa ayok gitu.
Q: berarti potensi motivasi masyarakat disana beneran tinggi ya bu ya?
A: saya melihatnya seperti itu mas, makannya sampe kemana-mana itu ya, saya selalu.. Pak RW pun selalu begitu kalau menyampaikan, tanpa dukungan penuh dari warga kampung saya itu tidak akan seperti ini…. Soalnya kan agar bisa cerita ke pihak lain kan akan lebih afdol ketika yang cerita itu masyarakat. Kita tu selalu membawanya seperti itu to mas? Nek sing cerita wong pemerintahan, bisanya wong apik-apik. (46:00)
Q: berarti kegiatan disana yang merumuskan satgas ppa disana?
A: iyaa, kemudian juga didukung oleh sumberdaya yang ada to? Kita punya potensi-potensi itu, kayak guru bahasa inggrisnya kita punya warga yang mampu untuk itu.
Q: selain kegiatan yang sekarang, ada lagi penambahan kegiatan untuk anak-anak?
A: sebenarnya dulu konsepnya kan kegiatan itu dibagi dalam dua pilar ya mas? Pilar religi dan pilar sosial, pilar sosialnya ya itu tadi, anak-anak bertemu di ruang bermain dengan kegiatan-kegiatan yang sudah terjadwal. Oo hari apa? nari, besok bahasa inggris, (47:00) besok literasi belajar dan sebagainya, ndongeng yok sebagainya. Nah di hari senin dan kamis dulu anak-anak itu khusus untuk ke masjid (TPA), untuk apa? Pendalaman aqidah, ada yang iqra, ada yang alquran. Sehingga akan terjadi keseimbangan pertumbuhan anak

itu, baik dari sisi mental, sosial dan religinya. Jadi satgas itu tidak hanya murni untuk perlindungan dan pemenuhan secara harfiah, tapi pemenuhan hak anak secara holistik.
Q: Meskipun potensi masyarakat ingin maju, tapi kan masih perlu didorong, bagaimana satgas mendorong masyarakat agar benar-benar ingin bergerak?
A: Kalau andalan kami ya itu mas, di pertemuan PKK. andalan kami itu di ibu-ibu PKK
Q: bagaimana satgas menyebar pesan agar…..
A: kita bersama-sama. Kita bersama-sama door-to-door, bersama-sama kita agendakan. Ada kita foto-fotonya itu. Saya sedang menempel stiker. Dulu awal yang kita buat adalah stiker, he'e to? Stikernya kita tempelkan di pintu-pintu semua warga. Kita muter sore bersama, kamu bagian barat, saya bagian selatan.
Q: selain door to door, nempel stiker, apa lagi bu?
A: ada peringatan-peringatan itu lo, kita kan pernah memperingati hari kartini. Kita pernah memperingati hari ibu, disitu selalu kami selipkan tentang, tentang kayak gitu.
Q: Selain itu tadi bu? Rapat juga berarti bu?
A: kalo rapat satgas itu rutin to? Sebulan sekali rapat satgas, rapat satgas itu selalu rutin.
Q: Kalau misal ada anak korban kekerasan, konsultasinya ke siapa?
A: di kita, di pemerintah ini kan ada namanya UPTD-PPA, Unit pelayanan teknis daerah-perlindungan perempuan dan anak. Satgas PPA itu kepanjangan, tangannya UPTD-PPA, otomatis dia punya tugas dan fungsi merespon setiap kasus yang didapati. Mendengar laporan, menerima laporan, sepanjang laporan atau kasus yang didapat itu, masih bisa dimediasi oleh satgas, maka satgas akan memediasi kasus yang tadi dilaporkan itu. Misal kasusnya masih bisa didamaikan. Kan di SOP ada, SOP kan kalau menemukan kasus yang ringan, cukup Satgas, tapi kalau kasusnya berat sampai luka-luka dan berdarah-darah misalnya, satgas harus segera mengamankan untuk dibawa ke layanan kesehatan, kayak gitu. Nah, kasusnya ini tentang kasus kekerasan dan pelecehan dan sebagainya, Satgas diberi kewenangan untuk asesmen awal. Melakukan asesmen, menggali data lengkapnya dulu, ketika itu tidak menjadi kapasitas (satgas) untuk menyelesaikan kasus, karena tugas satgas tidak untuk menyelesaikan kasus, maka akan dibawa untuk dirujuk ke UPTD PPA. (53:00)
Q: Pernah ada kejadian bu?
A: Pernah.
Q: itu gimana bu kejadiannya bu?
A: dulu ada pelecehan seksual di kampung kami yang dilakukan oleh orang dewasa yang tinggal di rumah kontrakan. Nah saat itu kan namanya anak ya akrab juga dengan dia. Tendensinya kan mau ngajarin belajar gitu lo, terus ternyata ada kejadian lain. Terus anak itu melaporkan ke orang tuanya, kemudian orang tuanya lapor ke satgas. Kemudian satgas menjangkau ke lokasi, bersama ketua, bersama ketua divisi, ada ketua, ada koordinator divisi to? Untuk mengedukasi dan melakukan asesmen lebih dalam. Seperti apa kebenaran masalahnya? Kemudian dirapatkan di satgas, rapat terbatas tentunya. Karena rahasia kalau penanganan kasus, tidak semua satgas terlibat. Karena ya itu tadi, rahasia kan kalau dipegang banyak orang bahaya, konsepnya seperti itu. Rapat terbatas, kemudian "wah ini udah anu ini, udah masuk ranah hukum" gitu to, berarti kan satgas tidak punya kewenangan disitu. Kan ini harus masuk ke ranah hukum karena ini termasuk tindak pidana, kejahatan orang dewasa kepada anaka itu kan, seks orang dewasa kepada anak itu kan tindak pidana. Dan satgas setuju untuk memproses kasus itu melalui ranah hukum. Kemudian anaknya kita rujuk ke puskesmas, karena disana kan ada psikolog, semua konsultasi (puskesmas) kita kan ada psikolognya. Sehingga satgas itu saat bekerja tidak sendiri murni pure dengan anggota satgas enggak mas, makannya ada divisi kemitraan, di susunan anggota satgas itu ada divisi kemitraan, nah mereka itu yang membangun jejaring di sekitar satgas itu berada. Disitu ada sekolah, disitu ada polsek, disitu ada polda, disitu

ada puskesmas dan rumah sakit dan sebagainya, mereka yang nanti akan nge-link untuk mendapatkan bantuan, kerja sama. Yaa itu tadi, kalau kasus pelecehan seksual maka dirujuk ke puskesmas untuk mendapat pendampingan secara psikologis, psikis anaknya karena korban. Kemudian di rujuk lagi ke rumah sakit untuk mendapatkan visum et repertum.
Q: berarti fasilitasi dari satgas sendiri disesuaikan dengan kejadiannya?
A: betul. Satgas juga kita bekali, mana yang lebih dulu harus ditangani, ketika berdarah-darah hayo? Rasah nggoleki sopo-sopo, gowo sik korbane neng rumah sakit terdekat atau puskesmas, atau dokter yang bisa menangani itu secara segera. Prinsip penanganan korban kan gitu mas, untuk memberi upaya penyelamatan secara cepat.
Q: berarti prosedurnya sudah ada disini semua ya bu ya?
A: iyaa, harapan kami SOP itu sudah bisa dipedomani lah. Secara sederhana kami menuangkannya di SOP.
Q: bagaimana satgas menentukan/mengambil keputusan?
A: kalau satgas kan tidak orang perorang mas, he'e to? Mereka kan ketemu duduk bersama merapatkan hehe merapatkan, membahas maksud saya, membahas itu, membahas masalah-masalah itu "ini kok gini, alternatif ini gini" naa nanti kan didiskusikan. Diskusi dari para satgas itu kemudian mengerucut dan dijadikan untuk pengambilan keputusan. Di diskusi itu kan pasti ada memetakan plus-minusnya. Itu dulu juga pernah ee kasus ini, kasus penganiayaan kalau nggak salah. Itu juga ada. Sehingga ditimbang plus-minusnya, ternyata akhirnya yaudah, cukup selesai dimediasi, tidak di ranah hukumkan, gitu.
Q: jadi pengambilan keputusan itu kembali lagi ke musyawarah itu ya bu?
A: iyaa, betul, itu menjadi senjata kita. Tidak boleh satgas mengambil keputusan sendiri-sendiri. Harus forum, forum satgas maksudnya.
Q: bagaimana satgas memantau program yang sudah berjalan?
A: setiap akhir tahun sebelum membuat perencanaan baru kami selalu melakukan evaluasi. Apa yang sudah kita lakukan dalam setahun ini yok apa yang tidak terlaksana, apa yang belum terlaksana, apa yang masih keteteran kemarin, sebelum kita munculkan program di tahun berikutnya.
Q: berarti itu semacam audit ya bu kalau tahunan?
A: yaa audit internal tapi.
Q: evaluasi bulanan?
A: kalau bulanan anu, kita biasanya, setelah event-event gitu. Dan kalau rutin cukup berjalan di sharing pertemuan itu.
Q: selain itu, ada lagi yang dibahas di evaluasi?
A: terutama kendala mas, kemudian kendala dan hambatan, kemudian alternatif solusi yang bisa digunakan untuk menjangkau kendala-kendala itu apa.
Q: kendala terbesar?
A: kendalanya anggaran heheh. Dulu kan kita pengen sekali punya baliho besar, nah tapi tu itu terwujudnya belum lama lo mas, baliho yang di jalan yang di sawah itu, baru kemarin, baru. Padahal itu rencana udah lama banget, itu menjadi bagian dari evaluasi berkali-kali. Ini anu kita, mimpi kita ada yang belum terwujud, membuat baliho besar di sebelah kampung.
Q: selain itu?
A: kayaknya itu sih, eeeee… ini-ini ingin membuat apa ya? Di semua sudut kampung itu ada mural, jadi tidak hanya terfokus di jalur itu, tapi di sudut-sudut yang sebelah utara, sebelah anu itu juga ada. Sehingga kesan atau wajah ramah anak itu akan terlihat dari sisi mana aja. Gitu. ini alhamdulilah sudah mulai bergerak itu mural untuk merambah semakin luas.
Q: mural itu yang bikin…

A: itu swadaya
Q: kan ada mural program satgas, dan ada mural yang bikin pemuda…
A: nah, pemuda itu kan sebagai mitra, programnya-program satgas, dukungan sdm bagian masyarakat kan gitu to. Kan pemberdayaan itu tadi, kita memberdayakan ya tidak pure yang diberdayakan para satgasnya, tapi juga masyarakat bagian dari partisipasi. Yang punya keahlian apa ya ayuk, seperti yang tadi bahasa inggris dan sebagainya kan juga pemberdayaan. Kalau sudah ada yang ahli itu, kenapa tidak? Daripada kita nyari guru dari luar bayar. Pemuda juga gitu, kan banyak yang punya anu seni, punya potensi seni, pinter gambar, pinter mural, he'e to? Dikala satgas mau buat itu, panggil mereka "yok bantu" seneng dia. Jadi ruang untuk dia berekspresi juga to? Secara nurani senimannya. (01:04:00)
Q: jadi mitra dari sini tu banyak…
A: iyaa, satgas tu harus menjaring, berjejaring, harus berjejaring seluas-luasnya mas. Membangun jaringan seluas-luasnya. Kalau perlu, himbauan dari kami tu satgas harus berjejaring banyak dengan para pengusaha di lingkungan itu. Dunia usaha.
Q: jadi guru bahasa inggris, nari dari satgas? Maksudnya dari masyarakat?
A: kebetulan kalau nari dari luar. Tapi kontribusinya dari swadaya masyarakat. Nah contohnya itu, ketika masyarakat itu sadar bahwa program itu penting untuk anak kita maka nggak akan sulit. Kita tetep narinya terus ada yang bayarin. Itu juga narinya bukan untuk anaknya dia, tapi juga untuk semua anak disitu. Gurunya dia yang bayarin. Ini bukti kesadaran bahwa ini tu penting untuk tumbuh kembang anak-anak kita. Nah, yang sulit kan proses itu kan mas? Membangun kesadaran itu. Nah ketika sudah ada yang sadar meskipun 1 bangganya kami sudah tak terkira. Rasanya senang sekali gitu lo.
Seperti waktu malam itu saya cerita ke mas edo, saat ini tu sekarang kami lebih anu, lebih tampak riang dan senang gitu, karena rasanya tidak sendiri lagi kami harus gembar-gembor menyampaikan perlindungan dan pemenuhan hak anak karena sudah temen-temen dari mahasiswa perguruan tinggi di sekitar jogja ini mulai melirik. Jadi otomatis kan kita akan mengedukasi masyarakat, hasilnya kan pasti akan dibaca entah kapan, oleh siapapun, he'e to? Pasti dibaca. Mereka kan nanti pasti punya anak (di masa depan). Ya memang program layak anak ini bukan program untuk jangka waktu pendek, tapi jangka waktu alih generasi bahkan. Nanti bukan kita yang menuai, tapi anak didik kita yang menuai hasilnya.
Q: kan ini lagi rame e-sport, bagaimana kalau di leles, ada anak yang ingin jadi gamer? Bagaimana satgas akan menyikapi ini?
A: Yak, sepanjang apa ya? Anak-anak kita itu menunjukan bakat yang positif gitu kalau kami secara kesatgasan tidak masalah. Yang penting orang tua kan mampu untuk mendampingi mereka dipastikan tumbuh kembangnya dengan positif. Kan kita nggak ngerti alasannya dia main game dan sebagainya. Tapi kan banyak konten-konten yang muncul yang tidak terbuka (contoh wanita seksi) pun akan sampai disitu. Itu sebenarnya sih yang kami edukasi.

Nah iyaa to, tetep harus ada pendampingan dan mesti harus ada ahlinya. Fungsi satgas ya sekedar lebih mengarahkan ke arah itu.

Yaa itu tadi mas, memastikan aja sepanjang bisa didampingi dan dikawal dengan baik. Sebetulnya main-main kayak gitu mengapa kita memberikan warning itu lebih pada efek sampingnya mas. Karena di efek sampingnya itu yang kadang tidak kita sadari bahayanya. Kan ada juga yang, game itu saya nggak ngerti game, tapi anak saya gamer, saiki wes mari ketok'e……. Nah saya tanya sama dia, "mas coba ibu nanya, kenapa si di ilmu perlindungan kami itu terlalu mengkhawatirkan, jangan diberikan kesempatan anak itu bermain game?" jangan lama-lama maksudnya gitu, takutnya kan konten-konten yang tidak semestinya muncul. "Ho'o bener bu, soalnya misal neng kono kui mung intine opo

yo? Perang atau apa gitu, reti-reti itu nanti ada kartun yang kayak tidak pakai baju, terus ee gitu lah. Itu sebenarnya ke arah-arah pornografi, tapi kalau bagiku itu nggak ngaruh-ngaruh juga, gitu" tapi nek anak-anak nggak tau, oh mungkin itu ya yang dikhawatirkan? Mengapa kemudian ada program ramah anak, gitu lo. Karena untuk mengantisipasi itu.

Tapi kan sama juga ya mas ya? Latihan-latihan yang lain ya? Kalau tidak didampingi dengan ahlinya kan hasilnya tidak maksimal.

Q: bagaimana cara anak menyampaikan aspirasi mereka? Selain esport?
A: kadang ke orang tuanya, orang tuanya yang ke satgas.
Q: bentuk aspirasi anaknya bagaimana?
A: sebenarnya kan kita itu anu, di kepengurusan satgas itu melibatkan unsur anak, unsur para remaja. (1:14:10)